

Revolusi Dua Jari ala TKI / Saat Ibas Memohon Pada Jokowi

# AKTUAL

Edisi 34 | 15 - 30 April 2015

## Perlawanan Mega

Pemerintah Jokowi-JK  
dikepung penumpang gelap.  
Mereka adalah kelompok anti  
parpol, Megawati menyebutnya  
sebagai kaum oportunist.

Rp 30.000

ISSN 2337-8395



9 772337 839509

# aktual<sup>®</sup> FORUM



## Rupiah Anjlok, Peringatan Dini Krisis Ekonomi

Dari kiri ke kanan, Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Andin Hadyanto, Anggota DPR RI Komisi IX M Misbakhun, Pengamat Ekonomi Indef Enny Sri Hartati dan Ketua Komisi Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Adler Manurung saat diskusi Aktual Forum dengan tema "Rupiah Anjlok, Peringatan Dini Krisis Ekonomi? di warung Komando, Jakarta, Minggu (5/4/2015). Melemahnya rupiah selain faktor eksternal, juga disebabkan oleh fundamental ekonomi Indonesia yang relatif lemah dan ekonomi kita masih didominasi modal asing, konsumsi ditopang kredit konsumsi juga daya beli rendah. [Munzir/ Aktual](#)



## Remisi dalam Perspektif Penegakan Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi

Dari kiri ke kanan, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho, Penggagas Indonesia Prison Studies Ahmad Taufik, Ketua Dewan Etik Peradi Sugeng Teguh Santoso, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil dan Staf Ahli Menteri Bidang Pelanggaran HAM Kementerian Hukum dan HAM Ma'mun saat diskusi Aktual Forum dengan tema "Remisi dalam Perspektif Penegakan Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi" di Resto Warung Komando, Jakarta, Minggu (29/3/2015). Diskusi ini menyoroti wacana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan terus menuai pro kontra, baik dikalangan akademisi maupun politisi. [Munzir/ Aktual](#)



## Kisruh APBD DKI: Siapa Silumannya

Diskusi Aktual Forum bertajuk "kisruh APBD DKI: Siapa Silumannya" di Warung Komando, Tebet, Minggu (15/3) dengan pembicara Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Pengamat Anggaran Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Anggota Pansus Angket F-Gerindra M. Syarief, Peneliti LIPI Firman Nur, dimoderatori M.Vidia Wirawan. [Munzir/ Aktual](#)

**PENDIRI** M Danial Nafis  
**KOMISARIS** Yudi Latif  
**PEMIMPIN REDAKSI** Faizal Rizki Arief  
**SEKRETARIS REDAKSI** Hanny Haniffa  
**REDAKTUR SENIOR** Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi  
**SIDANG REDAKSI** Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony  
**DIREKTUR MAJALAH** Wahyu Romadhony  
**REDAKTUR** Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito, Ismed Eka Kusuma  
**ASISTEN REDAKTUR** Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Ferro Maulana  
**STAF REDAKSI** Soemitro-Deddy Kusnaedi-Moh Sahlan (Majalah), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Fadlan Syam Butho, Maulana Khmal Macharani, Mochammad Zhaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nailin In Saroh, Nicha Muslimawati, Vina Fatma Sari, Munzir (Foto), Junaidi Mahbub (Foto), Warnoto (TV)

**IT** Radius Rasmangun  
**DESAIN GRAFIS** Shofrul Hadi, Nelson Nafis, WM Desangga

**KONTRIBUTOR LUAR NEGERI** Fitra Ismu (Meksiko)

**REPORTER DAERAH** Masriadi Sambo (Aceh), Achmadi Parandangi (Makasar), Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktavianus Mendrota (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodik (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikbal Kukuh (Bandung), Joko Pramono (Lumajang Jatim).

**PEMIMPIN PERUSAHAAN** Febrianto  
**DIREKTUR OPERASIONAL** Rinrin Sukmarihana  
**MANAGER KEUANGAN** Kasep Natakusumah  
**STAF KEUANGAN** Zulkifli  
**SIRKULASI** Widhi Maulana  
**MARKETING OFFICER** Ajeng Rohmana, Maradona Rambe, Ranie Anggoro  
**KESEKRETARIATAN** Nurlail Qadir

**ALAMAT REDAKSI**  
 PT Caprof Media Negeri  
 Cawang Kencana Building  
 1st Floor Suite 101  
 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang  
 DKI Jakarta 13630 Indonesia  
 No Telp : (021) 8005520  
 Fax : (021) 80886466  
 Email : majalah@aktual.co  
 iklan@aktual.co

**aktual.co**  
 TERHANGAT TERPERCAYA

**aktualTV**

## Politik Megawati, Gaya Ibu Rakyat Indonesia

*"To the famished man, democracy can never be more than a slogan. What can a vote mean to a woman worn out by toll, whose children fret and all with the fever of malaria? Democracy is not merely government by the people, democracy is also government for the people."*

Pidato berbahasa Inggris yang lancar Presiden Soekarno di sidang gabungan House of Representatives dan Senat Amerika Serikat tanggal 17 Mei 1956 itu seyogyanya selalu terngiang di telinga Megawati Soekarnoputri, presiden kelima Indonesia.

Bahwa, 'untuk manusia yang kelaparan, demokrasi tak pernah lebih dari slogan'. Itu amat dipahami oleh putri proklamator ini. Terutama sebagai seorang ibu, Mega sadar, 'apalah arti suara bagi ibu yang menjadi korban saat anak-anaknya resah menderita demam akibat malaria?'

Sikap ideologis yang tertanam berkat ajaran ayahandanya itu yang membuat Ketua Umum PDI Perjuangan ini mantap meyakini, 'demokrasi bukan hanya pemerintahan oleh rakyat, (tapi) demokrasi juga pemerintahan untuk rakyat.'

Cuplikan pidato Presiden Penyambung Lidah Rakyat itu sangat tepat untuk mencermati Kongres PDI Perjuangan bertema "Aku Melihat Indonesia", di Sanur, April 2015 kali ini. Tema yang diangkat dari judul puisi karya Bung Karno itu sesuai dengan tujuan partai berideologi Pancasila ajaran Soekarno ini dalam menyelenggarakan kongres, setelah Joko Widodo, kader yang diusungnya terpilih menjadi Presiden dalam Pilpres 2014.

'Presiden pilihan rakyat' ini tak dapat disangkal lagi adalah memang petugas partai. Berkat diusung PDI Perjuangan, Jokowi demikian sapaan akrabnya, telah empat kali menang pada pemilu jabatan eksekutif tertinggi di masing-masing tingkatan. Dua kali untuk Wali Kota Solo, satu kali untuk Gubernur DKI Jakarta. Terakhir Pilpres Juli 2014.

Semua itu tak lepas dari keputusan matang Mega selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Keputusan politisi negarawan yang berarti untuk jadi pucuk pimpinan tertinggi di negara demokrasi ketiga terbesar dunia ini, sebaiknya harus meniti *the right track* dari bawah ke atas. Keputusan yang mengisyaratkan jabatan presiden, seturut tafsir Megawati, bukan monopoli

keluarga politisi berdarah biru. Sikap yang menegaskan bahwa demokrasi itu memang pemerintahan oleh rakyat.

Keputusan Mega itu sejalan dengan sikap partai yang kukuh memperjuangkan garis tegas ideologi antikolonialisme-imperialisme ajaran Soekarno ini. Meski itu juga yang mungkin membuat PDI Perjuangan tiga kali gagal menang pilpres dalam tiga pemilu era reformasi. Baik pilpres tidak langsung melalui MPR maupun pilpres langsung *one man one vote*.

Meski Mega tiga kali gagal terpilih jadi presiden, namun putri Penyambung Lidah Rakyat Indonesia ini malah memenangi Pilpres 2014 dengan memberi mandat untuk Joko Widodo menjadi Capres dari PDI Perjuangan. Padahal Mega masih bisa jadi capres lagi. Atau paling tidak bisa berkompromi, misalnya mengalang menjadikan putrinya Puan Maharani sebagai cawapres dari capres Prabowo. Tapi kedua opsi itu tidak dipilihnya. Mega malah memilih Jokowi yang disebutnya sebagai 'banteng kerempeng yang hebat'. Sikap kenegarawan dari presiden kelima ini banyak diacungi jempol oleh berbagai kalangan.

Mega memilih jadi Ibu Rakyat Indonesia, sebagaimana sikap dasar yang diajarkan oleh Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno. Pilihan yang tak banyak disadari oleh pengamat, apalagi khalayak ramai.

Mega memilih bersama rakyat dan hadir untuk rakyat. Persis seperti yang pernah dikemukakan KH Said Agil Siradj sebelum jadi Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, bahwa meski bukan tipe guru bangsa, tapi Mega adalah sosok Ibu Rakyat Indonesia.

Seperti juga Soekarno yang mewanti-wanti bahwa ancaman bagi Revolusi Indonesia tidak hanya datang dari luar, tetapi muncul dari dalam negeri sendiri, begitu pula cara Mega memandang kelangsungan PDI Perjuangan.

Itu sebab, Mega bersedia mengorbankan diri tetap memimpin partai anti kolonialisme nonkooperatif yang berlandaskan banteng ini.

Dalam konteks pesan Bung Karno yang mengamanatkan doktrin Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, Mega kini berada dalam detik detik momen penentuan.

Kongres PDI Perjuangan di Bali kali ini harus lebih dilihat ke arah Megawati dengan gaya demokrasi Ibu Rakyat Indonesia. ■

## Laporan Utama



### 24 Gagalnya Skenario De-Soekarnoisasi

Banyak kalangan mengindikasikan manuver kelompok Jokowi dalam berbagai hasil survei yang seolah ingin membelokkan arah dukungan terhadap trah Bung Karno di PDIP.



### 28 Megawati Murka Jokowi Dikepung Kelompok Oportunis

Dalam pidatonya Megawati juga secara jelas mengkritik adanya pihak-pihak yang masuk dalam pemerintahan dengan subutan "penumpang gelap."



### 32 Lulusan Harvard Membius Istana

Perekrutan staf kepresidenan dari universitas luar negeri itu tentunya dapat menentukan arah kebijakan pemerintah. Merekalah yang akan menjadi pembisik Presiden Jokowi.



### 34 Hidupkan Kembali Ruh Politik Luar Negeri bebas-Aktif

Sejatinya penguasaan aspek geopolitik bangsa menjadi visi besar suatu pemerintahan dalam sebuah negara.



## 10 NASIONAL

### Revolusi Dua Jari ala TKI

Usai merekam keluhannya Fanny dengan menyentuh layar sentuh handphone-nya menggunakan dua jari mengunggah videonya di Youtube.

## 14 POLITIK

### Carut Marut Sengketa Partai Golkar

Kubu Agung menafsirkan jika keputusan hakim PTUN tidak lantas membuat ARB otomatis kembali berkuasa di partai berlambang pohon beringin tersebut.

## 18 POLITIK

### Saat Ibas Memohon Pada Jokowi

Teror pecah partai rupanya menghantui Partai Demokrat.

## 40 HUKUM

### Lampu Merah KPK Pada Denny Indrayana

Denny menunjuk langsung beberapa bank tempat pembayaran biaya paspor dan tidak hanya terbatas pada bank persepsi.

## 44 EKONOMI

### Kongkritkan Investasi, Tekan Pengangguran

Indonesia masih menghadapi problem besar di soal angka pengangguran yang cukup tinggi.

## 48 ENERGI

### Izin Ekspor Freeport-Newmont Rendahkan Wibawa Bangsa

Masinton Pasaribu menyebut ini adalah pengkhianatan terhadap Nawa Cita yang menekankan tentang kemandirian dan kedaulatan bangsa.

## 52 INTERNASIONAL

### Saudi Memicu Perang Baru di Yaman

Serangan militer Arab Saudi dan sekutu-sekutunya ke kubu Houthi di Yaman, telah membuka front perang baru di Timur Tengah. Namun, intervensi asing terhadap konflik dalam negeri di Yaman ini justru memperumit masalah dan tidak akan selesai dengan mudah.

## 56 URBANITAS

### Momentum Gemstone

Momentum paling gres batu akik ada pada perhelatan akbar di Bandung dan Jakarta, 19-24 April 2015 besok.

## 58 RESENSI

### Cita-cita Perdamaian yang Lahir di Tengah Benturan Peradaban

Jackie mencoba mengkritisi isu pertarungan geopolitik global besar di isu Jalur Sutera saat ini.

3 Tatap Redaksi

5 Terkini

6 Kaki Hari

8 Lensa Aktual

12 Kilas Nasional

22 Kilas Politik

42 Kilas Hukum

46 Kilas Ekonomi

50 Kilas Energi

66 Urbanitas

60 Kilas Nusantara

62 Oase

## PDI-P, anggota DPR pertama yang ditangkap KPK



Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait perizinan tambang PT Mitra Maju Sukses (PT MMS). Dia menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 pertama yang menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyematan status tersangka kepada Adriansyah bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas KPK pada Kamis (9/4) di Sanur, Bali. KPK menangkap Adriansyah tidak lama setelah Kongres PDI-P menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Pada tangkap tangan tersebut, mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kedapatan tengah menerima uang suap sekitar Rp500 juta. "Penyidik menyimpulkan telah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh A, mantan bupati Tanah Laut yang juga anggota DPR," papar Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP ketika jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/4).

Adriansyah sendiri dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2014

lalu. Dia terpilih menjadi wakil rakyat periode 2014-2019 setelah berhasil mengantongi jumlah suara sebanyak 48.611 suara. Pria berusia 61 tahun itu berangkat menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II. Dalam Pemilu 2014 lalu, Pria kelahiran Ampah 7 Oktober 1954, masuk ke dalam Calon Legislatif (Caleg) senior di Partai berlambang banteng itu. Jika dilihat dari riwayat anggota DPR fraksi PDIP, Adriansyah masuk ke dalam 15 besar Caleg tertua. Dan dia adalah satu-satunya Caleg dari Dapil Kalimantan Selatan yang lolos ke gedung Parlemen.

Dia diplot untuk mewakili PDIP di Komisi IV DPR RI yang membidangi aspek pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Di komisi itu, Adriansyah ditemani oleh tujuh rekannya yang juga sebagai kader PDIP. Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, PDIP berhasil meraih 109 kursi di DPR.

Pada 2006 lalu, era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden, Adriansyah sempat diduga menerima sejumlah gratifikasi untuk izin pertambangan. Saat itu, dia tengah menjabat sebagai Bupati Tanah Laut. Dia diduga memuluskan salah satu izin perusahaan tambang milik Wali Kota Banjarmasin Muhidin, PT Binuang Jaya Mulia. "Ini pemberian hadiah tersangka MHD kepada AS. Pemberian dilakukan melalui perantara MHD," jelas Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri Kombes Darmantodi kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (14/3). /M Zhacky

### KPK Tahan Suryadarma Ali

Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (10/4). Tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 ditahan setelah diperiksa selama 8 jam. "Saya menolak menandatangani surat perintah penahanan itu berikut berita acaranya," ujar Suryadharma saat

ditanya mengenai surat perintah penahanan, Jumat (10/4/2015).

KPK menahan Suryadharma di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Guntur selama 20 hari ke depan.

Dalam kasus ini, Suryadharma diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji. KPK juga menduga ada pengelembungan harga terkait dengan catering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah anggota DPR, keluarga Suryadharma, dan politisi PPP yang secara gratis ikut dalam rombongan haji. Atas penetapannya sebagai tersangka, Suryadharma menggugat KPK dengan mengajukan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Ia menyebut penyidik KPK belum memiliki bukti yang cukup kuat soal status tersangka tersebut. /M Zhacky



# DEMOKRASI DAN NOMOKRASI (3)



**D**alam menjalankan demokrasi konstitusional ini, hal pertama yang harus dibereskan tentu konstitusi itu sendiri. Kelemahan dan kerancuan hasil empat kali amandemen memerlukan pemeriksaan ulang seksama. Secara prinsip, bila amandemen dilakukan, keseluruhan pasal berikut ayat-ayatnya harus selaras dengan semangat dan prinsip-prinsip negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kedua, amandemen harus dilakukan hati-hati dan bertahap dengan mempertimbangkan tiap implikasi dan konsekuensinya. Ketiga, penyusunannya harus sistematis, koheren, jangan tambal sulam, dan bukan untuk kepentingan sesaat.

Kemudian dalam melaksanakan konstitusi ini, perlu keteladanan kepemimpinan. Dengan kepemimpinan yang committed terhadap konstitusi, ketaatan warga negara pada otoritas bukan ekspresi dari loyalitas dan ketakutan personal yang bersifat adhoc. Tapi haruslah ekspresi dari kesadaran hukum atas kemaslahatan bersama yang bersifat permanen.

Dalam keteladanan kepemimpinan ini, presiden (dalam sistem presidensialisme) berposisi sentral. Sebagai satu-satunya pejabat negara yang dipilih langsung (secara teoritis) oleh seluruh rakyat, Presiden melambangkan harapan rakyat bahwa amanat konstitusi akan diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan yang dijalankan administrasi pemerintahan secara rasional.

Komitmen utama konstitusi dan kepemimpinan negara berkhidmat pada upaya untuk mengamankan dan mencari keseimbangan dalam pemenuhan tiga pokok kemaslahatan publik (public goods). Hal ini berkisar pada persoalan legitimasi

demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif.

Basis legitimasi dari institusi-institusi demokrasi beranjak dari asumsi bahwa mereka merepresentasikan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat secara imparial. Klaim ini bisa dipenuhi jika segala keputusan politik yang diambil secara prinsip terbuka bagi proses-proses perdebatan publik (public deliberation) secara bebas, setara dan rasional. Hanya dengan penghormatan terhadap prosedur-prosedur public deliberation begitulah, peraturan dan keputusan yang diambil memiliki legitimasi demokratis yang mengikat semua warga, sehingga pemerintah bisa melaksanakannya secara benar (right) dan tanpa ragu (strong).

Kenyataan menunjukkan bahwa keputusan Presiden/Wakil Presiden acapkali tak sejalan dengan legitimasi demokratis. Adakalanya mengambil keputusan tanpa menimbang proses public deliberation; dan sering tidak menjalankan kebijakan yang diamanatkan oleh hasil public deliberation.

Setelah basis legitimasi diperjuangkan, kemaslahatan publik berikut ialah kesejahteraan ekonomi. Demokrasi politik tak bisa berjalan baik tanpa demokratisasi di ranah ekonomi. Pancasila mengisyaratkan, ujung pencapaian nilai-nilai ideal kebangsaan harus bermuara pada "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Negara kesejahteraan jadi pertarungan dari kesaktian Pancasila.

Dalam 9 tahun terakhir, praktik demokrasi di Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam memenuhi hak-hak sipil dan politik. Namun, pencapaian ini sering dimentahkan oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi. Joseph E. Stiglitz (2005) punya pandangan

menarik. “Di Indonesia orang kerap merasakan adanya konflik yang lebih intens: konflik antara kewajiban untuk bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam sebuah sistem yang didasarkan pada aturan, dengan kewajiban moral untuk membantu kerabat dan anggota komunitas di sebuah negara yang ditandai oleh tingginya angka pengangguran, kemiskinan akut, dan ketimpangan yang mencolok. Ekonomi pasar hanya berjalan baik dalam sebuah sistem yang dipijakkan pada aturan. Dan dalam sistem yang berjalan mulus dengan kesempatan kerja penuh dan rasa keadilan sosial yang luas, kebutuhan untuk ‘membantu’ kerabat sangat bisa dikurangi. Masalahnya, mereka yang berada di negara berkembang diminta untuk meninggalkan ‘jaring pengaman’ dalam ikatan kekeluargaan dan komunal ini, padahal jaring pengaman sosial (dari rejim kesejahteraan) itu sendiri belum tercipta.”

Guna menciptakan kesejahteraan ekonomi di negara seperti ini, Stiglitz merekomendasikan perlu keseimbangan antara peran pemerintah dan pasar. Untuk itu negara-negara berkembang harus lebih bebas dan leluasa menentukan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi mereka. Tidak ada cara tunggal dan sistem yang sempurna, seperti yang sering dikhotbahkan para arsitek ekonomi di World Bank dan IMF. Seturut dengan itu, pemimpin negara harus memiliki keberanian untuk menjalankan amanat konstitusi dalam penguasaan bumi, air, udara dan kekayaan alam bagi kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara, sebagai mata-hati dan mata-nalar rakyat, harus berani mengambil sikap pro-rakyat dalam kasus eksplorasi kekayaan alam yang merugikan bangsa dan negara.

Semua itu merupakan prakondisi bagi terpeliharanya kebajikan ketiga: yakni identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia. Kemunculan Indonesia sebagai perwujudan dari civic nationalism (yang berbasis demokrasi konstitusional), dengan Pancasila sebagai titik-temu solidaritas kolektifnya, mulai terancam oleh meruyaknya aspirasi politik identitas yang bersemangat partikularistik.

Fungsi pemimpin negara sebagai kekuatan moderasi di antara ekstrimitas masyarakat benar-benar diuji. Betapapun mereka tampil karena dukungan partai atau kelompok tertentu, sekali mereka terpilih anasir-anasir partikularistik harus dikesampingkan demi kemaslahatan bersama. Presiden/Wakil Presiden kerap terkesan melakukan endorsement secara sengaja atau tidak atas keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlalu mahal, jika demi mobilisasi dukungan bagi pemilihan mendatang, hal-hal mendasar dari prinsip demokrasi konstitusional dikorbankan.

### **Memperkuat Kesadaran Pelayanan Publik**

Pada akhirnya harus saya katakan terutama kepada pelaku dan akademisi di bidang administrasi negara, bahwa demokrasi akhirnya harus membangkitkan kesadaran pelayanan kepada rakyat sebagai ibu pertiwi. Betapapun indahnya slogan demokrasi, tanpa komitmen pelayanan dan kesejahteraan rakyat, yang dihasilkan adalah tirani.

Ingatlah, Soekarno 67 tahun yang lalu telah mengingatkan, tentang kemungkinan demokrasi tanpa demos (tanpa pemberdayaan rakyat) seperti di Perancis pasca revolusi. “Ya, marilah kita ingat akan pelajaran revolusi Perancis itu. Marilah ingat akan bagaimana kadang-kadang palsunya semboyan demokrasi, yang tidak menolong rakyat-jelata bahkan sebaliknya mengorbankan rakyat-jelata, membinasakan rakyat-jelata sebagaimana telah terjadi di dalam revolusi Perancis itu. Marilah kita awas, jangan sampai rakyat-jelata Indonesia tertipu oleh semboyan ‘demokrasi’ sebagai rakyat-jelata Perancis itu, yang akhirnya ternyata hanya diperkuda belaka oleh kaum borjuis yang bergembar-gembor ‘demokrasi’-kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tetapi sebenarnya hanya mencari kekuasaan sendiri, keenakan sendiri, keuntungan sendiri!”

Hal pertama yang harus diingat ialah

pandangan Mohammad Hatta, bahwa negara tak lebih dan tak kurang adalah “panitia kesejahteraan rakyat”. Karena pemenuhan kesejahteraan ini hanya bisa terwujud jika semangat kebangsaan dibina di atas landasan “kedaulatan rakyat”. Tak ubahnya dengan konsep bangsa, kedaulatan rakyat adalah sebuah program yang bertolak dari sebuah keyakinan, bahwa manusia ini sederajat, karena itu sama-sama mempunyai hak untuk mengatur corak hidup bersama. “Meskipun demikian bukan berarti kedaulatan rakyat yang dicita-citakan itu bertolak dari individualisme, yang menjadikan orang seorang sebagai ukuran segala sesuatu, tetapi dari kesadaran kolektivisme.”

Indonesia adalah cita-cita politik bersama yang perlu pengikatan dan komitmen bersama untuk mewujudkannya. Karena itu, Bung Hatta menyebut pentingnya menumbuhkan rasa tanggungjawab para pemimpin dan aparatur negara. “Sebab,” menurutnya, “kalau rasa tanggung jawab tidak mendalam sedalam-dalamnya, bangsa kita akan sukar mencapai kesanggupan untuk “menentukan nasibnya sendiri di kemudian hari”.

Selanjutnya, “Indonesia luas tanahnya dan besar daerahnya dan sebagai nusantara tersebar letaknya. Oleh karena itu soal-soal yang mengenai pembangunan negara Indonesia yang merdeka dan kuat tak sedikit jumlahnya dan tidak pula mudah adanya. Pemerintahan negara yang semacam itu hanya dapat diselenggarakan oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya, dan mempunyai pandangan yang amat luas. Rasa tanggung jawab itu akan hidup dalam dada kita, jika kita sanggup hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa” (Pidato Radio 8 Nopember 1944).

Akhirnya, Bung Hatta kerap kali menyeru kepada kerabat-kerabat sebangsa untuk sama-sama menggemakan bait puisi dari Rene de Clerq, “Hanya ada satu tanah yang bernama tanah airku//Ia makmur karena usaha, dan usaha itu ialah usahaku.” ■







**LENSA AKTUAL**

## **Bocah Pengejek Payung**

Seorang bocah pengejek payung kehujanan sambil menunggu pengguna jasanya di depan Gedung BNI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Rabu (1/4/2015). Hujan yang mengguyur kawasan ibukota dimanfaatkan beberapa anak untuk mencari rejeki sebagai pengejek payung dengan pendapatan antara Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu.

**Aktual - Tino Oktaviano**

# Revolusi Dua Jari ala TKI

“Kalau (pengiriman) TKI mau ditutup, apa kita mau joget-joget terus. Kamu kayak orang India, apa-apa dipikir sambil joget. Dipikir yang di rumah, kalau ditutup kamu mau kerja apa? Saya kemarin telepon ibuku, bu kalau ditutup bagaimana. Ibuku bilang, ya sudah pulang, cari suami, matun di sawah. Saya disuruh matun. Matun sawahnya siapa? Saya punya sawah saja enggak kok disuruh matun”.

**U** ngkapan dalam bahasa Jawa itu disampaikan tenaga kerja wanita asal Kroya Cilacap Jawa Tengah dalam video viral di situs youtube. Namanya Fanny Okthaviatul Laeli sebagaimana dijadikan nama akun Facebooknya. Video diunggah Fanny pada 20 Februari 2015 lalu.

Lewat handphone pintarnya wanita yang bekerja di Daegu, Korea Selatan berkeluh bila pengiriman TKI pada 2017 mendatang benar-benar ditutup pemerintah. Sebab ia harus kembali kegiatan lamanya di kampung, menjadi buruh bagi pemilik sawah. Usai merekam keluhannya Fanny dengan menyentuh layar sentuh handphone-nya menggunakan dua jari mengunggah



videonya di Youtube.

Kata ‘matun’ yang diutarakannya merupakan istilah familiar di kalangan petani di Jawa. Kegiatan ini adalah menyangi rumput di sawah setelah beberapa pekan padi ditanam. Kegiatan yang terus menyusut dari tahun ketahun. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 jumlah rumah tangga yang menanam padi tinggal 14,2 juta.

Apa yang disampaikan Fanny bukan semata untuk mengeluh. Ia mengakui mengekspresikan diri di situs *web* berbagi gambar gerak setelah rekan-rekannya dari berbagai negara mengunggah hal yang sama.

Menghangatnya perbincangan soal video viral ini berawal dari akun ‘JokoAsterMagetan’. Dalam video itu, seorang pria bertelanjang dada menyampaikan bagaimana perasaannya ditinggal istri bekerja keluar negeri.

Dalam bahasa Jawa logat Magetan, ia menunjukkan bagaimana senangnya ditinggal istri. Setiap bulan rutin dikirim uang, bisa membeli sapi, sepeda motor hingga handphone model terbaru. Istrinya menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri, ia tinggal menikmati hasil keringat istrinya.

Kata yang kemudian menjadi *tagline* dan mengular diikuti TKI lain dari berbagai negara adalah #rumangsamu #yokepenak. Itu setelah trio TKI yang bekerja di sektor informal di Taiwan membalas video yang diunggah JokoAsterMagetan.

Trio pekerja domestik tidak mau keberadaannya di Taiwan direndahkan. Ketiganya justru menyebut bekerja di negeri orang, meski jauh dari suaminya, sangat menggembirakan. Disebut satu-persatu bagaimana senangnya hidup di negara dengan julukan Naga Kecil Asia tersebut.

Fanny Okthaviatul Laeli



Setiap bulannya mendapatkan gaji Rp 6,5 juta, bangun tidur habis mandi bisa langsung dandan, pergi ke taman terus bermain media sosial Facebook. Untuk aktifitas sosial media ini bahkan bisa *online* 24 jam seperti halnya tempat *nongkrong* anak muda Jakarta, Seven Eleven. Kerjaannya tidak seberat yang dibayangkan orang, karena di akhir pekan mereka tetap bisa *kluyuran*.

“Rambutnya bisa *bonding*, kalau tidak di Taiwan ya tidak bisa *bonding*. Internetan sehari *full* 24 jam kayak Sevel. Aku males pulang, di Indonesia mau apa. Cari rumput buat kambing, enggak mau aku,” kata mereka.

“Semua pada ngomong disini pinjam suami orang, kata siapa? Kenapa pinjam suami orang, yang bujang juga ada banyak kok. Kapok kamu kang. Penilaian salah kalau kalian mengatakan TKW itu pinjam suami orang. (Bujang) tinggal minta gini ini lho,” sambungnya secara bergantian sambil mengacungkan lengannya tegak saat berkata ‘gini ini lho’.

Trio TKW tidak ketinggalan isu begal yang belakangan marak di berbagai kota di Indonesia, khususnya Jakarta. Mereka



Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri (kanan) bersama Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato Sri Richard Riot Anak Jaem (kiri) melakukan pertemuan di Kantor Kemnakertrans di Jakarta, Senin (16/3).

membandingkan betapa bahagianya bekerja dan berada di Taiwan dari pada di Indonesia yang marak kejahatan begal, penjabretan, pencopetan hingga pencurian.

### Wabah #rumangsamu

#yokepenak dengan cepat menyebar di kalangan buruh migran sebagai jawaban atas dua video awal. Jawaban dan tanggapan buruh migran dari berbagai negara terus bersahutan. Dari Hongkong, Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Turki, Qatar, Malaysia, Jepang, termasuk tenaga informal di negara adidaya Amerika Serikat.

“Katanya enak ditinggal istrinya ke luar negeri, enak mas? Ya enak. Nggak enak bagaimana? Di rumah punya uang, rokok, main Facebook, unggah video, minumannya Extra Joss. Tidak enak bagaimana, uangnya habis telepon istri, ke ATM, gesek gesek, gesek, gesek, cair. Tidak enak bagaimana,” sahut TKW di Hongkong, Prista Apria Risty, dalam video yang diunggahnya 14 Maret 2015.

“Enak Mbak? Enak. Kamu bilang katanya nggak pernah menyikat WC, ehmmmpretttt. Nggak pernah nyikat WC. Ya pasti pernah. Apakah ada

namanya pembantu nggak pernah menyikat WC. Jangan bilang kamu nggak pernah menyikat WC. Saya ini ya pembantu, ya menyikat WC. Bilang nggak pernah menyikat WC, di luar negeri itu di rumah mbah mu apa?,” sambungnya.

Sementara itu video yang diunggah dengan akun ‘TKI Penak’ dengan serius menyampaikan harapannya kepada Presiden Joko Widodo.

Dengan bahasa Jawa kental, wanita berkerudung itu mempertanyakan rencana Presiden Jokowi memberhentikan pengiriman TKI keluar negeri pada 2017 mendatang.

Pada 16 Februari 2015 lalu, Menteri Tenaga Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan akan segera menindaklanjuti keinginan Presiden Jokowi untuk memberhentikan pengiriman TKI informal pada 2017.

Kebijakan diambil sesuai *road map* nol Penatalaksana Rumah Tangga (PLRT) pada 2017 di kementerian yang dipimpinnya. Ditekankan penghentian pengiriman TKI informal bukan karena alasan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga buruk.

Alasan utama kebijakan tersebut adalah karena pemerintah melihat adanya perbedaan budaya beberapa negara yang justru memperlakukan PRT dengan tidak semestinya. Pemerintah mendorong pengiriman tenaga kerja ke depan yang terlatih dan profesional.

Hanif mengakui penghentian pengiriman TKI informal pada 2017 akan menimbulkan lonjakan jumlah pengangguran. Sebab itu pemerintah menyiapkan strategi agar lapangan kerja tercipta seluas-luasnya bagi para angkatan kerja yang menganggur.

“Kita cari solusi terhadap para pengangguran kita, yang 7,2 juta pengangguran terbuka, dan 34 juta

lagi mereka yang hanya lulusan SMP dan SD. Harus dipastikan, harus mengakomodasi yang SD dan SMP ini,” tegas Hanif.

Atas rencana tersebut, TKW yang mempunyai akun ‘TKI Penak’ berharap pemerintah memikirkan kembali rencana tersebut. Alasannya sederhana, pemerintah merencanakan kebijakan tersebut disebutnya tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Dibukanya lapangan pekerjaan bagi mereka yang sebelumnya bekerja di luar negeri. Bila persiapannya sudah matang, ia tidak akan keberatan dengan penghentian pengiriman TKI keluar negeri.

“Saya mau tanya Pak sama Bapak (Jokowi), apa benar 2017 mau tutup? Jangan ditutuplah Pak. Nanti kalau ditutup di rumah mau apa, masak mau nanam (padi). Nanam lho sehari nggak dapat 50ribu. Kalau di Taiwan lho Pak, enak, *rumangsamu* nggak enak? Ya enak. *Lha* nanti kalau di Indonesia mau apa,” pesannya.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sepanjang tahun 2014 terdapat 429.872 TKI yang dikirim ke berbagai Negara. Jumlah itu terdiri dari 219.610 orang (58 persen) TKI formal dan 182.262 orang (42 persen) TKI informal.

Penempatan TKI selama empat tahun terakhir (2011 – 2014), sebagaimana disampaikan Kepala Puslitfo BNP2TKI Muhammad Hidayat, terjadi naik-turun. Tercatat pada 2011 sebanyak 586.802 orang, 2012 sebanyak 494.609 orang, 2013 sebanyak 512.168 orang, dan 2014 sebanyak 429.872 orang.

Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah penyumbang TKI tertinggi dengan jumlah mencapai 29,510 orang. Sementara untuk tingkat propinsi tercatat Propinsi Jawa Barat sebagai penyumbang TKI tertinggi dengan 105.479 orang. Negara tujuan tertinggi dari 25 negara adalah Malaysia dengan 127.827 orang disusul Taiwan dengan 82.665 orang. ■

## Janji Jokowi Berbuah BUMN Menjadi Sapi Perah

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut Presiden Joko Widodo telah menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sapi perahan lagi. Pengangkatan sejumlah Komisaris dari kalangan politisi, relawan dan anggota Tim Sukses Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 2014 lalu menjadi komisaris BUMN adalah buktinya.

Penempatan orang yang tidak menguasai bidangnya di BUMN menunjukkan bahwa Jokowi tidak konsisten dengan janji-janji politiknya pada masa kampanye Pilpres lalu.

Di antara politisi, relawan dan pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu yang diangkat menjadi komisaris BUMN adalah Diaz Hendropriyono sebagai Komisaris Telkomsel, politisi PDIP Cahya Dewi Rembulan Sinaga sebagai Komisaris Bank Mandiri



dan politisi PDIP Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Bank BNI.

Kemudian politisi PDIP Sonny Keraf sebagai Komisaris Bank BRI, akademisi Refly Harun sebagai Komisaris Utama Jasa Marga,

relawan Roy E Maningkas dan Hilmar Farid sebagai Komisaris PT Krakatau Steel Tbk, serta dua anggota timses Iman Sugema dan Paiman Rahardjo sebagai Komisaris PGN.

"Jadi ini tidak konsisten, jelas ini politik balas budi, menempatkan BUMN sebagai sapi perah, mau dikeruk untuk itu (kepentingan politik)," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Ia mengingatkan Jokowi agar konsisten dengan janjinya untuk tidak bagi-bagi kursi/kekuasaan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu khawatir ke depan kinerja BUMN yang diisi oleh orang yang tidak menguasai bidangnya akan menurun.

"Kalau serahkan sekadar karena politik, sementara *track record* belum kelihatan, saya khawatir BUMN makin lama makin hancur," demikian Fadli. /Novrizi Sikumbang



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menemukan adanya kerugian negara dalam pemeriksaan kinerja atas efektifitas layanan paspor pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dalam Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2014 dan Penyerahan LHP kepada DPR, Selasa (7/4) pekan lalu, implementasi pembayaran *Payment Gateway* disebut telah mengabaikan

## BPK Temukan Kerugian Negara Proyek *Payment Gateway*

resiko hukum antara lain menyangkut pemilihan vendor.

"Implementasi pembayaran *Payment Gateway* mengabaikan resiko hukum antara lain pemilihan vendor *Payment Gateway* dilakukan pada saat Tim E-Kemenkumham belum memiliki kewenangan dan rekening bank untuk menampung PNPB tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan," Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz.

BPK menyoroti pelayanan bisnis paspor, yang mana terdapat masalah dalam perubahan mekanisme pembayaran berupa pembayaran elektronik dengan *Payment Gateway*.

Anggota BPK Moemahadi Soerja Djanegara menambahkan, pihaknya tengah mengaudit dana *Payment Gateway*, termasuk jumlah kerugian negara yang disebabkan perubahan sistem pembayarannya.

Dari situ, pihaknya akan segera mungkin menyerahkan hasil auditnya tersebut kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

"Bareskrim Polri sudah meminta kami dan kami akan menyerahkan secepatnya begitu selesai diaudit. Sekarang kami tidak bisa membeberkan kepada publik," jelas Moemahadi.

Temuan BPK ini berbeda dengan bantahan mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana, tersangka yang telah ditetapkan Bareskrim Polri dalam kasus dugaan korupsi proyek *Payment Gateway*.

"Sudah ada laporan BPK Desember lalu yang mengatakan negara menerima uang Rp 32,4 miliar. Itu bukan kerugian negara," kata Denny, Kamis 12 Maret 2015.

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka terkait proyek *Payment Gateway*. Denny dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 serta Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. / Adi Adrian

## PDIP dan Nasdem Desak Jokowi Reshuffle Rini, Andi dan Luhut

Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella membenarkan kemungkinan dilakukannya *reshuffle* Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam waktu dekat.

Penegasan Patrice didasarkan hasil pembicaraan pertemuan para Ketua Umum partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Minggu (5/4).

"Ada menteri kurang, ada menteri yang bagus. Itu hal yang wajar. Dari 34, ada yang belum mengembirakan, ya itu dibicarakan," kata dia di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (7/4) pekan lalu.

Ditekankan, *reshuffle* atau perombakan kabinet sebenarnya adalah hak prerogatif Presiden. Sebab itu keputusan ada ditangan Jokowi. Hasil pertemuan para Ketum

lebih kepada masukan terhadap kinerja para pembantu Presiden.

Parameter penilaiannya, Jokowi mempunyai lebih tahu karena mempunyai tim sendiri mana menteri yang telah bekerja maksimal maupun tidak/ belum.

"Diakui bahwa tidak semua menteri itu maksimal, bisa kita maklumi. 98 Persen orang baru. Hanya ada 3 menteri yang berpengalaman," kata Patrice.

Politikus  
PDIP



Masinton Pasaribu terang-terang menyebut kerja tiga orang yang layak dirombak. Ketiganya adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan.

"Kalau pendapat dari antara kader-kader, Menteri BUMN, Seskab. Kemarin juga dia mengakui membuat kelalaian. Kewenangan di staf kepresidenan juga. Kewenangannya tidak boleh melampaui menteri. Dia bukan Menko," kata Masinton.

Penilaian kader-kader PDIP demikian sebenarnya sudah disampaikan langsung kepada Jokowi. Hanya saja, Presiden menurutnya masih mempertimbangkan segala sesuatunya.

"*Reshuffle* itu hak prerogatif presiden. Kita hormati itu," tutup Masinton.

/ Nailin In Sarah

## DPRD Ingatkan Ahok Soal Reklamasi, JMN Gugat ke PTUN



Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membatalkan izin reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau G.

Ahok diminta menghormati pemerintahan Joko Widodo yang mengatur posisi kawasan laut nasional.

Dalam hal ini, Teluk Jakarta masuk dalam kategori kawasan strategis yang diatur Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang

(UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri (Permen). Peraturan Gubernur DKI Jakarta tidak bisa melampui aturan diatasnya.

"Gubernur harus patuh dengan pemerintah yang lebih tinggi," tegas Pras, sapaannya, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4) pekan lalu.

Masuknya Teluk Jakarta sebagai kawasan strategis nasional sudah seharusnya dikelola dengan payung hukum nasional. Perizinannya sudah tentu melalui tahap kajian yang mendalam oleh pemerintah pusat.

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang izin Reklamasi Pulau di Pantai Utara Jakarta sendiri digugat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh Jakarta Monitoring Network. JMN menilai penerbitan SK izin reklamasi oleh Ahok melanggar prinsip norma hirarki peraturan perundang-undangan dengan mengabaikan

UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *junto* Perpres Nomor 122/2012 tentang Reklamasi.

"Kami maju sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Kami sepenuhnya yakin PTUN akan kabulkan gugatan tersebut karena indikasi Ahok sebagai pejabat tidak taat azaz dan norma hukum dalam melahirkan SK Reklamasi tersebut," jelas Amir, Sabtu (4/4).

Menurutnya, PT Muara Wisesa Samudera selaku anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) telah mengantongi izin reklamasi per tanggal 24 Desember 2014. Sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Pulau G dari total 16 pulau buatan.

"Gugatan kita layangkan 23 Maret 2015. Tenggat waktu terakhir pengajuan pembatalan SK sesuai hukum acara PTUN 90 hari. Jadi, kami sudah penuhi prinsip pengajuan gugatan tersebut," jelasnya. / Kemal Maulana

# Carut Marut Sengketa Partai Golkar

“Ente Jual Ane Beli.” Ucapan Kuasa Hukum Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Bali Aburizal Bakrie (ARB) Yusril Ihza Mahendra menandai babak baru konflik Partai Golkar Kubu ARB dan Ketua Umum versi Munas Ancol Agung Laksono setelah sebelumnya diprediksi jika perseteruan Partai Golkar akan mereda setelah diterbitkannya SK MenkumHAM.

Kalimat tersebut sengaja dilontarkan Yusril untuk menantang Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly untuk bertarung menggunakan dalil-dalil hukum di pengadilan dalam persoalan kisruh dua kubu Partai Golkar. “Yasonna mau bertarung di pengadilan? Ente Jual, Ane Beli!” begitu kalimat lantang Yusril saat menantang Yasonna, Senin (6/4).

Kini, Dewi Fortuna rupanya tengah berpihak kepada kubu ARB setelah Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur mengeluarkan putusan sela terkait dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM bernomor M.HH-01.AH.11.01 yang mengesahkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta, yang dikomandoi oleh Agung Laksono.

Pada putusan sela tersebut menyebutkan pengadilan menetapkan penundaan pelaksanaan surat KemenkumHAM, sehingga mengembalikan kepengurusan Partai Golkar sesuai dengan Munas Riau. “Mengabulkan permohonan penggugat,” ucap Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Timur Teguh Satya Bakti, Rabu, (1/4).

Tak hanya itu saja, Hakim

Teguh juga memerintahkan Menteri Yasonna untuk tidak mengeluarkan keputusan lain terkait dengan obyek yang menjadi sengketa. Dan Yasonna juga diminta tak menerbitkan surat keputusan tata negara baru mengenai Partai Golkar hasil Musyawarah Ancol sampai ada keputusan tetap.

Berikut selengkapnya tiga putusan sela PTUN Jakarta Timur :

Pertama, mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan penggugat.

Penetapan kedua adalah memerintahkan MenkumHAM menunda berlakunya SK pengesahan terhadap kubu Agung hingga ada putusan tetap atau penetapan lain yang mencabut putusan itu.

Sedangkan penetapan yang ketiga, memerintahkan kubu Agung Laksono dan MenkumHAM tidak melakukan tindakan-tindakan terhadap urusan tata negara lainnya yang berhubungan dengan keputusan tata

negara obyek sengketa. Termasuk dalam penertiban surat-surat keputusan tata negara yang baru mengenai DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta sampai ada keputusan perkara ini ada keputusan tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabut.

Dengan keluarnya keputusan tersebut, Yusril pun berkicau melalui akun twitternya @Yusrilihza\_Mhd “Dengan putusan penundaan ini, kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono tidak boleh mengambil tindakan administratif dan politik apa pun”.

Tak sampai disitu, Yusril pun menjelaskan soal putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta Timur yang menunda SK MenkumHAM yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono karena dirinya merasa gerah dengan berbagai penafsiran atas keputusan Majelis Hakim PTUN Jakarta Timur.

Yusril berpendapat dengan





**Foto atas:** Kuasa Hukum Partai Golkar Kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang kedua gugatan ketua DPP Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) atas kubu Agung Laksono di PN Jakarta Utara, Selasa (31/3).

**Foto kanan:** Ketua Fraksi Golkar versi Munas Ancol Agus Gumiwang (kiri) bersama Anggota Fraksi Gede Sumanjaya memberikan keterangan pasca hasil putusan sela PTUN Jakarta yang mengeliminir SK Menkumham terkait dualisme Golkar di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4).

dikeluarkan keputusan hakim PTUN yang menunda SK MenkumHAM, putusan hakim tersebut mengabulkan gugatan kubu ARB tidak lain karena adanya keadaan yang mendesak.

"Penetapan penundaan diputuskan oleh majelis hakim PTUN atas dasar permohonan dari penggugat. Alasan utama dikabulkannya penetapan penundaan adalah keadaan mendesak yang jika tidak dikabulkan, akan merugikan kepentingan penggugat atau akan menimbulkan suatu akibat yang tidak dapat dipulihkan kembali jika dalam



putusan akhir gugatan dikabulkan majelis hakim," kicau Yusril, Jumat (3/4).

Yusril menambahkan "Jika penetapan penundaan dikabulkan maka SK yang digugat dinyatakan ditunda berlakunya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan ditunda keberlakuannya maka SK tersebut dengan sendiri menjadi tidak berlau secara efektif sejak SK tersebut diterbitkan. Maka keadaan kembali ke keadaan seperti semula pada saat sebelum SK tersebut diterbitkan".

Seperti santer diberitakan sebelumnya, kader Partai Golkar kubu Agung Laksono, salah satunya Agus Gumiwang, sempat mencoba mengambilalih ruang kerja pimpinan Fraksi Partai Golkar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Agus sendiri diplot untuk melengserkan Ade Komaruddin dari kursi Ketua Fraksi Golkar.

Dengan terbitnya putusan sela PTUN Jakarta Timur tak terlalu direspon kubu Agung, karena pihak Agung menafsirkan jika keputusan hakim PTUN tidak lantas membuat ARB otomatis kembali berkuasa di partai berlambang pohon beringin tersebut. Kubu Agung pun menganggap jika kepengurusan merekalah yang diakui, meski telah dikeluarkannya putusan sela oleh

Hakim PTUN.

"Keputusan PTUN Jakarta tersebut bersifat 'sela' dan tidak mengganggu proses keabsahan Menkumham," tegas Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agus Gumiwang.

Pendapat tersebut kemudian dikuatkan oleh dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh pengacara kubu Agung Laksono, OC Kaligis. Dirinya menegaskan bahwa putusan PTUN tersebut tidak tepat.

"Itu salah paham. Dalam UU PTUN Pasal 67 ayat 1 JO pasal 115 yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan TUN yang digugat," ujar OC Kaligis, di Jakarta, Minggu (5/4).

Lebih lanjut OC Kaligis mengatakan sebelum dikeluarkan putusan yang *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap, maka SK MenkumHAM tetap berlaku.

"Artinya sebelum *inkracht*, keputusan MenkumHAM masih sah, ditambah putusan MPG adalah final dan mengikat," jelas OC Kaligis.

Terkait dengan hal tersebut di atas, OC Kaligis menegaskan tidak ada yang salah dalam SK MenkumHAM tersebut, pasalnya, Menteri Yasonna hanya menyalin apa yang disampaikan Mahkamah Partai Golkar yang diketuai oleh Muladi.

Dan hal tersebut sambung dia, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang.

"Menteri kan hanya meng-copy putusan MPG. Makanya saran saya, menteri harus melakukan banding. Saya nggak lihat menteri di sini salah," ungkap dia.

Menurut OC Kaligis, apa yang dilakukan kubu ARB telah mengaburkan publik pasalnya sebut dia, kubu ARB mengatakan jika SK MenkumHAM tidak berlaku lagi setelah keluarnya putusan sela PTUN Jakarta Timur.

"Iya lah. Publik jadi sesat. Dikatakan MPG tidak ada putusan. Padahal jelas, diktumnya ada. Ini kan panik, dia (ARB) coba semua langkah. Kalau perlu Ical (ARB) bisa lakukan gugatan ke seluruh Indonesia," tegas OC Kaligis.

Bagaimana dengan sikap sang empu SK MenkumHAM bernomor M.HH-01.AH.11.01 terhadap putusan sela PTUN Jakarta Timur?

Menteri Yasonna pun tetap bersikukuh jika surat keputusan yang telah dikeluarkannya terkait kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono sah.

Lebih lanjut Yasonna mengatakan keluarnya Keputusan PTUN Jakarta Timur hanya menunda pelaksanaan tanpa membatalkan keputusan tersebut.

"SK sudah dikeluarkan dan itu sah sampai sekarang," tegas Yasonna di Jakarta, Minggu (5/4).

Sedangkan penundaan, kata Yasonna jelas karena masih ada pemeriksaan pokok perkara oleh hakim PTUN.

Dengan demikian Yasonna tetap pada pendiriannya, jika SK pengesahan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional di Ancol Jakarta dikeluarkan berdasarkan keputusan Mahkamah Partai, dimana Keputusan Mahkamah Partai tersebut diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan berlaku sah dan sifatnya mengikat.

Jika kemudian keputusannya tersebut dipermasalahkan, Yasonna pun menyerahkan hal tersebut

kepada pengadilan, Yasonna beranggapan jika PTUN nantinya yang akan memutuskan apakah keputusannya itu bermasalah atau tidak. Dan hakim sendiri kata dia hingga kini belum memutuskan keabsahan keputusannya itu.

Yasonna beralih, justru jika Kemenkumham tidak memutuskan kepengurusan Partai Golkar mana yang sah, akan timbul kekosongan pada level pimpinan partai itu.

Dirinya juga tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan dengan ditundanya SK kepengurusan Partai Golkar kubu Agung,

dan di sisi lain kepengurusan hasil dari Munas Riau sudah demisioner. Menurut dia, SK yang dikeluarkannya tidak menimbulkan ketidakpastian. Bahkan Yasonna sendiri justru menuding jika putusan sela PTUN lah yang menimbulkan ketidakpastian.

"Kalau dari segi kepastian hukum, dengan adanya keputusan MenkumHAM bisa membuat Golkar mengikuti Pilkada," kilah dia. Yasonna beralasan kepengurusan yang diakui saat ini hanya berlaku hingga tahun 2016 di mana harus diadakan Munas Golkar.

Alasan yang dikemukakan oleh



kepengurusan Partai Golkar kembali pada kepengurusan hasil Munas di Pekanbaru, Riau yakni dibawah komando ARB dengan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal. Hal tersebut karena kepengurusan hasil Munas Riau sudah demisioner seiring dengan terselenggaranya Munas Partai Golkar tahun lalu.

Tak hanya itu, Yasonna juga mengatakan alasan keluarnya SK MenkumHAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 diantaranya sudah ada pengakuan dari Mahkamah Partai Golkar yang mengakui kubu Agung

Menkumham Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (6/4). Rapat kerja tersebut membahas diantaranya SK Menkumham mengenai dualisme Partai Golkar.

Yasonna kemudian diamini oleh mantan Ketua Umum yang kini menjabat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia mengatakan jika putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak membatalkan SK MenkumHAM soal kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol Jakarta pimpinan Agung Laksono.



"Ya PTUN ini kan menunda tetapi berlaku, tetapi pelaksanaannya yang ditunda. Jadi tetap sah itu keputusannya Menteri Hukum, tapi ditunda pelaksanaannya," jelas Kalla di Makassar, Senin (6/4/2015).

Kalla mengakui bahwa pengurusan Agung Laksono yang dianggap sah oleh KemenkumHAM. Namun demikian, dengan adanya putusan sela PTUN ini, Agung belum bisa mengambil tindakan sebagai Ketua Umum Golkar terkait kepengurusan partai.

"Ya tindakan-tindakannya, langkah itu enggak. Karena itu kan tidak dicabut, tidak dibatalkan, jadi tetap Agung Laksono. Langkah-langkah Agung itu ditunda dulu, ditunda untuk mengganti ini, menganganti itu. Tapi tidak dikatakan tidak sah, itu maknanya," tutur dia.

### **Kader Partai Golkar Ramai-Ramai Lompat Pagar**

Di tengah konflik internal Partai Golkar, dikabarkan sejumlah kader partai yang menjabat kepala daerah dan pengurus Sulawesi Selatan (Sulsel) melompat pagar dengan mendaftar diri ke partai politik lain, hal ini bertujuan agar mereka dapat ikut bertarung pada Pilkada serentak di 11 kabupaten di Sulsel.

Pengakuan langsung datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Barru, Andi Anwar Aksa mengaku, dirinya telah mendaftarkan diri ke Partai Amanat Nasional (PAN).

"Saya sudah mendaftar di PAN dan semoga bisa menjadi pertimbangan untuk diberikan rekomendasi," jelas Anwar Aksa, juga menjabat Wakil Bupati Barru, Minggu (5/4).

Anwar beralasan keputusannya yang diambil karena beberapa pertimbangan, di antaranya konflik yang berkepanjangan pada tingkat DPP Golkar. Hal lain yang menjadi pertimbangannya bertujuan mengajak partai lain berkoalisi untuk memenangkan Pilkada. Kini kata dia, sudah ada empat partai

politik yang telah didekatinya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Langkah serupa juga diikuti Bupati Kabupaten Pangkep Syamsuddin Hamid. Syamsuddin mengatakan, jika dirinya juga sudah mendaftarkan diri ke lima partai yaitu PDIP, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pecahnya Golkar memang diprediksi akan mempengaruhi Pilkada di seluruh Indonesia. Pasalnya legalitas Golkar yang terpecah ini pasti akan dipertanyakan oleh KPUD pada musim Pilkada bulan Desember mendatang. Hal inilah yang dikawatirkan oleh politisi senior Golkar Akbar Tanjung. "Yang saya khawatirkan adalah hal ini bisa mempengaruhi keikutsertaan dari Partai Golkar dalam Pilkada yang akan datang," ingat Akbar soal potensi ancaman Golkar tak bisa ikut Pilkada.

Akbar mengatakan selama ini partai nya sangat mengandalkan basis dari Kepala Daerah yang berkuasa. Terlebih lagi konsolidasi ditingkat pusat untuk Pilkada akan digelar pada bulan April ini. "Memang sangat baik jika masalah Golkar bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, paling tidak selambat-lambatnya bulan April harus bisa karena bulan Juli awal kan pendaftaran calon kepala daerah dari masing-masing partai," kata Akbar.

Menkumham menyadari dampak itu. Ia bahkan menilai keputusan yang sudah diterima oleh kubu Agung Laksono memungkinkan Golkar untuk bertarung dalam Pilkada di sejumlah daerah. "Kalau dari segi kepastian hukum, keputusan saya terlepas puas atau tidak puas, Golkar menjadi jelas. Golkar bisa mengajukan perencanaan pilkada," kata Yasonna usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2015).

### **Resep Ampuh Selesaikan Konflik Internal Partai Golkar**

Sementara itu Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran Muradi, mengatakan dirinya mempunyai resep untuk meredakan konflik internal Partai Golkar. Setidaknya kata Muradi ada tiga langkah yang bisa digunakan untuk mengakhiri konflik.

"Dibutuhkan langkah-langkah untuk menemukan kata sepakat. Setidaknya untuk mewakili Partai Golkar dalam pilkada di sejumlah daerah. Ada tiga pilihan bagi kedua kubu untuk bersepakat," ujar Muradi rilisnya, Kamis (2/4)

Tiga langkah tersebut sambung Muradi: Pertama, masing-masing kubu, baik kubu Agung Laksono, maupun kubu Aburizal Bakrie dapat menunjukkan inisiatif untuk bertemu dan membuat kesepakatan kepengurusan dari kedua pihak. Dengan demikian akan terjadi pembagian kekuasaan yang berimbang.

Kedua, masing-masing kubu dapat mengajukan figur-figur yang dianggap netral dan dihormati oleh kedua pihak sebagai mediator penyelesaian konflik.

Muradi beranggapan, meski tidak menemukan kata sepakat untuk penyelesaian konflik, setidaknya mediasi yang dilakukan bisa sebatas untuk keperluan pilkada saja.

Kemudian, yang terakhir, kedua kubu bisa membuat kesepakatan dengan meminta otoritas politik untuk memutuskan kubu mana yang dapat dijadikan rujukan mewakili Golkar dalam pilkada. Otoritas yang dimaksud seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan kedua kubu harus bersepakat untuk tidak melibatkan pihak eksternal seperti Koalisi Merah Putih (KMP), atau figur politik yang tidak netral, yang hanya sekedar untuk mendapatkan legitimasi politik semu belaka.

"Pelibatan pihak-pihak eksternal hanya akan makin membuat suasana makin tegang dan tidak menuntaskan permasalahan," imbuhs Muradi. ▀

Dedy Kusnaedi

**T**eror pecah belah partai rupanya juga menghantui Partai Demokrat. Partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut bahkan secara khusus meminta Ketua Fraksinya Edhie Baskoro Yudhoyono untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Pada rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden Senin (6/4) lalu Ibas menyampaikan pesan itu. "Dalam rapat konsultasi kami sampaikan aspirasi kader Partai Demokrat. Saya sampaikan ke depan forum di depan Presiden Jokowi, Pak Presiden kami berharap agar Partai Demokrat ke depan tidak di-Golkarkan karena sebentar lagi Partai Demokrat akan Kongres," kata Ibas dalam jumpa pers di ruangan Fraksi Demokrat, Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4).

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPR RI, Fadli Zon. Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan pesan Ibas itu disampaikan di depan pertemuan yang dihadiri oleh semua pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPR RI. Ibas mengatakan Pemerintah tidak ikut campur dalam mengintervensi internal partai. "Kami berharap penuh pada pemerintah bidang politik hukum menjaga kedaulatan politik tanpa kesan bisa diintervensi dan pecah belah partai tertentu yang sedang melaksanakan demokrasi," ujarnya.

Presiden Jokowi menanggapi pesan tersebut dengan tawa. Seperti diceritakan oleh Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg) Pratikno. "Guyon itu. Presiden juga menjawab ,terbayang aja nggak ada di otak saya," itu. Itu kan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Intinya presiden mendorong agar internal partai itu mampu untuk mengelola institusinya, mengelola manajemen konfliknya secara baik," jelas Pratikno.

Pesan tersebut disampaikan oleh Ibas disaat posisi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono terjepit. Jelang Kongres PD ke-III yang rencananya digelar



# Saat Ibas Memohon Pada Jokowi



Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama pengurus harian DPP Partai Demokrat disela rapat pleno di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (11/12).

Ventje Rumangkang, SBY diminta untuk duduk manis memantau gerak partai ke depan. Roda kepemimpinan organisasi diberikan kepada kader-kader potensial sekaligus sebagai bentuk regenerasi partai.

Sementara dukungan agar SBY dipilih kembali secara aklamasi dalam Kongres digelorakan oleh pengurus DPP PD dan pengurus DPD. Adu kuat forum pendiri versus pengurus ini tidak terelakkan. Dengan waktu sekitar dua pekan ke depan, safari politik untuk menggalang dukungan di daerah diperkirakan akan berlangsung sengit.

\*\*\*

“Kami yakin. Para kader yakin dan percaya Pak SBY tidak akan menolak (dicalonkan sebagai Ketua),” kata Ketua Harian Demokrat, Syarif Hasan, di Gedung DPR Senayan Jakarta, belum lama ini (30/3).

Keyakinannya bukan tanpa alasan. Menurut dia, dukungan SBY maju dan dipilih secara aklamasi merupakan suara mayoritas pengurus daerah. Pengurus daerah yang disebutkan mempunyai hak suara dalam Kongres. Bahkan beberapa organisasi sayap menyatakan hal sama.

Syarif yang ditunjuk sebagai Steering Commite (SC) atau panitia pengarah kongres meyakini konflik di tubuh PPP dan Golkar tidak akan terjadi di Demokrat. Dengan penekanan SBY yang tetap memegang kendalinya.

FKPD dan barisan pendukung Anas Urbaningrum berang dengan pernyataan demi pernyataan mengenai dukungan mayoritas terhadap SBY. Apalagi dukungan mayoritas mengerucut menjadi wacana aklamasi keterpilihan SBY dalam kongres.

di Surabaya, 11-13 Mei mendatang, SBY dihadapkan pada dua pilihan. Maju menyelamatkan partai yang didirikannya atau memberikan kesempatan bagi kader-kader baru memimpin partai berlambang mirip segitiga mercy itu.

Bila maju, SBY dianggap tidak demokratis. Sebaliknya, ada kekhawatiran partai akan terpecah-

belah jika ke depan tidak dipimpin SBY. Ini berkaca pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Dua partai yang mengalami konflik berkepanjangan hingga kini.

Anggapan SBY tidak demokratis diserukan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat. Melalui pimpinannya,



Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri Partai Demokrat Ventje Rumangkang (tengah) berbicara didampingi Ketua Forum Komunikasi Pendiri Partai Demokrat Etty Manduaessy (kiri) dan Ketua Forum Komunikasi Pendiri Partai Demokrat A. Mubarak (kanan) ketika menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3).

Gede Pasek Suardika yang berniat maju sebagai calon Ketum menyebut penunjukannya Syarif sebagai panitia pengarah beserta Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee (OC) sebagai jalan memuluskan langkah SBY.

Posisi SC dan OC sangat strategis dalam kongres. Keberadaannya bisa mengarahkan peserta kongres untuk memilih secara aklamasi. Demokrasi yang semestinya berjalan akan direayasa karena kepanitiaan lebih layak disebut sebagai tim sukses SBY.

Seharusnya, SC, OC dan panitia lainnya dipilih dari kader-kader partai yang tidak mendukung salah

satu calon ketum. Dengan begitu independensinya selama kongres bisa dijaga sekaligus memberikan peluang yang sama bagi kader potensial untuk maju sebagai caketum.

“Saya kira itu keliru. Dipilihnya kami sebagai Ketua SC dan OC merupakan tanggung jawab. Jika terjadi aklamasi nanti, itu juga bagian dari demokrasi,” tepis Syarif.

Ketua FKPD Partai Demokrat, Ventje Rumangkang, mengingatkan DPP PD agar konsolidasi organisasi lima tahunan di Surabaya berlangsung secara *fair*. Semua kader potensial diberikan tempat yang sama untuk memajukan partai. Aklamasi justru menciderai demokrasi partai.

Beberapa kader potensial dimaksud adalah mantan Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi PD Marzuki Alie, Ahmad Mubarak, Sys NS, Gede Pasek Suardika, Isran Noor dan Hayono Isman. Tokoh-tokoh itu akan didorong untuk meramaikan kongres.

Dorongan sekaligus permintaan kesediaannya akan disampaikan dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) FKPD, 17 April 2015.

FKPD mendesak dikembalikannya hak-hak para pendiri partai. Terutama hak suara dan hak memberikan perizinan waktu kongres. Hak-hak yang sebelumnya dijamin dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan sejarah pendirian Demokrat. Akan tetapi hak-hak itu kemudian dihapus.

Wakil Ketua Umum FKPD Ahmad Mubarak juga menolak wacana aklamasi. Sebab cara-cara demikian justru akan menimbulkan permasalahan di internal partai lima tahun ke depan. Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan SBY untuk mendapatkan kekuasaan.

“Banyak bukti di partai lain, kalau aklamasi itu melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami yakin Pak



Ketua PPUU DPD Gede Pasek Suarkina mengikuti dialog kenegaraan di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4).

SBY orang yang sangat demokratis. Buktinya 10 tahun memerintah negara, kami tidak melihat arah kepemimpinan yang otokratis,” kata Mubarak.

Disinggung bagaimana sikap kenegarawanan SBY pada Kongres 2010 di Bandung. Padahal, kader yang didukung yakni Andi Mallarangeng kalah dari Anas Urbaningrum. Saat itu, perebutan kursi Ketum diramaikan oleh tiga calon. Masing-masing Marzuki Alie, Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.

Sikap demikian diharapkan terjadi juga pada Kongres 2015. Kader-kader terbaik diberikan kesempatan untuk berkompetisi secara sehat untuk menduduki tampuk kepemimpinan partai. Anggota Dewan Pembina ini

sependapat agar konsolidasi organisasi di Surabaya berjalan dengan baik, tidak disusupi pihak luar seperti yang terjadi pada PPP dan Golkar.

“Kalau SBY bilang tak sedia sekarang atau sebelum kongres, maka kandidat berseliweran dan terjadi kericuhan yang bisa mengakibatkan PD seperti Golkar dan PPP,” kata dia.

Terlepas nantinya SBY maju atau tidak, Mubarak menyatakan niatnya untuk maju sebagai caketum PD. Bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan panggilan sejarah sehingga dirinya tidak bisa menolak apabila ada yang mendukungnya.

Sementara itu Waketum I DPP FKPD M Subur Sembiring memberikan masukan agar SBY memposisikan dirinya secara terhormat. Yakni dengan duduk manis sebagai Ketua Dewan Pembina dan tidak menerima dukungan ataupun mencalonkan kembali.

Ia meyakini SBY tidak akan bersedia maju sebagai caketum, melainkan cukup sebagai Ketua Dewan Pembina. Apalagi dalam penilaiannya SBY bukanlah sosok pemimpin yang haus akan kekuasaan.

“Sudah saatnya Pak SBY istirahat dan menikmati kehidupannya. Apa kita tidak kasihan pada SBY terus-menerus dipaksakan untuk mengurus Partai Demokrat. Cukuplah beliau selama 10 tahun membesarkan Partai Demokrat,” pintanya.

Hitung-hitungan di atas kertas, merujuk Anggaran Rumah Tangga Demokrat, kongres diikuti sekitar 500-an suara. Jumlah itu terdiri dari 450 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang masing-masing mempunyai 1 hak suara, 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang masing-masing memiliki 2 suara untuk Ketua dan Sekretaris.

Selanjutnya lima suara dari Dewan Pembina (Wanbin), tiga suara dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta suara dari Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) dan perwakilan Organisasi Sayap (Orsap) Partai.

Keterpilihan Ketum dianggap aklamasi jika mampu meraih suara 50 persen plus satu. Perolehan suara mayoritas ini diyakini akan didapatkan SBY jika maju kembali sebagai caketum. Terlebih pengurus daerah sejak awal mendukung penuh. Dibawah kepemimpinan SBY, Demokrat diharapkan tidak mengalami nasib seperti PPP dan Golkar.

“Semua hal yang tidak baik tentu harus diwaspadai, namun kita yakini banyak orang tahu secara persis dari Demokrat seluruh pemegang hak suara mayoritasnya masih menginginkan pak SBY menjadi ketum,” demikian Waketum Agus Hermanto.

Kewaspadaan kader Partai Demokrat ini wajar saja. Informasi yang dihimpun Aktual menyebutkan FKPD telah menyiapkan DPC dan DPD versi pendiri partai. Bahkan kubu ini disebut sempat menggelar pertemuan dengan partai pendukung pemerintah. ■

Soemitro

## Perpres Kontroversi Akhirnya Dicabut Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut Perpres No 39/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, dimana Perpres tersebut telah memicu polemik dimasyarakat.

Menurut Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi menilai



langkah yang diambil Jokowi adalah tindakan yang tepat, Senin (6/4).

Lebih lanjut Apung mengatakan alasan inflasi dan kenaikan harga mobil yang menjadi dalih pemerintah menaikkan uang muka mobil untuk pejabat tidak logis karena kenaikan ini mencapai 85 persen dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta.

Disamping itu, pemberian fasilitas uang muka mobil untuk pejabat negara merupakan pemborosan karena negara harus mengeluarkan dana sebesar Rp158,8 miliar yang diperuntukan membiayai mobil 753 orang pejabat negara. Pejabat negara itu diantaranya anggota DPR, anggota DPD, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan anggota Komisi Yudisial.

Apung pun mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan tidak sepenuhnya mengetahui perihal peraturan presiden tentang kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat, karena sambung Apung bagaimana bisa seorang Presiden tidak mengecek terlebih dahulu peraturan presiden yang ditandatangani.

Berikut kronologi terbitnya Perpres 39/2015, pada 5 Januari 2015 Ketua DPR Setya Novanto mengirim surat bernomor AG/0026/DPR RI/2015 berisikan permintaan revisi besaran tunjangan uang muka bagi pejabat negara dan lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan. Pada Pasal 3 Perpres No 68/2010 tunjangan sebesar Rp 116.650.000,- dan diminta direvisi menjadi Rp 210.890.000,-. Kemudian pada 28 Januari 2015, dalam menindaklanjuti surat yang dari Ketua DPR, Seskab Andi Widjajanto mengirim surat bernomor B.49/Seskab/01/2015 kepada Menkeu Brodjonegoro untuk memberikan pertimbangan. Pada tanggal 18 Februari Menkeu membalas dengan mengirim surat bernomor S 114/MK.02/2015 yang berisikan penetapan besaran fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan sebesar Rp. 210890.000,-. Presiden Jokowi pada tanggal 20 Maret 2015 menerbitkan Perpres 39/2015, tak lama berselang kemudian pada 6 April 2015, karena memicu polemik akhirnya perpres kontroversi tersebut dicabut. /Deddy, K

## Rapat Konsultasi DPR dan Presiden Jokowi Hasilkan Dua Kesepakatan

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pada rapat konsultasi tertutup antara Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR RI yang berlangsung berlangsung selama tiga jam di Komplek Parlemen Senayan, Senin (6/4) DPR meminta pemerintah untuk menjelaskan dua hal, yakni tentang tidak dilantiknya Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengenai pelaksanaan APBNP 2015 yang sudah disetujui DPR RI.

“Merupakan agenda ketatanegaraan, kelembagaan negara kita mulai dalam tiga bulan sekali, tadi agendanya dua hal yang pertama adalah menyangkut masalah Kapolri dan APBNP, penjelasan presiden

terhadap dua hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan yang akan dilakukan oleh DPR sesuai mekanisme yang ada,” ujar Setya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sudah memenuhi permintaan DPR RI menjelaskan alasan dua hal terkait Kapolri dan APBNP 2015. Presiden berharap rapat konsultasi mampu meningkatkan sinergi antar lembaga negara untuk kepentingan rakyat.

“Suasannya sangat kekeluargaan, hal ini kita harapkan akan memperkuat sinergi antar lembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan, mempercepat kesejahteraan,” jelas Presiden

Jokowi. Jokowi menambahkan, “sehubungan dengan Kapolri tadi saya sampaikan bahwa alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan yaitu mengingat bahwa pencalonan sebagai Kapolri menimbulkan perdebatan di (kalangan) masyarakat, dan dalam rangka menciptakan ketenangan dimasyarakat serta kebutuhan kepolisian negara Republik Indonesia kami mengajukan Kapolri yang baru”.

Terkait APBNP 2015, jelas Jokowi realisasi mengalami peningkatan dibanding periode sama tahun lalu.

“APBNP tadi kami jelaskan sudah berjalan karena kalau kita lihat dari data dibandingkan tahun yang lalu dari 1 Januari sampai 31 Maret 15,6 (persen), tahun ini sudah 18,5 (persen) dan kami ingin agar pelaksanaannya itu lebih dipercepat lagi,” papar Jokowi. /Deddy, K

## KPU Menilai Pilkada Serentak Dapat Memicu Konflik



Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai pada Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015 dinilai memiliki potensi sengketa, baik selama dan setelah Pilkada serentak. Salah satu penyebabnya diantaranya kepengurusan ganda partai politik (parpol), seperti yang dialami Partai Golkar dan PPP.

Karena itu, Komisioner

KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengatakan kepengurusan parpol sebagai peserta pilkada serentak harus diperhatikan.

Lebih lanjut Ferry mengatakan kandidat kepala daerah umumnya diajukan oleh 12 parpol peserta Pemilu 2014, ironisnya sejumlah partai hingga kini masih terbelenggu konflik internal.

Ferry menegaskan oleh karena itu lembaganya hanya akan menerima kepengurusan parpol yang dinyatakan sah oleh instansi pemerintah terkait. "Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kepengurusan parpol yang sah. Memang itu akan jadi potensi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak nanti," jelas dia di Jakarta, Rabu

(8/4).

Sementara itu lanjut dia, untuk pendaftaran peserta Pilkada yang semula dijadwalkan pada 22-24 Juli 2015. Tapi, setelah berkonsultasi dengan DPR maka diubah jadi 26-28 Juli 2015.

Ketatnya jadwal Pilkada kata Ferry tidak dapat dilakukan perubahan signifikan pasalnya jadwal tersebut dirancang dengan memperhatikan potensi sengketa yang dapat muncul pascapilkada. Pasalnya, sengketa Pilkada yang berujung ke pengadilan membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya. "Sengketa nanti membutuhkan waktu, apakah sengketa yang dibawa sampai ke Bawaslu, PTUN sampai banding ke MA," pungkas Ferry. /Deddy.K

## KTKLN Tidak Cocok Bagi ABK

Mantan Wakil Ketua Tim Pengawas (Timwas) TKI DPR Poempida Hidayatulloh menilai Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang juga wajib dimiliki Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya bagi Anak Buah Kapal (ABK) tidak relevan lagi digunakan sebagai kartu identitas TKI ABK saat bekerja. Pasalnya kini sudah ada buku identitas pelaut yang diakui secara internasional (ILO) untuk mendapatkan perlindungan yakni "The Seafarers Identity Documents (SID)".

Pernyataan tersebut disampaikan Poempida pada Sidang Pleno MK lanjutan pengujian Pasal 26 ayat 2 huruf f dan Pasal 28 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN). Uji materi diajukan oleh 29 TKI sektor perikanan atau Anak Buah Kapal (ABK), Rabu (8/4).

KTKLN lanjut dia tidak menjamin perlindungan bagi TKI di luar negeri. Faktanya, KTKLN tidak diakui sebagai identitas TKI di negara tujuan bekerja. Kalaupun



KTKLN diakui, identitas tersebut hanya berlaku bagi TKI yang tempat kerjanya menetap. Sementara TKI ABK yang melaut pasti berpindah-pindah, sehingga KTKLN dianggap hanya melindungi TKI yang bekerja di darat.

"Tidak diakuiinya KTKLN khususnya di negara tujuan TKI ABK, berakibat rentan dieksploitasi saat bekerja. Para TKI ini juga tidak mendapatkan makan yang layak dan istirahat yang cukup," sesal Poempida.

Dia menambahkan kalaupun TKI ABK mengantongi KTKLN, mereka tidak memiliki akses perlindungan hukum terutama saat TKI ABK

yang dipekerjakan pada kapal yang melakukan *illegal fishing*. Bahkan, peluang mereka melaut bertahun-tahun tanpa izin pulang cukup besar.

Poempida mengatakan dengan tidak diakuiinya KTKLN di luar negeri khususnya sektor perikanan sebenarnya dapat terjawab dengan adanya Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 108 Tahun 1961 tentang "The Seafarers Identity Document". Konvensi ini lalu diubah dalam Konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958.

Oleh karenanya kata dia, dirinya mengusulkan agar pemerintah mewajibkan TKI ABK untuk memiliki SID sebagai identitas khusus saat bekerja di luar negeri karena SID sangat cocok digunakan untuk pelaut yang dihadapkan pada resiko tinggi baik mobilitas, ancaman keamanan, dan keselamatan pelaut.

"Seharusnya SID bisa dikeluarkan pemerintah sebagai *lex specialist* terhadap identitas pelaut yang bekerja di kapal asing," imbuh dia. /Deddy.K

# GAGALNYA SKENARIO DE-SOEKARNOISASI



Baliho bergambar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) dan Presiden pertama RI Soekarno (kiri) di area Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4). Megawati Soekarnoputri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020.



**U**sia 68 tahun belum terasa senja bagi Megawati Soekarnoputri. Putri kedua proklamator kemerdekaan Soekarno ini masih bersuara lantang membakar semangat para kader Partai Demokrasi Indonesia



Perjuangan (PDIP) yang akan kembali menobatkannya sebagai Ketua Umum DPP PDIP periode 2015-2020 melalui Kongres di Bali, 9-12 April 2015.

Semangat, konsistensi perjuangan, serta trah Soekarno adalah kekuatan mutlak yang melekat pada Megawati sehingga posisinya sulit digoyang dari kursi ketua umum. Namun usia tua adalah kodrat manusia yang tidak bisa dielakkan, sementara agenda besar politik akan terus berjalan dan menanti di depan.

Melihat kondisi Megawati yang akan semakin uzur, maka posisi Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP periode 2015-2020 menjadi sangat strategis sehingga layak diincar. Kongres ini juga akan menentukan apakah trah Soekarno bisa terus mengakar kuat di PDIP pasca-Megawati atau tidak? "Buat kami, meneruskan trah Bung Karno bukan masalah harus atau tidak harus. Tapi memang kulturanya sebagai partai ideologis, yang asalnya dari PNI Bung Karno," ujar Puan Maharani, cucu Bung Karno yang disebut-sebut sebagai sosok kuat penerus Megawati.

Puan Maharani saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia di kabinet Jokowi. Karena itu, peneliti dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, mengingatkan bahwa kultur yang dibangun dalam kabinet Jokowi adalah menteri tidak boleh menjabat sebagai pengurus struktural partai. "Jika aturan ini dilanggar, maka ini akan membuat Jokowi seperti ayam sayur atau petugas partai yang lemah," papar Ikrar.

Selain Puan, nama lain yang muncul sebagai kandidat Sekjen adalah Ahmad Basarah dan Eriko Sotarduga dan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Siapa pun yang didapuk menjadi Sekjen, mereka kemungkinan tidak akan mampu mendinginkan suasana politik di internal PDIP, khususnya dalam menyikapi dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Sentuhan kepentingan Jokowi dalam penentuan struktur kepemimpinan PDIP memang sulit disembunyikan. Kondisi ini bisa dimaklumi, karena jika Jokowi tidak menancapkan orang kepercayaan diposisi strategis PDIP, besar kemungkinan kepemimpinannya sebagai presiden akan terombang ambing dan rapuh.

Banyak kalangan mengindikasikan manuver kelompok Jokowi dalam berbagai hasil survei yang seolah ingin membelokkan arah dukungan terhadap trah Bung Karno di PDIP. Pada akhir Maret 2015 lalu, markas partai banteng moncong putih di Lenteng Agung, Jakarta Selatan mendadak geger setelah Poll Tracking merilis hasil survei yang menyimpulkan bahwa trah keluarga Soekarno tidak lagi diinginkan untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kemudian beberapa hari menjelang kongres PDIP di Bali, giliran lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang merilis survei bahwa kader yang mendukung orang luar trah Bung Karno di pucuk PDIP tergolong banyak. Dari 467 pemimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 28 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang diwawancarai CSIS, sebanyak 48,2 persen responden menganggap isu trah Sukarno bukan lagi penentu posisi ketua umum maupun jabatan strategis lain.

"Pelan-pelan para kader partai mulai berpikir terbuka demi masa depan partai," ujar peneliti CSIS, Arya Fernandes.

Bahkan menurut data CSIS lebih dari 31 persen atau sekitar 147 DPC tidak lagi menginginkan lagi Megawati sebagai Ketua Umum. Meskipun ada perpecahan suara menurut CSIS, suara yang mendukung Megawati masih paling tinggi. Sebanyak 320 DPC (68,5 persen) masih menyebut nama Megawati sebagai calon ketua umum PDIP periode 2015-2019.

Apabila ketua umum tak dipilih secara aklamasi, maka dukungan

internal PDIP akan tersebar ke beberapa nama yang dianggap cukup mampu melanjutkan kepemimpinan Megawati, yakni Jokowi, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung.

Jokowi didukung secara terbuka sebagai Ketua Umum PDIP oleh 76 DPC (16,3 persen), Puan yang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan didukung 25 DPC (5,4 persen), Ganjar Pranowo yang kini Gubernur Jawa Tengah didukung 14 DPC (3 persen), dan politikus senior PDIP Pramono Anung yang mantan Wakil Ketua DPR dan mantan Sekjen PDIP didukung 11 DPC (2,4 persen).

Meskipun menduduki posisi kedua dalam hal dukungan politik, Jokowi menegaskan tidak memiliki niat untuk mencalonkan diri. Hal ini disampikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mantan Sekjen PDI-P tersebut menjamin Jokowi tidak akan merebut posisi Megawati. "Jokowi pada Rapat Kerja Nasional PDIP tahun lalu sudah menyatakan tak punya keinginan dan ambisi menjadi ketua umum atau pengurus partai. Beliau akan fokus sebagai presiden," kata Tjahjo.

Suara mempertanyakan oligarki partai di PDI-P diamini oleh politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko. Menurutnya tidak ada keharusan pertainya dipimpin oleh trah Soekarno. "PDIP merupakan partai modern dan terbuka. Itu perlu kami jaga. Kami tidak boleh menutup diri pada apa pun. PDIP tak wajib dan tak harus dipimpin trah apa pun," kata Budiman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Adanya faksi di PDIP sebenarnya sudah bisa dibaca jauh sebelum survei Poll Tracking dan CSIS itu muncul, termasuk isu tidak harmonisnya hubungan Megawati dengan Presiden Joko Widodo. Indikasi ketidakharmonisan itu juga bisa dibaca dari sikap kritis sejumlah politikus kawakan PDIP yang secara terbuka menyalahkan beberapa kebijakan pemerintah Jokowi. Sikap kritis itu besar kemungkinan diketahui

bahkan direstui Megawati. Hal ini bisa dimaklumi lantaran banyak keputusan Jokowi yang disebut 'melawan' kebijakan Megawati.

Salah satu 'perlawanan' Jokowi yang cukup benderang adalah dalam penentuan calon Kapolri Budi Gunawan. Meski disodorkan oleh Megawati, namun Jokowi tidak mengangkat Budi Gunawan dengan berbagai latar belakang alasan dan lika-likunya. Jokowi juga ditengarai mengecewakan para kader potensial PDIP yang terabaikan dalam penyusunan kabinet.

Benar saja kekecewaan internal PDI-P terhadap pemerintahan Jokowi sangat terlihat dalam Kongres yang digelar di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur Bali.

Hadir sebagai kader sekaligus Presiden ke VII Jokowi tidak mendapatkan tempat istimewa dari penyelenggara Kongres.

Bahkan tidak satu pun baliho bergambang Jokowi terbentang di lokasi Kongres. Bahkan Jokowi menurut informasi sempat tidak diundang oleh panitia pelaksana.

Wibawa Presiden bahkan ada pada titik terendah saat tidak diberikan waktu untuk berpidato di depan peserta kongres.

Ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Seorang Presiden yang hadir dalam kongres Parpol tidak memberikan sambutan.

Pembentukan citra yang ingin menggerus kepemimpinan Megawati yang disusun oleh kelompok non parpol rontok di Pulau Dewata.

Megawati terpilih secara aklamasi oleh peserta Kongres. Ia kembali dipercaya sebagai Ketua Umum periode 2015-2020.

Prediksi panasnya perebutan Sekjen tidak terbukti. Megawati dengan bulat menunjuk Hasto sebagai Sekjen.

Megawati juga tetap mempertahankan Puan dalam struktur pengurus meskipun berstatus non aktif.

Kongres bahkan seolah dibuat untuk mengkritik habis kepemimpinan Jokowi sebagai

Presiden yang baru 6 bulan menjabat. Pelawanan terhadap pengaruh neoliberalisme sangat terasa dibawakan Megawati. Di sini nafas PDI-P belum habis meskipun saat ini dikepung oleh para penumpang gelap.

### Kritikus PDIP Terhadap Jokowi

Soliditas PDIP dalam mengawal jalannya pemerintahan pimpinan Jokowi-JK perlahan-lahan rapuh. Indikasinya terlihat dari munculnya beberapa kritikan terbuka dari beberapa kader PDIP terhadap sejumlah kebijakan Jokowi. Bukan hanya Effendi Simbolon yang memang sejak awal bersuara kritis, namun juga Masinton Pasaribu, Rieke Diah Pitaloka, TB Hasanuddin dan sejumlah politikus kawakan lainnya.

*Effendi Simbolon.* Kritik pernah disampaikan Effendi Simbolon yang berharap hak angket tentang pengelolaan minyak dan gas bumi serta minerba digulirkan di Komisi VII DPR. Politikus kawakan PDIP ini tampaknya ingin menguak kesalahan presiden dan kabinetnya dalam membuat kebijakan, termasuk soal harga BBM yang diserahkan kepada pasar.

"Kebijakan Jokowi soal BBM dan soal Minerba sangat pragmatis dan melanggar UU. Dengan menyerahkan harga BBM ke pasar, artinya negara ambil keuntungan dari rakyatnya sendiri. Hanya karena ambisi kartu sakti Jokowi malah lepas ke pasar. JK, Sofyan Djalil, Rini, dan Jokowi ngerti nggak sih esensi Negara?" kata Effendi.

*Masinton Pasaribu.* Sosok Masinton Pasaribu belakangan mulai sering muncul di media karena sikap kritisnya menanggapi isu-isu krusial, khususnya dalam penentuan calon Kapolri. Anggota DPR dari dapil DKI Jakarta II ini menyayangkan pembatalan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya.

Dengan nada halus, Masinton menyentil Jokowi yang kurang mampu menjaga marwah DPR dengan membatalkan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri meskipun sudah disetujui DPR. "Kita



Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Wapres Jusuf Kalla (kanan), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) dan Menteri PMK Puan Maharani (kiri) menghadiri acara pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4).

negara hukum, negara kita konstitusi. Dalam konteks ini kita harus tegas terhadap surat Presiden mengenai paripurna DPR yang sudah setuju calon Kapolri yang sudah diajukan (Budi Gunawan),” katanya

Agar tidak ada preseden buruk tentang calon Kapolri yang sudah disetujui DPR, Masinton meminta semua anggota DPR dapat menjaga marwah lembaga legislatif dengan mempertahankan keputusan penunjukan Komjen Budi Gunawan. “Kita ingin Presiden ke depan tidak menganggangi kelembagaan DPR RI ini,” tukas Masinton.

Kekecewaan Masinton bisa memuncak lantaran kabar terakhir menyebutkan bahwa Jokowi bersikukuh tidak melantik Budi Gunawan, bahkan menolak menjadikannya sebagai Wakapolri. Keputusan ini muncul ketika Jokowi melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR di Jakarta, 6 April 2015 lalu

*Rieke Diah Pitaloka.* Pada masa kampanye Pilpres 2014 silam, Rieke Diah Pitaloka diketahui paling getol menyuarakan kehebatan Jokowi.

Wanita yang memiliki panggilan Oneng ini juga selalu membela Jokowi ketika mendapat serangan opini dari lawan-lawan politiknya saat Pilpres. Namun setelah sukses mengantarkan calonnya menjadi Presiden, sikap Rieke pelan-pelan berbelok menjadi kritikus Jokowi.

Salah satu kritikan yang dilontarkan Rieke ini disampaikan dalam sebuah sidang paripurna DPR, bahwa pemerintah tak mampu mengendalikan harga bahan pokok masyarakat, akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, juga mengkritik rencana pemerintah untuk menaikkan iuran peserta BPJS. Baik yang ditanggung pemerintah maupun ditanggung peserta BPJS.

“Belum saatnya menaikkan iuran BPJS karena ada kenaikan harga bahan pokok di masyarakat. Ini momen yang tidak tepat, saya minta pimpinan menyikapi soal ini,” kata Rieke.

Secara keras, Rieke mengatakan bahwa keputusan pemerintah menetapkan harga BBM mengikuti harga pasar adalah keliru, apalagi MK sudah membuat putusan yang melarang kebijakan semacam itu. “Tapi pada perkembangannya, harga BBM ternyata cenderung mengikuti harga pasar, sehingga menimbulkan efek domino yang menyulitkan rakyat,” ucap Rieke.

*TB Hasanuddin.* TB Hasanuddin

adalah politikus senior yang suaranya cukup berpengaruh di lingkaran PDIP. Belakangan, Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini mulai melontarkan *statement* yang mengkritik kebijakan Pemerintah Jokowi-JK karena dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dikritik TB Hasanuddin adalah terkait keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Perpres ini ditandatangani Presiden pada 20 Maret 2015.

Menurut Hasanuddin, meski pembereian uang muka membeli mobil itu sah, namun kondisinya tidak tepat karena kondisi keuangan Negara sedang cekak. “*Timing*-nya kurang tepat ketika rakyat sedang terjepit dengan harga-harga sembako akibat naiknya harga BBM, lalu ada kebijakan ini (memberi uang DP mobil pejabat),” katanya.

Anggota Komisi I DPR ini mengaku banyak mendapat masukan dan sindiran dari rakyat akibat kebijakan pemerintah tersebut. “Ada kader PDIP yang sms saya begini: ‘wah pantasan beras dan gula naik karena BBM naik, dan uang hasil BBM rupanya untuk beli mobil baru Kang Jenderal ya?’”

Terhadap banyaknya kritikan yang muncul dari kader PDIP, Politisi senior PDIP, Pramono Anung mengatakan bahwa hal ini adalah sesuatu yang wajar karena PDIP sudah terbiasa menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan. “Kita ini 10 tahun di luar pemerintahan, kita biasa mengkritisi, mengubah dari kritis ke dalam pemerintahan tidak mudah,” katanya.

Pramono sendiri berharap Presiden Jokowi dapat melihat substansi kritik yang disampaikan kader PDIP. Dia pun menilai salah satu kelemahan kabinet yang dibangun Jokowi adalah munculnya kebiasaan para anggota kabinet meniru-niru gaya Jokowi. Salah satunya, *blusukan*. ■

Moh Sahian



Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kamis (9/4).

# MEGAWATI MURKA JOKOWI DIKEPUNG KELOMPOK OPORTUNIS

**B**ibir yang selalu tersenyum itu tiba-tiba terdiam dan wajahnya sesekali menunduk. Mengenakan jas merah tanpa logo partai, Presiden Joko Widodo berbaur dengan ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pembukaan Kongres IV PDI-P di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis, 9 April 2015.

Ekspresi wajah Jokowi yang tidak biasa itu sudah cukup untuk menggambarkan betapa dia terperangah mendengar pidato Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Pidato itu penuh dengan peringatan bernada marah, dan ini untuk pertamakali Megawati menyampaikan pidato keras secara terbuka kepada Jokowi di depan ribuan kader partai dari seluruh Indonesia.

Kali ini Megawati benar-benar mencurahkan murkanya kepada Jokowi selaku kader partai yang sukses diantar untuk duduk di kursi Presiden. Selain kurang peka terhadap keinginan partai, Jokowi pun disindir tidak menjalankan janji Nawa Cita atau garis besar haluan untuk mewujudkan perubahan negara.

Dengan nada tinggi, Megawati menyindir Jokowi jangan malas

bekerja mewujudkan kedaulatan negara, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus berdiri sejajar dengan Negara mana pun ketika membuat kerjasama. Bahkan Mega meminta agar mantan Walikota Solo itu konsisten menjalankan revolusi mental yang sudah dijanjikan semasa kampanye.

"*Nation building* membutuhkan bantuannya Revolusi Mental! Karena itu adakanlah Revolusi Mental! Bangkitlah! Ya, Bangkitlah, bangkit dan geraklah ke arah pemulihan jiwa. Bangkit dan bergeraklah kembali ke cita-cita nasional," demikian petikan pidato Megawati.

Pidato keras Megawati ini bukanlah *ujuk-ujuk*. Ada rangkaian proses kekecewaan dan kurang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi selama hampir enam bulan menjabat Presiden. Megawati sebagai ketua umum partai merasa 'ditinggalkan' oleh Jokowi dalam berbagai kebijakan yang diambil. Hal ini tertangkap dari pernyataannya yang menyebut konsultasi dengan partai politik bukan hal tabu karena dilakukan semua presiden di dunia sebelum membuat keputusan.

"Ini kelihatannya kok partai politik itu tidak harus bisa memberikan masukan kepada pemerintah, padahal kalau kita lihat

di mana saja di dunia partai memberi masukan pada Presiden," ujar Megawati.

Dia menyontohkan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang selalu berkonsultasi dengan partai Demokrat ketika akan mengambil kebijakan. Begitu juga Tiongkok yang hanya memiliki satu partai, namun presidennya selalu berkonsultasi sebelum bertindak.

Megawati juga secara jelas mengkritik adanya pihak-pihak yang masuk dalam pemerintahan dengan sebutan "penumpang gelap." "Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan saudara-saudara," tegasnya.

Kelompok ini oleh Mega disebut ingin menguasai sektor Migas dan BUMN yang ada di Indonesia melalui pemerintahan Jokowi-JK. "Guna mencegah hal tersebut, saya menyerukan agar Indonesia harus benar-benar tangguh di dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang, yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir. Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, Kontrak Merah Putih ditegakkan. Demikian pula, Badan Usaha Milik Negara harus diperkuat, dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," ujarnya.

Mega juga mengingatkan Jokowi agar tidak lupa dengan partai pengusungnya. Ungkapan ini memang kerap dilontarkan oleh internal PDI-P dalam sejumlah kesempatan. Presiden Jokowi dinilai sering mengabaikan saran dari partai pendukung bahkan lebih mengikuti suara dari kelompok non parpol.

Secara khusus Mega menginggung tentang gerakan kelompok non parpol ini yang terus membentuk wacana deparpolisasi. "Sentimen anti partai pun, makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik. Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana, ada simbiosis kekuatan anti Partai dan kekuatan modal,

yang berhadapan dengan gerakan berdikari," ujarnya.

Siapa kelompok yang dimaksud oleh Megawati sebenarnya sempat disebut oleh politisi PDI-P Effendy Simbolon. Mereka adalah kelompok non partai yang menguasai sektor penting di kabinet Jokowi. Sebut saja Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto. Kelompok ini juga disebut oleh politisi PDI-P Masington Pasaribu sebagai "tiga brutus".

Kekuatan kelompok non parpol ini semakin nyata dengan ditunjuknya Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Luhut lantas menunjuk sejumlah

figur pejabat negara, salah satunya menolak untuk mengangkat Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri.

Jokowi sendiri tidak mendapat kesempatan bicara dalam Kongres ini. Dia benar-benar harus melepas jabatan sebagai Presiden selama ada dalam area kongres. Pamor dan aura Jokowi sebagai Presiden memang tidak terasa dalam Kongres ini. Bahkan Ketua Panitia Kongres I Wayan Koster tidak menyebut nama Presiden Jokowi melainkan hanya nama Jokowi saat membacakan laporan panitia pelaksana kongres.

Di luar area kongres, Jokowi tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala Negara seperti biasa. Dalam beberapa kesempatan,

### Akar Rumput PDI-P Solid

Suasana riuh tiba-tiba lengang begitu terpekik suara Merdeka! Merdeka! dari depan mimbar. Suara itu memang tak asing bagi kader PDI-P, namun kali ini mendapat perhatian penuh karena dipekkikan oleh Megawati. Kali ini dia akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ketua umum periode 2010-2015.

Tak ada satu pun kader partai yang menolak laporan pertanggungjawaban Megawati itu. Bahkan acara langsung dilanjutkan dengan pengukuhan putri Proklamator Kemerdekaan Soekarno ini sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.



orang sebagai Deputi dari kelompok yang sama. Megawati menyebutnya sebagai kaum oportunistis. "Mereka adalah kaum oportunistis. Mereka tidak mau bekerja keras membangun Partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan saudara-saudara," tegasnya.

Kuatnya pengaruh kelompok oportunistis ini memang membuat komunikasi antara Megawati dengan Jokowi cukup lama renggang, karena dia tidak lagi menjalankan kebiasaan mampir kekediaman Megawati di jalan Teuku Umar, Jakarta. Bahkan bekas Gubernur DKI Jakarta ini kerap tidak mengikuti arahan Megawati dalam memilih

dia bahkan menyampaikan tentang pentingnya evaluasi terhadap kabinet bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan *reshuffle*. Pernyataan ini disampaikan di Bandara Internasional Lombok, NTB.

Masalah evaluasi kabinet juga sempat disampaikan Jokowi saat bertemu elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun saat bertemu pimpinan DPR. Hasil evaluasi itu, kata Jokowi, akan disampaikan kepada masyarakat. "Kabinet selalu kita evaluasi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, terus dievaluasi. Nanti suatu saat akan kita umumkan," kata Jokowi seraya mengelak menyebut tentang *reshuffle* kabinet.

"Satu hal yang baik dalam proses di PDIP mulai dari anak ranting (kecamatan) sampai di atas, prosesnya dilakukan secara musyawarah mufakat tanpa ada *voting*," ujar Megawati.

Terkait regenerasi partai, hampir semua kader mempercayakan keputusan pada Megawati. Regenerasi itu akan mengikuti arus suara dari bawah namun keputusannya diambil dengan sistem musyawarah mufakat. "Ini mekanisme partai kami yang harus dipahami. Kita memulai dari bawah lalu ke atas. Demikian pun dalam regenerasi dilakukan dari suara arus bawah," kata Ketua DPP PDIP Trimedia Panjaitan. ■



RUU Jasa Konstruksi

## Mempertegas Kehadiran Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur

Setelah terkatung-katung tanpa kepastian, Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi inisiatif DPR akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. RUU Jasa Konstruksi menjadi bagian dari 37 RUU yang disepakati DPR dalam Sidang Paripurna ke-18.

Masuknya RUU Jasa Konstruksi didasari kejadian demi kejadian rusaknya bangunan atau konstruksi di berbagai daerah di Indonesia. Dari program pembangunan infrastruktur seperti pekerjaan konstruksi berupa pembangunan gedung, jalan, jembatan hingga pembangunan irigasi dan fasilitas negara lainnya.

Padahal, bangunan tersebut diketahui belum lama diselesaikan pembangunannya. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengawasan negara terhadap pekerjaan jasa konstruksi. Contoh dari kejadian ini jamak terjadi di berbagai daerah. Beberapa diantaranya bahkan masuk dan diproses secara hukum karena merugikan negara.

Kenyataan bahwa penanggungjawab proyek atau kontraktor acap menutup informasi dari kegagalan juga mendapatkan perhatian. Kenapa bangunan mengalami kerusakan meski belum lama diselesaikan pekerjaannya ditangan penanggungjawab proyek.

Berikut kategorisasi gagalnya pekerjaan konstruksi atau bangunan yang perlu diperjelas. Di sini, ahli konstruksi perlu memainkan perannya dengan baik yang diatur sedemikian rupa oleh negara.

RUU Jasa Konstruksi sekaligus

menjadi pertaruhan negara. Hal ini karena jasa konstruksi memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional. Hasil dari pekerjaannya bukan semata bangunan atau bentuk fisik bangunan, akan tetapi turut menentukan kemajuan dibidang ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said, posisi strategis tersebut juga dapat dilihat dari keterkaitannya dengan sektor lain. Jasa konstruksi adalah salah satu mata rantai penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Soal kontribusi terhadap PDB, M. Said menekankan pentingnya jasa konstruksi untuk menjadi motor penggerak pembangunan. Menurut data BPS, kontribusi sektor jasa konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp660.89 triliun. Ini menempati peringkat kelima jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Anggota Komisi V DPR, Rendy Lamajido dalam diskusi 'Revisi UU Jasa Konstruksi' di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (31/3), mengatakan, dalam proses pembahasan pihaknya akan meminimalisir masuknya kepentingan politik dan atau permainan proyek infrastruktur.

Kepentingan politik dalam pembangunan infrastruktur tersebut selama ini dikeluhkan masyarakat. Karena itu ke depan, pemenang tender harus bertanggungjawab apabila dikemudian hari diketahui pekerjaannya mengalami

kerusakan atau kegagalan. Tidak ada alasan karena adanya kongkalikong dari kepentingan politik tertentu.

"Pada prinsipnya UU konstruksi itu meliputi tiga hal, yaitu kemandirian, independensi dan profesionalisme. Kita berharap putra-putri Indonesia bangkit menjadi kontraktor yang hebat agar tidak dikuasai oleh asing. Yang terpenting lagi tidak berbaur dengan politik dan pemerintah harus ikut bertanggungjawab," tegas Rendy.

Rendy yang juga Ketua Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) itu berkeyakinan demikian karena melalui RUU Jasa Konstruksi nantinya dibahas mengenai pembentukan lembaga arbitrase, akreditasi, lembaga pengawas, penyedia jasa dan pengguna jasa. Keberadaan lembaga ini akan mengontrol dengan baik setiap tahapan jasa konstruksi yang dilaksanakan kontraktor.

Dari aspek hukum, pihaknya juga akan melengkapi sanksi tegas bagi kontraktor yang tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Aspek standar keselamatan demikian ditekankan karena hasil dari pekerjaan jasa konstruksi berdampak pada keselamatan masyarakat.

"Kita sudah banyak lihat contohnya. Mulai dari runtuhnya jembatan di Kutai Kartanegara, robohnya hanggar bandara Makassar yang memakan korban jiwa, hingga mal yang runtuh di Medan. Ini semua terkait dengan perencanaan, konstruksi," tambah anggota Komisi V Jazilul Fawaid.

Untuk meminimalisir kejadian itu, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI itu menyatakan perlunya sanksi tegas bagi kontraktor. Terutama bagi mereka yang melakukan pekerjaan jasa konstruksi tidak profesional dan tidak bertanggungjawab.

Namun semangat RUU ini sebenarnya adalah memberikan perlindungan juga terhadap masyarakat jasa konstruksi.

"Baik pelaku usaha maupun tenaga kerja konstruksi didalam negeri dengan memberikan batasan dan persyaratan yang lebih selektif terhadap badan usaha asing maupun tenaga ahli asing yang ingin mengerjakan pekerjaan konstruksi di Indonesia," tambah anggota Komisi V DPR RI dari PDIP Lasarus. Soemitro

# LULUSAN HARVARD MEMBIUS ISTANA

**S**osok Akbar Faisal seketika mencuat, setelah terlupakan pasca-pembubaran tim transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di penghujung 2014 silam. Politikus NasDem ini bersuara nyaring terhadap kebijakan merekrut alumni Harvard University, Amerika Serikat ke dalam gerbong Staf Kantor Kepresidenan pimpinan Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut memang menyatakan akan merekrut enam lulusan Harvard ke dalam Istana. Perekrutan mereka menjadi kelanjutan dari pelantikan lima deputy istana kepresidenan yang juga lulusan luar negeri. Bahkan mereka sangat kental dengan gaya diplomat asing dan dekat dengan gedung putih.

“Karena kami mencari orang-orang



Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Panjaitan berjalan meninggalkan Kantor Kepresidenan usai diterima Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (31/3).

baik. Sekarang ada anak-anak muda dari Harvard yang mau selesai. Enam anak Indonesia itu mau masuk di kami (staf kantor kepresidenan),” kata Luhut di Auditorium Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, beberapa saat setelah pelantikan lima deputy staf kepresidenan, awal April 2015.

Perekrutan staf kepresidenan dari universitas luar negeri itu tentunya dapat menentukan arah kebijakan pemerintah. Merekalah yang akan menjadi pembisik Presiden Jokowi sebelum membuat keputusan. “Staf itu tidak mengeksekusi. Tapi Bapak Presiden punya staf yang tangguh untuk membuat keputusan,” jelasnya.

Meski punya kompetensi, perekrutan para alumni Harvard ke Istana Negara menjadi sangat sensitif mengingat banyak kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang nyatanya pro terhadap kepentingan asing. Liberalisasi pengelolaan komoditas strategis nasional, terutama sektor energi sudah menjadi fakta telanjang. Dengan masuknya lulusan Harvard ke Istana, bukan tidak mungkin upaya membisikkan kebijakan pro

## DEPUTI STAF ISTANA KEPRESIDENAN

- **Darmawan Prasodjo (Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi)**

Darmawan merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan memperoleh *magna cum laude* gelar doktor dari Duke University, Amerika Serikat, di bidang ekonomi energi. Sosok yang gagal lolos ke senayan dalam Pemilu 2014 bersama PDIP ini juga pernah bekerja di Gedung Putih. Bahkan dia sempat bekerja di kantor Senator (John) Kerry. “Ini (Darmawan) *rising star* anak muda,” kata Luhut

- **Yanuar Nugroho (Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas)**

Yanuar Nugroho dinilai sangat ahli dalam bidang ekonomi inovasi. Dia saat ini tercatat sebagai Professor di University of Manchester, Inggris.

Yanuar juga pernah bekerja di Uni Eropa dan ikut menyusun tentang program-program Uni Eropa. Yanuar diproyeksikan ikut membantu Jokowi dalam menyusun program di Bappenas.

- **Purbaya Yudhi Sadewa (Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis)**

Purbaya Yudhi Sadewa adalah lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan memperoleh gelar doktor di Purdue University, Amerika Serikat. Dia adalah pejabat Direktur di PT Danareksa. “Saya bawa mereka ke Amerika di berbagai tempat dan bertemu dengan banyak pihak. Mereka semua apresiasi dengan kelebihan tiga orang ini,” kata Luhut memperkenalkan Purbaya.

- **Eko Sulistyono (Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi)**

Eko Sulistyono adalah orang kepercayaan Jokowi. Dia setia membantu kegiatan Jokowi dari ketika Presiden berkegiatan di Solo sampai saat ini.

- **Brigjen Andogo Wiradi (Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis)**

Andogo Wiradi dikenal sebagai jenderal yang dekat dengan Luhut di Kopassus dan lama di DOM (Daerah Operasi Militer) Timtim, Aceh, Papua. Dia pernah menjabat Kepala Staf Daerah Militer I/Bukit Barisan. “Dia (Andogo) bisa jadi tim yang sangat bagus,” ucap Luhut.



asing semakin mudah dilakukan. Luhut Panjaitan sendiri adalah bekas Duta Besar RI untuk Singapura.

Luhut sendiri mengelak disebut sebagai sosok yang mengutamakan lulusan luar negeri. Lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1970 ini juga menampik disebut mengangung-agungkan alumni universitas Harvard. Dia bahkan berjanji akan memberi peluang sama bagi sifur lulusan universitas dalam negeri.

“Lulusan dari UGM, ITB, UI, dan beberapa universitas lain yang IPK-nya bagus-bagus, kalau lulus tes, juga kami pekerjakan nanti,” kata Luhut.

Celoteh Akbar Faisal di media sendiri banyak yang menilai hanya bagian dari kekecewaan pribadi. (tulisan akbar dalam grafis). Maklum, Akbar termasuk dalam anggota tim transisi yang membahas arah pemerintahan Jokowi-JK usai memenangkan Pilpres. Akbar lantas mencurahkan isi hatinya kepada Yanuar Nugroho salah satu Deputi pembantu Luhut ini terkait rencana pengangkatan beberapa alumnus Universitas Harvard untuk mengisi posisi di Kantor Staf Kepresidenan.

Langkah Luhut mengangkat lulusan Harvard sebenarnya tidak mengejutkan. Sehari sebelum menerima mandat sebagai Kepala Staf Kepresidenan ia terbang ke Amerika. Informasi yang dihimpun Aktual.co menyebutkan mantan Komandan Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus, tersebut bertemu dengan sejumlah senator membahas arah politik internasional pemerintahan Jokowi.

Luhut memang salah satu strategi pemerintahan Jokowi. Politik internasional Jokowi yang lebih condong ke Tiongkok berusaha diimbangi dengan hadirnya Luhut di tengah kabinet. Sebagai jenderal Koppasus Luhut memang tidak asing dengan Washington. Ia pernah menempuh pendidikan di Public Administration, George Wasington University. Ia juga sempat dididik di Nasional Defense University sebagai seorang perwira tinggi. ■

## Surat Curhat Akbar Faisal

Saya sebenarnya pernah ingin mempersoalkan lembaga bernama Kastaf (Kepala Staf Kepresidenan) ini, sebab sejujurnya tak ada dalam perencanaan kami di Tim Transisi dulu. Sekadar menginfokan ke Anda Mas, bahwa Tim Transisi itu dibentuk Pak Jokowi untuk merancang pemerintahan yang akan dipimpinnya.

Tapi saya sungguh tak nyaman mempersoalkan itu sebab akan dituding macam-macam. Misalnya, “Akh... itu karena AF (Akbar Faisal) kecewa tidak jadi menteri dan lain-lain.”

Padaahal masih banyak lagi sebenarnya yang ingin saya pertanyakan, termasuk surat Presiden ke DPR tentang Komjen Budi Gunawan yang disusul kontroversi lainnya.

Ke mana para pemikir tata negara di sekitar Pak Jokowi sekarang? Yang kudengar selanjutnya malah pengangkatan Refly Harun sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Mungkin Bu Rini anggap Refly sangat paham soal tol karena setiap hari melalui macetnya –persoalan yang Pak Jokowi katakan dulu akan lebih mudah menyelesaikannya sebagai presiden ketimbang Gubernur DKI– dari rumahnya (Refly) di Buaran sana.

Mas Yanuar, sebagai anggota DPR pendukung pemerintah dan Insyah Allah punya peran (meski sangat kecil) terhadap kemenangan Jokowi-JK, saya ingin kalian di Istana fokus pada tugas yang lebih membumi.

Misalnya, jangan biarkan kami di DPR dihajar bagai *sandsack* (karung latihan tinju) oleh orang-orang Prabowo dalam kasus kebaikan tunjangan mobil pejabat, hanya karena kalian tak mampu berkomunikasi dengan kami di DPR (atau parpol pendukung).

Ini juga satu soal sendiri karena terbaca dengan kuat kalau kalian di *ring 1* Presiden kini sukses melakukan deparpolisasi dan atau gagal meyakinkan publik akan seluruh keputusan-keputusan presiden/pemerintah.

Soal sesepele ini tak perlu kualitas Harvard. Saya merasa mengenal beberapa orang di Istana Negara tempat Anda berkantor sekarang (yang bisa menangani), entah apa mereka masih mengenal saya sekarang. Tapi saya nggak memikirkannya.

Saya hanya minta kalian di sana berhenti melakukan hal yang tak perlu seperti deklarasi soal Harvard yang akan masuk Istana itu.

Sekali lagi, saya sebenarnya tak perlu menulis panjang lebar seperti ini hanya untuk menanggapi soal Harvard ini. Tapi saya harus lakukan karena menurutku kalian makin jauh dari seluruh rencana awal kita. Dan sayangnya, seluruh rencana awal itu saya pahami dan terlibat di dalamnya.

Saya sekuat mungkin berusaha menghindari kalimat-kalimat keras untuk memahami apa yang kalian lakukan di sana. Tapi sepak terjang kantor Mas Yanuar bernama Kastaf Kepresidenan itu makin jauh.

Terakhir, saya sarankan agar menahan diri dalam memberikan masukan ke Presiden. Jangan racuni pikiran Presiden yang polos ini dengan permainan yang dulu kami hindarkan beliau lakukan meski kadang gregetan lihat langkah-langkah tim Prahara.

Terkhusus dengan Pak Justuf Kalla, saya minta kalian berikan rasa hormat.

Tanggal 9 Juli lalu, 53 persen penduduk Indonesia memilih Jokowi-JK dan bukan Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan. Apalagi Anda-Anda yang bergabung belakangan.

Selamat berakhir pekan. ■

Moh Sahian

# HIDUPKAN KEMBALI RUH POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF



**18** April 1955, 60 tahun yang lalu, Indonesia pernah menciptakan sebuah mahakarya di forum internasional. Hajatan besar bangsa itu bernama Konferensi Asia-Afrika(KAA). Inilah sebuah fakta sejarah yang sudah semestinya diketahui oleh generasi muda.

Sejarah ini kembali dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Mega bahkan mengulas KAA dalam pidato pembukaan Kongres PDI-P di Sanur Bali 9 April lalu.

Dengan berapi-api Megawati menyebut KAA sebagai arah

Indonesia lepas dari ombang-ambing dua kekuatan dunia. Konferensi menghasilkan kesepakatan Dasasila Bandung yang membangunkan kesadaran baru bagi bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka.

Namun, negara-negara yang baru merdeka tersebut, pada waktu itu dihadapkan pada tantangan baru, berupa rivalitas dua blok besar, yakni Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia pun kembali menjadi pelopor Gerakan Non Blok,” ujarnya lantang.

Jika kita menelisik kembali sejarah singkat Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 18

hingga 24 April 1955, peran yang dimainkan Indonesia cukup besar sejak tahap perencanaan hingga konferensi berskala internasional tersebut terselenggara dengan sukses dan gilang gemilang.

Sejak Bung Hatta, selaku Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang Bebas dan Aktif pada 1948, maka sejak saat itu Indonesia punya haluan yang jelas dan tegas dalam ikut mewarnai perkembangan dunia internasional dan bebas dari kendali dan arahan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, pada satu pihak, dan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, pada pihak lain, dua kutub bertentangan yang terlibat dalam Perang Dingin ketika itu.

Dengan demikian, Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif, berarti bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok dari dua kutub yang sedang bertikai dalam Perang Dingin ketika itu, seraya pada saat yang sama bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu.

Bebas juga bisa diartikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara

**Konferensi Asia Afrika.** Presiden Indonesia, Soekarno, mengucapkan pidato pembukaan yang berjudul "Let a New Asia And a New Africa be Born", di gedung Merdeka, Bandung (18/4/1955).

sendiri dalam menanggapi masalah internasional yang sedang terjadi. Selain itu, Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Aktif berarti mengandung unsur "kreativitas", yang tumbuh bebas dari arahan ataupun tekanan-tekanan dari pihak asing.

Hal ini semakin diperkuat oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam keterangannya di depan Sidang DPRS pada 25 Agustus 1953, yang menegaskan bahwa semenjak berdirinya Republik Indonesia, negara kita menjalankan politik luar negeri yang Bebas dan Aktif, berdasarkan kepentingan rakyat

menuju ke arah perdamaian dunia. Selanjutnya Ali Sastroamidjojo menambahkan: “Sungguh politiknya Bebas dan Aktif itu adalah politik yang biasa untuk tiap-tiap negara yang ingin menegaskan kedaulatannya.”

Frase “Politik Bebas dan Aktif berdasarkan kepentingan rakyat menuju ke arah perdamaian dunia”, nampaknya dijabarkan secara sungguh-sungguh oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang kemudian bermuara pada terselenggaranya KAA pada April 1955. Namun, ada baiknya kita telisik sejenak peristiwa bersejarah pada April 1954, sekitar setahun sebelum berlangsungnya Konferensi AA.

### **Pertemuan Colombo, Cikal Bakal KAA**

Sebagaimana penuturan Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri RI ketika KAA berlangsung dalam memoarnya bertajuk “Tonggak-Tonggak di Perjalananku”, pada awal 1954 ketika sedang genting-gentingnya ketegangan di Indo Cina, Ali Sastro menerima surat dari Perdana Menteri Sri Langka Sir John Kotelawala, yang bermaksud mengundang Perdana Menteri Indonesia untuk turut serta di dalam suatu konferensi antara Lima Perdana Menteri, yaitu Sri Langka, Birma, India, Indonesia dan Pakistan, yang akan diadakan di Colombo dalam bulan April 1954.

Konferensi itu menurut surat John Kotelawala akan bersifat informal. Bagi Ali Sastro, meski dipandang aneh karena menggunakan istilah pertemuan informal, namun undangan Sir Kotelawala dipandang sebagai kesempatan baik untuk dipergunakan sebagai suatu forum guna mengemukakan apa yang sudah lama menjadi pikiran pemerintah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam keterangan Pemerintah di depan Sidang DPRS 25 Agustus 1953:

“Kerjasama dalam golongan Negara-Negara Asia-Arab (Afrika) kami pandang penting benar, karena

kami yakin, bahwa kerjasama erat antara Negara-Negara tersebut tentulah memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia yang kekal. Kerjasama antara Negara-Negara Asia-Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan aturan-aturan PBB yang mengenai kerjasama kedaerahan (Regional Arrangements).

Selain dari itu Negara-Negara itu pada umumnya memang mempunyai pendirian yang sama dalam beberapa soal di lapangan internasional, jadi mempunyai dasar sama (common ground) untuk mengadakan golongan yang khusus. Dari sebab itu, kerjasama tersebut akan kamu lanjutkan dan dipererat.”

Demikian arah kebijakan strategis Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif mulai dijabarkan secara lebih imajinatif di era pemerintahan Ali Sastroamidjojo.

Maka Perdana Menteri Ali Sastro kemudian melihat adanya momentum pertemuan Colombo untuk menjabarkan sebuah format yang lebih pas dan efektif dalam rangka mempererat kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika. Dalam benak Ali Sastro, pertemuan 5 Perdana Menteri di Colombo itu, bisa menjadi sarana bagi Indonesia untuk secara aktif memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Negara-negara Asia-Afrika, untuk mewujudkan politik pemerintah tentang kerjasama di bidang politik internasional dengan negara-negara tersebut.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Perdana Menteri Ali Sastro menerima undangan Perdana Menteri Sri Langka Sir John Kotelawala. Jika kita membuka kembali beberapa dokumen lama terkait persiapan pemerintah Indonesia untuk menghadiri Konferensi di Colombo tersebut, terungkap bahwa gagasan untuk memprakarsai pertemuan Asia-Afrika berdasarkan model KAA, sudah ada dibenak Perdana Menteri Ali Sastro maupun Menteri Luar Negeri Mr Sunarjo.

Sesaat sebelum delegasi RI yang dipimpin Perdana Menteri Ali Sastro berangkat ke pertemuan Colombo pada 26 April 1954, Perdana Menteri Ali Sastro mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

“Saya mengusulkan untuk membicarakan kemungkinan mengadakan suatu konferensi yang lebih luas antara negara-negara Asia-Afrika dan mudah-mudahan usul saya itu akan berhasil. Saya pergi ke Konferensi Colombo dengan penuh harapan, karena kalau pada permulaannya dunia tidak memberi arti kepada Konferensi Colombo ini, maka sekarang dengan adanya perkembangan di dunia internasional, rupa-rupanya suara kita dari Colombo akan mendapat perhatian juga. Dalam pada itu saya dapat menerangkan dengan tegas, bahwa saya pergi ke Colombo dengan membawa pegangan teguh bagi Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas yang aktif dan bersandarkan atas kepentingan rakyat.”

Jelaslah sudah bahwa Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif merupakan dasar satu-satunya yang secara konkret bisa dijadikan landasan untuk bermain catur politik di dalam konferensi itu. Kira-kira begitulah ada dalam benak Perdana Menteri Ali Sastro dan para anggota delegasi RI pada Konferensi Colombo.

Adapun delegasi RI yang dipimpin oleh Ali Sastro terdiri dari: Mr Achmad Subardjo sebagai penasehat, Ir Juanda (Direktur Biro Perancangan Nasional), juga sebagai penasehat, JD de Fretes, Kuasa Usaha ad interim RI di Colombo, dan M. Maramis, sebagai anggota. Sedangkan selain Indonesia, dari India hadir Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Pakistan Mohammad Ali, dan Perdana Menteri Birma U Nu.

Sesuai dengan tema sentral konferensi yang membahas perang dingin, hampir semua negara peserta umumnya fokus pada soal Indo Cina dan peran Konferensi Jenewa yang merupakan kelanjutan dari perkembangan perang dingin

di Asia. Dan pentingnya isu Indo Cina bagi negara-negara Asia untuk dijadikan agenda utama pembahasa di Konferensi Colombo.

Perdana Menteri Ali Sastro ketika mendapat giliran berpidato mengangkat satu tema yang kita pandang sebagai sebuah terobosan baru, dengan memberi perspektif baru dari konflik di Indo Cina, yaitu bahaya timbulnya kembali lagi kolonialisme dalam bentuk yang lama maupun yang baru.

“Dimanakah kita bangsa-bangsa Asia berdiri sekarang? Apakah kita akan mau diseret di dalam persengketaan ini yang sebetulnya dilakukan untuk merebut kekuasaan? Kita sekarang sudah sungguh-sungguh berada di persimpangan jalan sejarah umat manusia.”

Lontaran pertanyaan strategis Perdana Menteri Ali Sastro inilah, kemudian Indonesia mengusulkan diadakannya suatu konferensi lain yang berskala lebih luas, atas dasar pertimbangan bahwa masalah-masalah Asia tidak dihadapi oleh bangsa-bangsa Asia saja, melainkan juga bangsa-bangsa Afrika juga.

Sambutan para peserta Konferensi Colombo memang disambut baik namun tidak cukup antusias. Mungkin gagasan Perdana Menteri Ali dipandang terlalu utopis dan ambisius. Perdana Menteri Nehru, misalnya, memang setuju dengan usulan Indonesia, namun Nehru meramalkan bahwa di dalam pelaksanaannya gagasan tersebut banyak kesulitan akan dihadapi. Sebab tentulah ada bahaya bahwa akan terdapat banyak perbedaan pendapat antara negara-negara peserta, sehingga akan sangat sukar untuk mencapai persetujuan tentang hal-hal yang akan dibicarakan. Belum lagi, negara-negara manakah yang akan diundang menghadiri konferensi yang demikian itu. Apakah negara-negara Afrika yang masih dijajah akan diundang juga?

Atau terkait dengan konflik di Indo Cina, pemerintah manakah yang akan diundang, dari Vietminh atau dari Vietnam? Maka itu,



Inen Rusnan (78) fotografer Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 memerlihatkan foto peristiwa KAA di Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/3).

Nehru meski mendukung gagasan Ali Sastro dan delegasi RI, namun menggarisbawahi perlunya persiapan diadakan pada tingkat resmi. Sambutan dari para perdana menteri lain, meski tidak begitu terperinci, umumnya setuju usulan Indonesia, namun tidak begitu antusias.

Akhirnya, atas saran Nehru, konferensi menyetujui untuk memberikan dukungan moral sepenuhnya kepada Indonesia atas prakarsanya tentang KAA itu. Maka di dalam pasal 14 Komunike terakhir disebutkan: Para Perdana Menteri membicarakan tentang baiknya mengadakan suatu konferensi negara-negara Afro-Asia dan menyokong usul supaya Perdana Menteri Indonesia mungkin dapat menjajaki kemungkinan diadakannya konferensi demikian itu.

Pernyataan tersebut dengan terang-benderang menggambarkan pendirian keempat Perdana Menteri tentang usul itu. Susunan kalimat di dalam bahasa diplomatik ini bermaksud mengatakan bahwa sebetulnya keempat Perdana Menteri tidak yakin konferensi Afro-Asia yang diusulkan oleh Indonesia akan bisa diselenggarakan.

Dalam tafsiran Ali Sastro ketika itu, rumusan pernyataan tersebut sejatinya hanya untuk tidak menyinggung perasaan hati pihak Indonesia sebagai pengusul. Sehingga mereka menyokong gagasan Indonesia, namun menyerahkan kepada Indonesia untuk menyelidiki

lebih dulu sampai berapa jauh ada kemungkinan untuk mengadakan konferensi tersebut.

Nampaknya keempat Perdana Menteri tidak begitu yakin Indonesia akan sanggup untuk mewujudkan gagasan yang diajukan oleh Perdana Menteri Ali Sastro. Mengingat pada era 1950-an kondisi perekonomian Indonesia belum cukup sehat. Sedangkan situasi keamanan dipandang belum cukup tentram dan stabil. Kalau dipikir-pikir, wajar juga keraguan mereka tersebut mengingat KAA boleh dibilang merupakan konferensi berskala internasional yang cukup besar.

### KAA Sebagai Embrio “Kekuatan Ketiga”

Begitupun, Konferensi Colombo merupakan landasan yang dijadikan Indonesia sebagai titik awal persiapan KAA. Setelah Indonesia ditetapkan sebagai Tuan Rumah KAA, maka kemudian diputuskan agar sebelum KAA diselenggarakan, perlu diadakan pertemuan persiapan di Bogor pada 28-31 Desember 1954.

Konferensi ini dihadiri oleh wakil dari lima negara yang hadir pada Konferensi Colombo sebelumnya, dan dalam pertemuan ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- KAA diselenggarakan di Bandung

- pada tanggal 18-24 April 1955.
- b. Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor.
  - c. Menetapkan 25 negara Asia-Afrika yang akan diundang.
  - d. Menentukan empat tujuan pokok KAA berikut ini:
    - Memajukan kerja sama antar bangsa Asia-Afrika demi kepentingan bersama
    - Membahas dan meninjau persoalan ekonomi, sosial, dan budaya
    - Membahas dan berusaha mencari penyelesaian masalah kedaulatan nasionalisme, rasialisme, dan kolonialisme

Begitulah. Yang semula gagasan Indonesia dianggap utopis dan terlalu muluk, akhirnya KAA bisa diselenggarakan pada 18 April hingga 24 April 1955, di Bandung, Jawa Barat. Konferensi ini dihadiri oleh 23 negara Asia dan 6 negara Afrika.

Dari Asia adalah Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Cina, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Nepal, Afghanistan, Iran, Irak, Yordania, Turki, Syria, Saudi Arabia dan Yaman. Adapun negara-negara dari benua Afrika adalah Mesir, Ethiopia, Libya, Sudan, Liberia dan Pantai Emas (sekarang Ghana).

Akhirnya penyelenggaraan KAA berjalan sukses sesuai harapan Indonesia, dan Bung Karno pada umumnya. KAA menjadi pusat perhatian dunia saat itu. Indonesia pun tidak lepas dari perhatian dunia karena menjadi tuan rumah.

Konferensi Asia Afrika menghasilkan beberapa keputusan penting. Beberapa keputusan penting tersebut sebagai berikut :

- a. Memajukan kerja sama antarbangsa di kawasan Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan
- b. Menyerukan kemerdekaan Aljazair, Tunisia, dan Maroko dari penjajahan Prancis
- c. Menuntut pengembalian Irian Barat (sekarang Papua) ke Perda

- d. Indonesia dari Aden kepada Yaman
- d. Menentang diskriminasi dan kolonialisme
- e. Ikut aktif dalam mengusahakan dan memelihara perdamaian dunia Selain beberapa keputusan penting tersebut. Konferensi Asia Afrika juga mencetuskan Dasasila Bandung atau disebut juga "Bandung Declaration".

### **Kolonialisme-Imperialisme Perekat Persatuan Peserta KAA**

Segi menarik yang perlu dipaparkan di sini adalah, keberhasilan Indonesia untuk mengakomodasikan seluruh agenda strategis negara-negara peserta KAA, sehingga kekhawatiran Nehru pada Konferensi Colombo terhadap kemungkinan jalan buntu mencapai kesepakatan, ternyata tidak terjadi sama sekali.

Apa yang menjadi perekat antar negara-negara KAA? Rupanya ada beberapa hal yang menjadi perekat sehingga tercipta ikatan yang solid antar negara-negara peserta KAA:

- a. Persamaan nasib dan sejarah, yaitu bangsa-bangsa di Asia-Afrika terutama pernah mengalami penjajahan.
- b. Kesadaran untuk memperoleh kemerdekaan.
- c. Kecemasan akan persaingan Blok Barat dan Blok Timur.
- d. Perubahan politik pada tahun 1950-an, yaitu berakhirnya Perang Korea (1953). Akibat Perang Korea, semenanjung terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Peristiwa ini semakin menambah ketegangan dunia karena adanya intervensi dari blok yang bersaing.
- e. PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antarnegara yang baru merdeka, tetapi di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antarnegara tersebut.
- f. Persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang.

Adapun penyelenggaraan KAA

mempunyai tujuan berikut:

1. Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antarbangsa Asia-Afrika dan meningkatkan persahabatan.
2. Membicarakan dan mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
3. Menaruh perhatian secara intensif terhadap masalah khusus terkait dengan kedaulatan, kolonialisme, dan Imperialisme.
4. Memerhatikan posisi dan partisipasi Asia-Afrika dan bangsa-bangsa dalam dunia Internasional.

### **KAA Sebagai Langkah Lanjut Menuju Konferensi Gerakan Non-Blok**

Dengan keberhasilan atas prakarsa dan penyelenggaraan KAA pada 18-24 April 1955, maka Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai negara yang memprakarsai Gagasan terbentuknya "Kekuatan Ketiga" sehingga bebas dari pengaruh dan tekanan baik blok barat maupun blok timur. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai negara-negara yang masuk dalam orbit Amerika ataupun Uni Soviet dan Cina.

Prakarsa Indonesia beserta keempat negara lainnya sebagai "the Sponsoring Countries", tidak saja menempatkan Indonesia maupun Bung Karno sebagai kekuatan utama yang memelopori perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika yang masih terjajah, juga mempunyai saham yang kuat untuk memelopori terbentuknya Gerakan Negara-Negara Non-Blok pada skala lintas kawasan, 6 tahun ke kemudian di Beograd, Jugoslavia.

Sebab KAA selain memainkan peran penting dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan mengakhiri penjajahan di seluruh dunia secara damai, khususnya di Asia dan Afrika, pada saat sama memberi inspirasi terhadap terbentuknya "kekuatan ketiga" yang tidak berpihak ke blok barat maupun timur, sehingga mendorong lahirnya Gerakan Nonblok yang didasari tujuan untuk meredakan ketegangan

dunia yang dipicu oleh konflik antara kutub AS dan Sekutu-sekutu baratnya yang berhaluan Kapitalis/Liberal, versus kutub Uni Soviet dan Cina yang berhaluan komunis.

Bedanya, kalau dalam KAA Bung Karno menawarkan tema anti kolonialisme dan imperialisme sebagai dasar persatuan negara-negara peserta KAA, maka dalam Konferensi Non Blok 1961, Bung Karno dan Indonesia menawarkan tema baru: Aspirasi Negara-Negara Berkembang dalam berhadapan dengan Negara-Negara maju. Yang tidak lagi perhadapan antara kutub barat versus timur, melainkan antara Utara dan Selatan.

### Dunia Internasional Terhenyak

Betapa tidak. Indonesia baru menjadi negara merdeka selama 10 tahun, mampu menggelar sebuah konferensi berskala internasional dengan dihadiri oleh bangsa-bangsa dan negeri-negeri merdeka, seperti Ethiopia, Mesir, Thailand, India, Burma, Indonesia dan Jepang; maupun yang masih dalam proses menuju merdeka seperti Ghana dan Vietnam. Bahkan dihadiri pula oleh negeri-negeri yang terikat dengan pakta-pakta Barat seperti SEATO, CENTO dan bahkan NATO.

Bagaimana mungkin negeri-negeri yang begitu beraneka ragam politik luar negeri dan aliansi militernya, bisa berkumpul dan mencapai persetujuan bersama? Apakah mungkin suatu negeri atau kelompok negeri-negeri untuk berdiri sendiri, tidak 'memihak sana' tidak 'memihak sini'?

Bukankah di antara yang hadir di Bandung itu ada yang terikat dengan blok Barat, seperti Filipina dan Thailand yang anggota SEATO, yang dikepalai oleh AS? Bukankah Tiongkok dan Vietnam Utara, adalah bagian dari Blok Timur yang dikepalai oleh Uni Soviet? Bukankah Turki anggota NATO, dan bukankah Irak anggota CENTO (Pakta Organisasi Timur Tengah atau METO, juga dikenal seperti Pakta Baghdad), yang berada dalam kendali

AS? Selain itu terdapat negeri-negeri yang menempuh politik luar negeri yang 'bebas dan aktif', yang sering dikatakan 'netral', tidak memihak sana dan tidak memihak sini, seperti India dan Indonesia?

Namun, para utusan dari negeri-negeri Asia Afrika itu menepis semua keraguan. Mereka bisa berunding, bisa musyawarah dan telah mencapai kata sepakat. Mereka mewakili bangsa-bangsa dan negeri-negeri yang mendambakan kemerdekaan dan kebebasan, kerjasama, kemajuan dan perdamaian dunia. Musuh bersama mereka adalah kolonialisme dalam segala manifestasinya!

(komunis), semakin memanas situasi dunia. Perang Dingin berkembang menjadi perang terbuka, seperti di Jazirah Korea dan Indo-Cina. Perlombaan pengembangan senjata nuklir meningkat. Dengan tak ayal hal itu menumbuhkan ketakutan dunia akan kembali dimulainya Perang Dunia.

Meskipun pada masa itu telah ada badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi menangani masalah dunia, namun pada kenyataannya badan ini tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, sementara akibat yang ditimbulkan



Pekerja menyelesaikan renovasi perbaikan trotoar jalan Gedung Merdeka di jalan Asia - Afrika, Bandung, Jumat (3/4).

Dari KAA tersebut lahir sebuah konsensus. Sebuah rumusan yang secara implisit mengecam Uni Soviet maupun negara-negara barat kala itu. "Kolonialisme dalam segala pernyataannya (*colonialism in all of its manifestations*) harus dikutuk..!".

Memang ketika itu, lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi, dimana Blok Barat yang dikomandoi oleh Amerika Serikat (kapitalis) dan Blok Timur dibawah pimpinan oleh Uni Soviet

oleh masalah-masalah ini sebagian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

### Kesadaran Geopolitik Bung Karno

Di sinilah, pidato Bung Karno pada pembukaan KAA 18 April 1955 telah memberikan sebuah arahan yang jelas:

"Saudara-saudara, betapa dinamisnya zaman kita ini. Saya ingat, bahwa beberapa tahun lalu saya mendapat kesempatan membuat analisa umum tentang kolonialisme. Dan bahwa saya pada waktu itu meminta perhatian pada apa yang saya namakan 'Garis

Hidup Imperialisme.' Garis itu terbentang mulai selat Gibraltar, melalui Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Lautan Hindia, Lautan Tiongkok Selatan (sekarang Laut Cina Selatan) sampai ke Lautan Jepang. Daratan-daratan sebelah-menyebelah garis hidup yang panjang itu sebagian besar adalah tanah jajahan. Rakyatnya tidak merdeka. Hari depannya terabaikan kepada sistem asing. Sepanjang garis hidup itu, sepanjang urat nadi imperialisme itu, dipompakan darah kehidupan kolonialisme."

Melalui petikan pidato pembuka Bung Karno di KAA 1955 tersebut, jelaslah betapa Bung Karno begitu sangat menguasai betul dimensi geopolitik dari kolonialisme dan imperialisme. Pemahaman geopolitik Bung Karno terlihat dalam pidato pembukaan KAA yang mampu menginspirasi para peserta.

Bung Karno secara inspiratif memberi sebuah gambaran nyata sekaligus memetakan akar masalah sesungguhnya konflik global dan betapa pentingnya para pemimpin Asia-Afrika yang hadir di KAA tersebut untuk membangun solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika atas dasar nasib yang sama menjadi sasaran geopolitik negara-negara kolonial atas dasar garis hidup imperialisme yang secara geopolitik digambarkan Bung Karno.

Jelas, kehadiran KAA yang kemudian menjelma menjadi Gerakan Non Blok (GNB) sangat membahayakan eksistensi dua kubu yaitu AS dan Uni Soviet. Keberadaan GNB bukanlah semata gerakan netral blok, akan tetapi merupakan upaya membentuk blok alternatif selain AS dan Uni Soviet. Netral bukanlah tidak berposisi, melainkan sebuah posisi alternatif.

Bung Karno menolak tegas pengaruh kedua negara yang hendak menjadikan Indonesia di bawah kepemimpinannya menjadi 'antek peliharaan' bagi kedua negara terkuat dunia kala itu. Kebijakannya tersebut didukung oleh sikap beraninya dalam menghimpun pemimpin-pemimpin

dunia ketiga untuk menyatakan sikap yang menolak gerakan blok. Inisiatif Bung Karno dalam menolak gerakan blok yang ada ditandai dengan terselenggaranya KAA yang di dalamnya terdapat negara-negara Asia dan juga Afrika yang baru saja merdeka pascaberakhirnya Perang Dunia II.

Dengan begitu, melalui KAA Bung Karno dan Indonesia telah berhasil membuat konsepsi Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif menjadi sesuatu yang nyata dan bisa diterapkan.

### **Melalui KAA, Inspirasi Menggugah Kesadaran Geopolitik Elit Nasional**

Adalah Mantan Menhan Joewono Soedarsono mengibaratkan Indonesia layaknya *open book* bagi kekuatan militer asing yang dapat dengan mudah dipantau kekuatannya oleh Amerika Serikat (AS), Australia, Jepang, Rusia, Cina, bahkan Singapura dan Malaysia. Bahkan menurutnya, hal ini sudah terjadi sejak tahun 1960-an.

Meskipun sudah diingatkan, namun sangat ironis, elit politik di negeri ini memperlihatkan kesadaran geopolitik yang sangat rendah. Dengan berada di posisi silang, letak geopolitik Indonesia seharusnya membuat *bargaining position*-nya menguat, bukannya malah menjadikan Indonesia sebagai "buku terbuka bagi militer asing". Idealnya negara yang dicerminkan oleh kepala negara memiliki visi geopolitik yang dikenal dengan istilah *spatially enabled government*. Kombinasi kesadaran antara dua pihak ini akan mendukung tegaknya sebuah peradaban yang tinggi, yang tentu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ideologinya.

Bahkan mantan Ketua Program Kajian Strategik Ketahanan Nasional UI, Wan Usman, menilai Pemerintah Republik Indonesia dalam banyak hal terus menerus didikte negara lain seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, karena peta kekuatan militer di laut dan udara masih relatif lemah. Menurutnya, era abad ke-21, suka

atau tidak suka, negara yang mampu mendominasi kekuasaan laut dan udara akan mengendalikan dunia, karena berkaitan dengan kemampuan menguasai teknologi, termasuk profesionalisme militer.

Amerika Serikat dengan armada lautnya (kapal selam) gentayangan di mana-mana, menggerayangi lautan Indonesia, dengan gratis. Satelit ruang angkasa yang dikontrolnya telah menguasai informasi di seluruh dunia.

Dalam sebuah diskusi terbatas di Global Future Institute(GFI) beberapa waktu lalu, peneliti senior geopolitik M Arief Pranoto juga mengingatkan, secara geopolisi, meniscayakan republik ini merajut hubungan dengan berbagai negara pada kedua benua tersebut. Tak bisa tidak. Ia akan memegang posisi kunci di antara negara-negara tersebut di satu sisi, namun pada sisi lain, ia bisa saja 'diplokoto' (diperkuda) — mungkin hanya dijadikan *buffer zone* (wilayah penyangga) belaka, atau jangan-jangan cuma sekedar *proxy war* (lapangan tempur) bagi kepentingan negara-negara lain tetapi mengambil lokasi di Bumi Pertiwi.

Silakan pilih mana atau mau jadi apa, maka tergantung geostrategi dan *policy* pemerintah serta bagaimana anak bangsa ini menyikapi secara cerdas takdir geo (politik) posisi tersebut.

Sejatinya penguasaan aspek geopolitik bangsa menjadi visi besar suatu pemerintahan dalam sebuah negara.

Di negara-negara maju, 80% pengambilan kebijakan telah didasarkan kepada informasi geopolitiknya. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang membentang luas, sekitar 8 juta kilometer persegi, dari Sabang hingga Merauke. Indonesia juga memiliki sekitar 17.504 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Indonesia. Oleh karenanya kesadaran geopolitik merupakan keniscayaan bagi para elit politik di negeri ini maupun rakyat Indonesia. ■

Hendrajit



## Lampu Merah KPK Pada Denny Indrayana

**K**asus implementasi *payment gateway* dalam program Sistem Pelayanan Paspor terpadu (SPPT) *online* atau kasus *payment gateway* yang menjerat Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana bermula saat Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) menggelar peninjauan mitra kerja atau yang kerap disebut *beauty contest* untuk proyek *payment gateway* pada 11 Maret 2014, dan keluar sebagai pemenang adalah PT Nusa Inti Artha dan Finnet Telkom Indonesia, keduanya terpilih sebagai penyelenggara *payment gateway*. *Payment gateway* merupakan layanan jasa elektronik penerbitan paspor.

Sistem yang diinisiasi oleh Denny ini sempat dipresentasikan kepada Kementerian Komunikasi

dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bank Indonesia (BI). Dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenkumham itu hadir juga perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu mengutus Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko Marjono.

Denny sebagai tuan rumah meminta seluruh undangan menyampaikan pendapatnya terkait dengan ide proyek *payment gateway*. KPK saat itu sudah memperingatkan Wamenkumham untuk tidak lagi melanjutkan proyek ini. Namun nyatanya proyek tetap berjalan.

Pekan lalu Bareskrim Polri meminta keterangan terhadap

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana akhirnya datang ke Kantor Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Mabes Polri, Jalan. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jum'at (27/3/2015). Kedatangan Denny yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya diperiksa sebagai tersangka korupsi *Payment Gateway*.

Eko. Benar saja hasilnya KPK merekomendasikan proyek ini dihentikan. "Ada rekomendasi KPK kalau proyek ini berisiko hukum," tutur Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Rikwanto, Senin (30/3/2015).

Meskipun diminta untuk dihentikan pada bulan April dan Mei 2014 ditandatangani perjanjian kerjasama dan menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yakni pertama, nilai investasi Rp 8 milyar, Kedua, penyelenggara dalam hal ini PT Nusa Inti Artha dan Finnet Telkom Indonesia diijinkan menarik pungutan Rp 5.000,- per transaksi dan terakhir biaya pembuatan paspor mengendap sehari di rekening penampungan tetapi tidak dikenai bunga.

Kemudian Senin (16/6/2014), Menteri Hukum Dan HAM Amir Syamsudin meminta penjelasan tentang aturan pembebanan biaya tambahan kepada Kementerian Keuangan. Setelah itu, pada Senin (7/7/2014) di *launching* Sistem *payment gateway*.

Selang beberapa hari, Jumat (11/7/2014) keluar larangan dari Kementerian Keuangan terkait penarikan biaya atas setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Agustus 2014 keluar anjuran agar *payment gateway* menggunakan Sistem Simponi. Pascakeluar nya larangan tersebut, Rabu (1/10/2014) Kementerian Keuangan meminta sistem *payment Gateway* dihentikan (15/9/2014) dan Rabu (1/10/2014) program *payment gateway* resmi dihentikan.

Berselang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Selasa (10/2/2015) Andi Syamsu Bahri, aktivis LSM Pijar melaporkan dugaan adanya tindak korupsi pada



program tersebut. Dalam laporan berlabel LP/166/2015/Bareskrim. Denny dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat sebagai Wakil Menkum dan HAM. Hal ini kemudian membuat mantan Wakil MenkumHAM Denny Indrayana pada Selasa (25/3/2015) ditetapkan sebagai tersangka kasus *payment gateway* oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Prof DI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pelaksanaan *Payment Gateway* di Kemenkum HAM 2014," cetus Kabagpenum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto Rikwanto, Selasa (24/3).

Pada kasus ini setelah sistem *payment gateway* berjalan, total penerimaan negara Rp 32,4 miliar, sementara itu PT Nusa Inti Artha dan Finnet Telkom Indonesia kebagian upah total sebesar Rp 605, 8 juta.

Kasus ini pun bergulir kencang, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan menyatakan dari hasil penyidikan diketahui Denny telah menguntungkan *vendor* yang menampung pungutan dalam program *payment gateway* senilai Rp 605 miliar, kedua *vendor* itu adalah PT Nusa Inti Artha dan Finnet Telkom Indonesia.

Uang tersebut, kata Anton, ditampung di rekening yang juga menampung dana PNBPN sebesar Rp 32.693.095.

"Menampungkan tidak boleh. Bagaimana kalau mengendap sebulan, bunganya bisa berapa," tegas Anton, Rabu (25/3).

Lebih lanjut Anton mengatakan hingga kini terus menelusuri apakah ada dana yang mengalir ke Denny.

Denny dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU NO 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan dapat dipidana paling lama 20 tahun.

Anton menuturkan jika penunjukan *vendor* sebenarnya tidak disetujui staf Denny, penolakan timbul karena dengan dibukanya rek atas nama *vendor* itu untuk menampung dana pembuatan paspor dan kemudian setelah itu disetorkan ke kas negara. Dan program Simponi di Kemenkum HAM sendiri tidak memungut biaya tambahan apapun.

### Buka-bukaan Bawah Sudutkan Denny

Pernyataan Anton kemudian dipertegas dengan datangnya perkataan dari Kepala Biro Humas dan Kerjasama, Ferdinan, Rabu (25/3) yang mengatakan *payment gateway* yang diusulkan mantan atasannya, Denny bertentangan dengan peraturan Menkeu tentang mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Agar terjadi tertib administrasi, pembayaran dan atau penyetoran PNBPN yang berada di bawah pembinaan kementerian atau lembaga harus menggunakan Sistem

Informasi PNBPN Online (Simponi). Dalam sistem tersebut, Kemenkum dan HAM pun telah berkerjasama dengan BNI sebagai persepsi," cetus Ferdinand.

Tetapi dalam hal ini sambung dia, mekanisme *payment gateway* yang berlaku berbeda dengan sistem Simponi. Pasalnya uang melalui Simponi ke bank persepsi langsung masuk ke kas negara, sementara dalam *payment gateway* sebelum masuk kas negara, uang mengendap terlebih dahulu satu sampai dua hari di pihak ketiga. "Hal ini dilarang dalam mekanisme PNBPN," tegas Ferdinan.

Di sisi lain terang Ferdinan, program *payment gateway* juga bermasalah karena Denny sendiri menunjuk langsung beberapa bank tempat pembayaran biaya paspor dan tidak hanya terbatas pada bank persepsi.

Dalam sistem *payment gateway*

pembuatan paspor sendiri dikenakan biaya sebesar Rp 360 ribu, dengan rincian Rp 300 ribu dipergunakan untuk pengganti biaya buku, Rp 55 ribu untuk biometriks dan Rp 5 ribu untuk biaya administrasi bank.

Bantahan kemudian meluncur dari Denny, sebelumnya pada saat memenuhi panggilan Bareskrim sebagai saksi Kamis (12/3), Denny menolak munculnya tudingannya yang menyebut negara telah mengalami kerugian hingga mencapai Rp 32,4 M dalam program *payment gateway*.

Denny berkilah nilai tersebut merupakan pendapat yang diperoleh negara dalam proyek sistem pembuatan paspor secara *online*. Hal ini kata Denny kemudian diperkuat dengan laporan BPK tertanggal 20 Desember 2014 yang mengatakan proyek ini sudah menyeteror Rp 32,4 miliar. Jadi negara menerima uang Rp 32.4 miliar, bukan kerugian negara.

Sedangkan menurut pengacara Denny, Heru Widodo Di Jakarta, Selasa (24/3) dana Rp 605 juta yang disebut-sebut sebagai pungli dalam kasus pembayaran paspor elektronik sebagai biaya resmi perbankan. "Tentang info adanya pungli sejumlah Rp 605 juta itu tidak tepat, karena program *payment gateway* justru bertujuan menghilangkan pungli dan calo. Uang Rp 5.000 per transaksi itu biaya resmi perbankan, bukan pungli," tegas dia. Seraya menambahkan biaya Rp 5.000 per transaksi paspor bukan merupakan sesuatu yang wajib. Sebab bila pemohon memilih melakukan transaksi secara manual di loket maka tidak dikenai biaya tersebut.

Terkait masalah Denny, para pegiat anti korupsi menilai kasus yang menjerat Denny merupakan bentuk dari kriminalisasi yang ditujukan kepada para pegiat anti korupsi, bahkan mereka seperti Sosiolog Universitas Indonesia Imam B Prasodjo dan mantan pemimpin redaksi Tempo Bambang Harymurti meminta kepada Presiden Jokowi agar segera menghentikan kriminalisasi tersebut. ■





## BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan Sebesar Rp 40,55 T

Dari hasil laporan Ikhtisar Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima DPR RI, Selasa (7/4) disebutkan BPK telah memeriksa 651 objek pemeriksaan yang terdiri dari 135 objek pada pemerintah pusat, 479 objek pemerintah daerah dan BUMD, serta 37 objek BUMN dan badan lainnya. Dari pemeriksaan atas objek tersebut, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 40,55 triliun.

Demikian seperti disampaikan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

“BPK menemukan sebanyak 7.950 temuan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat 7.789 masalah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp 40,55 triliun,” ungkap Harry.

Lebih lanjut Harry mengatakan, pihaknya telah menemukan 2.482 masalah yang berasal dari kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari total ketidakpatuhan tersebut, kata Harry sebanyak 3.293 masalah berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan atau berdampak finansial senilai Rp

14,74 triliun.

Sedangkan masalah yang berdampak finansial sambung Harry terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian Rp 1,42 triliun, potensi kerugian Rp 3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp 9,55 triliun.

Selain itu, sambung Harry, pihaknya juga menemukan sebanyak 3.150 masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 25,81 triliun.

Namun tambah Harry, jika dibandingkan dengan IHSP I Tahun 2013, terjadi penurunan kerugian yang cukup signifikan. Dalam IHSP I Tahun 2013, BPK menemukan 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp 56,98 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus (senilai Rp 10,74 triliun) berupa ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Sedangkan rekomendasi dari BPK saat itu adalah berupa penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, atau perusahaan. / [Deddy K](#)

## PTUN Tolak Gugatan Terpidana Hukuman Mati asal Australia

PTUN Jakarta menolak gugatan terpidana mati asal Australia, dengan alasan pihaknya tidak memiliki wewenang hukum untuk mengkaji keputusan presiden yang menolak permohonan grasi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

“Tidak ada lagi jalur hukum yang tersisa,” jelas Ketua Tim Jaksa Novarida kepada para wartawan di Jakarta, Senin (6/4).

Menanggapi hal itu pengacara kedua warga Australia, Leonard Arpan mengatakan dirinya berencana membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka berhak hidup dan tim jaksa tahu bahwa kedua orang ini berhak secara hukum untuk mempertahankan diri,” jelas Leonard.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menolak untuk memberi pengampunan bagi kedua terpidana mati tersebut, meski berulang kali Pemerintah Australia, Brasil dan Perancis memintanya.

Sukumaran dan Chan sendiri menggugat penolakan tersebut ke PTUN karena menganggap Jokowi tidak mempertimbangkan secara memadai kasus para narapidana itu secara perorangan.

Sukumaran dan Chan adalah pemimpin kelompok sembilan warga Australia yang ditangkap di Bali tahun 2005 atau dikenal dengan sebutan 'Bali Nine'. Sementara anggota-anggota lain kelompok itu telah dijatuhi hukuman penjara untuk waktu lama. / [Deddy K](#)



# Praperadilan SDA Ditolak



Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Tati Hadiati menolak permohonan praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) dengan alasan penetapan tersangka bukanlah termasuk upaya paksa.

Sebagai pertimbangannya Hakim Tati mengutip pendapat dua ahli Hukum Acara Pidana yakni mantan Hakim Agung M Yahya Harahap dan Prof. Andi Hamzah, keduanya menyatakan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah mengatur upaya paksa, yakni pengeledahan, penyitaan, penangkapan yang telah merugikan tersangka dapat diajukan praperadilan. Sementara, penetapan tersangka bukanlah termasuk upaya paksa.

“Menimbang bahwa penetapan tersangka bukan upaya paksa, hanya proses administrasi penaikan status seseorang. Menimbang menurut hakim Penetapan status tidak atau belum merupakan upaya paksa melainkan hanya awal dan untuk melakukan tindakan upaya paksa. Menimbang bahwa dalam keterangan saksi dan bukti surat belum dilakukan penahanan sehingga penetapan tersangka bukan upaya paksa. Dengan demikian penetapan

tersangka bukan objek praperadilan,” ungkap Tati di PN Jaksel, Rabu (8/4).

Di samping itu, tambah Tati, obyek praperadilan sudah diatur secara limitatif di KUHP sehingga tidak bisa dilakukan perluasan.

“Menimbang dapat disimpulkan bahwa obyek praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka (10) KUHP jo Pasal 77 KUHP Jo 82 ayat (1) huruf b KUHP sifatnya limitatif dan sudah tegas dan jelas. Sehingga apa yang diluar pasal tidak bisa diuji di praperadilan. Sehingga petitum 3 dan 4 ditolak, dengan ditolaknya petitum 3 dan 4 maka petitum 2, 5, dan 6 juga ditolak,” jelas Tati.

Terkait masalah ada atau tidaknya kerugian negara sebagai alat bukti yang dituntut oleh SDA, Tati menjelaskan sudah memasuki tahapan substansi pokok perkara sehingga bukan menjadi kewenangan lembaga praperadilan. “Ada atau tidaknya bukti permulaan setidaknya dua alat bukti yang sah sudah memasuki substansi pokok perkara yaitu tentang pembuktian yang bukan kewenangan lembaga praperadilan,” pungkas Tati. / [Deddy K](#)

## KemenkumHAM Rancang Sistem Pemberian Remisi Online

Pemberian remisi terhadap narapidana belakangan ini menjadi polemik di masyarakat, salah satunya karena mekanisme pemberian remisi yang terkesan tertutup.

Menurut MenkumHAM Yasonna H Laoly untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya berencana membangun sistem pemberian remisi melalui mekanisme *online*.

“Terkait pemberian remisi memang itu *concern* saya. Dalam rangka itu kami sudah komitmen membuat pemberian remisi sistem *online*,” jelas dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Lebih lanjut Yasonna mengatakan jika seorang warga binaan mengajukan permohonan remisi dapat melalui akses di situs yang sudah disediakan nantinya.

Kemudian, tambah Yasonna, berbagai persyaratan yang diajukan mesti dipenuhi.

“Semua persyaratan sudah diajukan, sudah sampai mana, itu bisa dipantau,” katanya. / [Deddy K](#)

## Kasus Baku Hantam dan Suap Anggota DPR Segera Ditindak di MKD

Anggota Komisi XI Johnny G. Plate mengatakan permasalahan menyangkut anggota DPR yang berkelahi dan korupsi akan diperiksa dan diurus sesuai dengan UU MD3 dan tatib DPR.

“Jadi DPR dapet dua rudal, adu jotos dan suap komisi IV di Bali, itu MKD akan bekerja sesuai dengan UU MD3 dan tatib DPR. Karena ini bukan delik aduan, yang berantem itu pasti akan di panggil MKD untuk memeriksa mereka,” ujar Johnny di Jakarta, Sabtu (11/4).

Johnny menuturkan, kasus tersebut masih diproses dan memerlukan rekomendasi dan pendapat Dewan Kehormatan Dewan jika nanti berurusan dengan kepolisian.

“Kalau tindakan itu dibawa kepolisian baik adu jotos maupun korupsi karena mereka anggota DPR, dibawah UU MD3 perlu ada rekomendasi dan pendapat MKD,” katanya

Sementara itu, ia menyarankan agar MKD lebih proaktif menangani kasus tersebut agar proses konstitusi bisa berjalan normal.

“Jadi MKD harus pro aktif menangani itu sehingga proses hukum di KPK berjalan lancar dan proses politik di DPR tetap berjalan dengan aman. Apabila dibawa ke kepolisian pun bisa bekerja, dalam hal ini MKD harus ambil inisiatif, saya kira MKD sudah mulai mengurus itu,” katanya. / [Deddy K](#)

**P**residen Joko Widodo duduk manis didampingi Iriana Jokowi dalam pesawat kepresidenan, Minggu 23 Maret 2015.

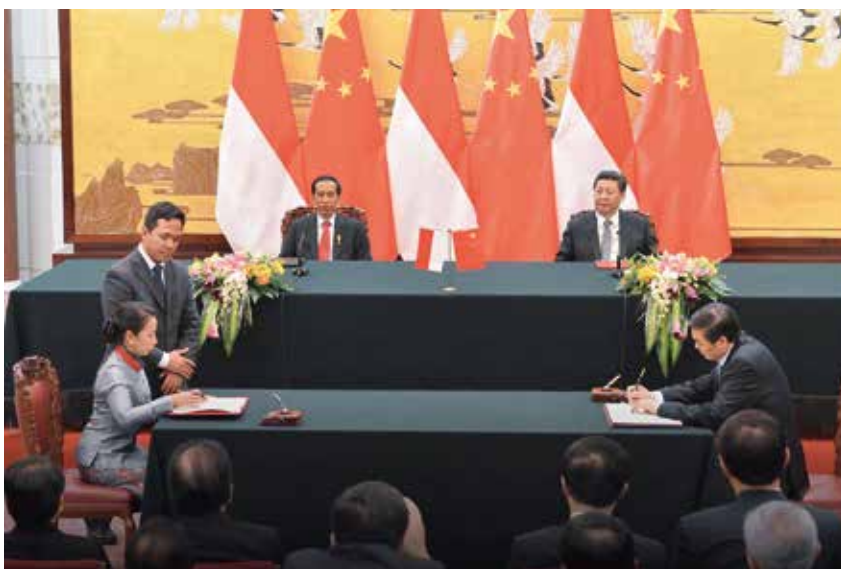
Mengenakan baju safari warna putih, Jokowi melemparkan senyum bertubi-tubi kepada awak media sesaat sebelum lepas landas dari Bandara Udara Internasional Halim Perdanakusumah, Jakarta. Sosok yang doyan *blusukan* ini mulai kunjungan '*blusukan*'-nya ke luar negeri, termasuk safari maraton ke Jepang (22-25 Maret), Cina (26-27 Maret), dan Malaysia (28 Maret).

Dalam kunjungan ini, salah satu bekal yang dibawa Jokowi adalah catatan angka pengangguran di Indonesia. Hal ini penting mengingat salah satu misi kunjungan adalah menarik investasi yang diharapkan dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan di Indonesia. Apalagi dua pekan sebelum lawatan itu, Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia merilis data, jumlah pengangguran terbuka Indonesia mencapai 7,3 juta jiwa atau 5,94% dari total angkatan kerja sebesar 121,87 juta jiwa.

Ekonom Core Indonesia, Akhmad Akbar Susanto, menyebut jumlah pengangguran terbuka Indonesia tergolong masih tinggi, meskipun jauh lebih sedikit dibanding 2005 yang menembus 11,90 juta orang atau 11,29%.

"Masalahnya, angka pengangguran yang tinggi ini didominasi oleh masyarakat usia produktif 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Kebanyakan pengangguran bermukim di perkotaan mencapai 4.263.157 jiwa, sementara di desa hanya mencapai 2981.748 jiwa," ujar Akbar.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani juga mengakui hal ini. Indonesia masih menghadapi problem besar di soal angka pengangguran yang cukup tinggi. Sementara itu, lapangan kerja yang tersedia sedikit. Di sisi lain, angkatan kerja baru muncul sekitar 2 juta orang per tahun. Layak jika jumlah pengangguran pun akan bertambah



## Kongkritkan Investasi, Tekan Pengangguran

karena ada sekitar 23 juta orang yang bekerja paruh waktu dan kategori setengah menganggur.

Franky mengatakan, ada penurunan elastisitas tenaga kerja dalam satu dekade terakhir di mana pada 2014 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan 160.000 lapangan kerja, menurun dibandingkan 2004 di mana setiap 1 persen pertumbuhan menciptakan 450.000 lapangan kerja.

"Masalah inilah yang perlu segera dipecahkan melalui investasi yang menciptakan banyak lapangan

pekerjaan. Pemerintah menargetkan penyerapan 2 juta lapangan kerja setiap tahunnya," ucap Franky akhir Maret 2015.

Isu pengangguran sebenarnya sudah menjadi masalah global yang dikhawatirkan oleh hampir semua negara. Badan PBB bidang buruh International Labour Organization (ILO) pada awal 2015 melansir kajian bahwa pengangguran global akan meningkat dalam 5 tahun mendatang. Sedikitnya 212 juta orang terancam tidak bekerja sebelum tahun 2019. ILO mendasarkan analisisnya pada

**Foto atas:** Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, Senin (23/3) petang, dikantor PM Jepang, di Tokyo, selenggarakan jumpa Pers setelah menyaksikan penandatanganan kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) bidang pertahanan, perdagangan, dan promosi.

**Foto bawah:** Presiden Jokowi dan Presiden RRT Xi Jinping menyaksikan penandatanganan MoU antara Menteri BUMN dengan mitranya, di Beijing, Kamis (26/3).

**Foto kanan:** Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani (kiri) didampingi Direktur Promosi Sektorial BKPM Ikmal Lukman menyampaikan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang dan Tiongkok di Jakarta, Rabu (1/4).



kenyataan bahwa proses pemulihan ekonomi dunia sangat lambat sejak resesi tahun 2008.

### Komitmen Investasi

Senyum Jokowi kembali merekah setelah pulang dari kunjungan ke Jepang, Cina, dan Malaysia. Kunjungan itu menghasilkan sejumlah komitmen bisnis dan investasi sekitar USD71,44 miliar. Meski masih berupa

janji, Kepala BKPM Franky Sibarani menyebut ini sebagai kabar sedap bagi perbaikan perekonomian Indonesia ke depan (lihat tabel).

“Ada sejumlah komitmen kerjasama strategis dengan pengusaha di Jepang dan di Tiongkok. Saat di Jepang, Pak Presiden ikut forum bisnis yang dihadiri oleh 1.200 pengusaha dari Jepang kemudian ada komitmen kerja sama *business to business* yang mencapai kisaran USD5,6 miliar,” ujar Franky penuh semangat.

Adapun di Tiongkok, lanjut Franky, setidaknya ada komitmen kerjasama bisnis bernilai USD68,1 miliar, belum termasuk komitmen dalam mata uang yuan sebesar RMB2,1 miliar atau setara USD340 juta. “Total komitmen bisnis yang dibawa pulang dari Tiongkok mencapai USD68,440 miliar,” lanjutnya.

Jokowi memang menawarkan aneka peluang investasi dan sejumlah insentif maupun kemudahan bagi investor Jepang maupun Cina. Kemudahan dan insentif itu akan diberikan jika mereka dapat menjadikan Indonesia sebagai basis produksi ekspor.

Hanya saja satu kata kunci yang terus ditekankan, bahwa Indonesia tidak mau hanya menjadi pasar melainkan harus menjadi basis produksi ekspor. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan ekspor barang jadi atau setengah jadi,

bukan barang mentah. “Investasi-investasi dari Jepang yang berupa industri-industri berorientasi pada ekspor. Kita tidak hanya dijadikan pasar,” ucap Jokowi.

Bekas Walikota Solo yang mencetuskan Mobil SMK ke Jakarta ini mencontohkan, industri otomotif Toyota Jepang yang ada di Indonesia sudah berjanji akan menaikkan angka ekspor barang yang diproduksi di Indonesia. Bukan sekedar menjajakan mobil di dalam negeri. “Contohnya itu Toyota. Mereka menyanggupi akan melipatkan ekspornya tiga kali lipat dalam waktu lima tahun,” tegas Jokowi.

Namun yang perlu diingat adalah catatan kurang baik terkait *investment rate* yang tergolong kecil. Rekam jejak *investment rate* Tiongkok selama ini hanya 1:10 yang berarti dari 10 komitmen kerjasama hanya 1 yang terealisasi. Adapun *investment rate* Jepang sekitar 1:6,5.

Karena alasan ini, Jokowi akan geram jika kerja sama dengan negara lain hanya sebatas nota kesepahaman (MoU) yang kerap selesai di atas kertas. “Saya minta hal yang konkret dan nyata, bukan MoU. Kita berharap langsung bisa segera direalisasi karena minggu depan ini akan datang tim-tim yang akan menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan itu, baik dari Jepang atau Tiongkok,” tuntas Jokowi.

Moh Sahlan

#### Sejumlah Komitmen Investasi Jepang

- Toyota akan melakukan perluasan investasi sebesar USD1,6 miliar
- Suzuki akan melakukan perluasan investasi sebesar USD1 miliar.
- Gabungan investor Jepang dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), industri baja, industri pengolahan hasil perikanan, galangan kapal, dan kelistrikan akan berinvestasi total senilai USD1,45 miliar
- Sektor industri komponen, industri logam, industri pengolahan hasil perikanan, konstruksi dan perdagangan akan investasi USD1,58 miliar.

#### Realisasi Investasi Jepang 2010-2014

- Sektor otomotif USD6,3 miliar
- Industri baja USD2,01 miliar
- Industri kimia USD798 juta
- Industri tekstil USD481 juta
- Industri makanan USD444 juta
- Total: USD12,1 miliar

#### Komitmen Investasi Tiongkok (Khusus Sektor Infrastruktur)

- Investasi Bidang Kelistrikan USD15,27 miliar
- Investasi Bidang Pelabuhan USD2,04 miliar
- Investasi Bidang Telekomunikasi USD1,1 miliar
- Investasi Bidang Transportasi/Perkeretaapian USD6,56 miliar

## Darmin Nasution: Prediksi Penerimaan Pajak Kurang Rp180 Triliun

Pakar pajak yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, Darmin Nasution memprediksikan pencapaian penerimaan target pajak 2015 kurang (*shortfall*) mencapai Rp 180 triliun atau setara dengan 17,8 persen. Menurutnya, *shortfall* tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.

"Pemerintah perlu ekstra *effort* dalam mengumpulkan pajak. Penerimaan pajak tanpa ekstra *effort* kira-kira sebesar 10,5 persen, pertumbuhannya bisa mendekati 12 persen," ujar Darmin yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia di DPR RI Jakarta, Kamis (9/4).

Lebih lanjut, kata dia,



pertumbuhan penerimaan pajak di luar PPh Migas yang sebesar 38,7 persen dinilai sangat tinggi. Pasalnya, selama ini pertumbuhan penerimaan tertinggi hanya mencapai 33 persen.

"Bagaimana mengelola *shortfall* besar supaya APBN tetap berjalan, orang pemerintah harusnya tahu, saya tidak perlu ajari. Tapi kita belum pernah *shortfall*-nya sebesar itu," kata dia.

Selain itu, Darmin juga memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan ekstra *effort*. Salah satunya yaitu menggerakkan institusi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan masyarakat, tidak sekedar menyusun sistem informasi dan metode pengumpulan yang baik.

"Pada gilirannya baru bisa diharapkan militansi kreativitas dan kesadaran dalam pengumpulan pembayaran pajak setelah itu," pungkasnya. /Ismed Eka Kusuma

## Investasi Industri Makanan Diyakini Meningkatkan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini rasio investasi sektor industri makanan akan meningkat di kemudian hari. BKPM sendiri mencatat rasio investasi sektor industri makanan periode 2010-2014 masih sebesar 46 persen.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, saat ini ada rencana investasi senilai USD1,4 miliar yang masih *on the pipeline* dan akan segera direalisasikan. Adapun sepanjang November 2014 hingga Maret 2015, minat investasi industri makanan dan minuman dari Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat senilai USD1,6 miliar.

"Jumlah minat investasi tersebut di luar investor yang sudah mengajukan perizinan investasi di sektor tersebut sepanjang Januari-Februari 2015 senilai USD151 juta," jelas Franky.

Rasio investasi sektor makanan berasal dari rencana investasi sepanjang periode tersebut sebesar USD2,6 miliar



dan realisasi investasi pada periode yang sama sebesar USD1,2 miliar.

"BKPM optimis realisasi investasi sektor industri makanan akan meningkat di masa mendatang," pungkas Franky.

Berdasarkan data BKPM tahun 2014, sektor makanan dan minuman tercatat sebagai total realisasi investasi terbesar, yaitu Rp53,4 triliun atau sekitar USD4,5 miliar. Porsi ini mencakup 11,5 persen dari total penanaman modal asing dan dalam negeri tahun 2014. Jumlah realisasi investasi sektor makanan bahkan sedikit melebihi sektor pertambangan (tidak termasuk sektor hulu Migas) yang selama ini memimpin. /Ismed Eka Kusuma

## Cadangan Devisa Terkurus Rp50,7 Triliun untuk Jaga Rupiah

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2015 tercatat menurun USD3,9 miliar atau setara Rp50,7 triliun (kurs Rp 13.000 per dolar AS), dari USD115,5 miliar pada Februari menjadi USD111,6 miliar bulan Maret.

"Penurunan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, April 2015.

Meskipun mengalami penurunan, posisi cadangan devisa per akhir Maret 2015 masih cukup untuk membiayai 6,9 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan," ujar dia.

Sebelumnya, pada Februari lalu, cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2015 sempat meningkat 1,3 miliar dolar AS dari posisi akhir Januari 2015 sebesar 114,2 miliar. Kala itu, peningkatan cadangan devisa mayoritas berasal dari devisa hasil ekspor migas bagian pemerintah yang melebihi pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah. /Ismed Eka Kusuma



## Pemerintah Keluhkan Sempitnya Ruang Fiskal

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengeluhkan sulitnya melakukan inovasi pembangunan dari anggaran yang ada. Apalagi anggaran itu telah dipatok untuk kewajiban lain, seperti belanja negara.

"Untuk belanja bunga utang, belanja pegawai, membayar subsidi, dan transfer ke daerah. Cukup membebani karena porsinya mencapai 70-80 persen dari kemampuan fiskal," ujar Askolani di gedung DPR Jakarta, Rabu, 8 April 2015.

Karena anggaran telah dipatok, lanjut dia, maka keuangan negara menjadi terbatas dan ini berdampak pada sulitnya pemerintah menggunakan anggaran. "Ruang fiskal kita hanya bisa improvisasi 15-20 persen," ujarnya.

Kemenkeu berharap nantinya tidak ada APBN yang dipatok di masing-masing sektor. "Karena tidak bisa membuat inovasi pembangunan, jalan, pertanian, pertahanan, ini tantangan yang nyata dengan pengkavlingan APBN, ini harus diminimalkan," imbuh Askolani.

Realisasi penyerapan APBN-P 2015 periode Januari-Maret 2015 hanya sekitar 18,5 persen. Meningkatkan dibandingkan periode sama tahun 2014 sebesar 15 persen. Penyerapan terbesar pada APBN-P 2015 periode Januari-Maret yaitu pada belanja pegawai dan belanja transfer daerah. Sedangkan untuk anggaran infrastruktur belum terserap secara maksimal karena masih dalam proses tender. /Imed Eka Kusuma



## OJK: MMM Berpotensi Merugikan Masyarakat



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kegiatan menggerakkan dana masyarakat oleh Mavrodi Mondial Money atau Manusia Membantu Manusia (MMM) berpotensi merugikan masyarakat karena tidak memiliki izin dan tidak jelas status badan hukumnya.

"Setelah analisis dari data terbatas dan iklan dimuat, kegiatan MMM ini berpotensi merugikan dengan ciri-ciri, misalnya imbal hasil di luar asas kepatutan dan kewajaran, sudah jelas tidak berizin dan tidak jelas bentuk badan hukum dan domisili hukum serta struktur organisasi dan penanggung jawabnya," kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono di Jakarta, Kamis (9/4).

Bersama Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, OJK mengidentifikasi potensi merugikan masyarakat berdasarkan pada sejumlah hasil analisis terkait MMM, yakni tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, tidak ada kejelasan tentang bentuk badan hukum dan domisili hukum.

Kemudian, MMM berisiko karena kegiatan yang dilakukan menyerupai "money game" dan "ponzi scheme" yang sangat berisiko menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat.

Selain itu, MMM juga tidak memiliki struktur organisasi dan penanggung jawab kegiatan. Kegiatannya juga menggunakan sarana internet dengan server di luar negeri.

Kusumaningtuti mengatakan MMM tidak memiliki kejelasan

cara mengelola dana investasi. Dari analisis, keuntungan lebih digantungkan pada keikutsertaan dari peserta yang berikutnya mendaftar.

Hingga saat ini, katanya, banyak pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terhadap dana yang digunakan untuk mengikuti kegiatan MMM yang disampaikan melalui media sosial dan "Financial Costumer Care" OJK.

"OJK menerima pertanyaan dan informasi sudah 235 pertanyaan yang khusus mengenai MMM itu," katanya.

Pada dasarnya, masyarakat mempertanyakan perizinan, badan hukum dan kejelasan pengurus MMM, lanjutnya.

"Mereka itu mempertanyakan apakah MMM ini mempunyai izin, siapa yang memberi izin kemudian di mana domisilinya. Kemudian, mereka mempertanyakan kok tinggi sekali imbal hasil dari investasi," ujarnya.

Dengan mengikuti MMM, masyarakat dijanjikan keuntungan 30 persen sebulan dari investasi yang diberikan. Padahal tidak ada kepastian untuk menjamin keuntungan, ujarnya.

Dari 235 pertanyaan dan informasi yang masuk ke OJK itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti dari Jawa Timur sebanyak 25 pertanyaan dan informasi terkait MMM.

Kemudian, sebanyak 16 pertanyaan dan informasi dari DKI Jakarta. Sebanyak 13 pertanyaan dan informasi dari Jawa Barat.

Daerah lainnya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatra Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Papua.

"Jadi, merata dari sabang sampai merauke. Juga ada pertanyaan dari luar negeri dari Hongkong," katanya.

Kusumaningtuti mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti kekuatan seperti MMM yang sebenarnya tidak memiliki jaminan atas keuntungan dari investasinya yang diberikan. /Imed Eka Kusuma

# Izin Ekspor Freeport-Newmont Rendahkan Wibawa Bangsa



**P**ada suatu siang yang terik, CEO Freeport-McMurray, James Robert Moffett menjabat erat tangan Menteri ESDM Sudirman Said usai pertemuan di kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, medio Januari 2015.

Jabatan erat dari bos Freeport itu adalah simbol kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan asal Amerika Serikat tentang perpanjangan izin ekspor hasil tambang mineral mentah (konsentrat) yang dikeruk dari tanah Papua. Sebab, dua hari setelah pertemuan ini, Sudirman menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan kesepakatan perpanjangan izin ekspor yang diberikan hingga 18 September 2015 itu.

Hanya berselisih jam, ternyata pada 26 Januari 2015 pemerintah telah mengeluarkan izin itu melalui surat Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri bernomor 03.PE-08.15.0002 tanggal 27 Januari 2015 perihal Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang ditujukan kepada PT Freeport Indonesia.

Sudirman Said tampak matimatiat berusaha meyakinkan bahwa pemerintah tidak dalam posisi kalah dalam kesepakatan ini. Freeport, kata dia, harus meningkatkan peranan dalam pembangunan Papua, kemudian harus membenahi keterlibatan nasional dan putra-putra daerah, serta meningkatkan komponen lokal industri pendukung belanja bahan baku pendukung.

“Papua butuh sentuhan

pembangunan. Dan di Timika yang masuk dalam areal Freeport itu seperti kota modern. Tapi begitu keluar, masih banyak anak-anak sekolah ala kadarnya. Itu dampak yang harus dipikirkan,” ucap Sudirman.

Setelah izin Freeport keluar, rentetan izin ekspor konsentrat pun terus mengikuti. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, R Sukhyar mengaku sudah menandatangani perpanjangan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara. Ada enam perusahaan tambang lain yang juga memperoleh surat izin ekspor (SPE) konsentrat, yakni PT Sebuku Iron Electric Ores, PT Lumbung Mineral Sentosa, PT Smelting, PT Sumber Baja Prima, PT Kapuas Prima Coal, dan PT Megatop



Inti Selaras.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tentu gembira atas perpanjangan izin ekspor ini. Bekas Staf Ahli Pertahanan dan Keamanan Badan Intelijen Negara (BIN) itu menjanjikan bahwa Freeport akan memacu pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral mentah. "Kita siapkan dana USD2,3 miliar untuk smelter dan lokasinya sudah ditentukan di Jawa Timur," ucapnya.

Ketika pemerintah mengelak disebut kalah negosiasi dan Freeport berjanji membangun smelter, suara riuh berdentung dari luar. Banyak kalangan menyebut Pemerintah Jokowi-JK sangat lunak terhadap Freeport dan perusahaan asing lainnya yang sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan alam Papua tanpa sumbangsih berarti bagi bangsa Indonesia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang notabene partai penopang pemerintah juga ikut mengkritik. Anggota Fraksi PDIP di DPR, Masinton Pasaribu menyebut ini adalah pengkhianatan terhadap Nawa Cita yang menekankan tentang kemandirian dan kedaulatan bangsa.

"Kalau kita konsisten sama Tri Sakti dan Nawa Cita, tidak ada perpanjangan untuk Freeport. Bagaimana kita bikin bangsa berdaulat mandiri tapi kita serahkan kekayaan alam kita kepada pihak lain. Ini peningkaran pertama atas Nawa Cita," ucapnya.

Pengamat Ekonomi Arim Nasim juga menilai kebijakan pemerintah memberi izin ekspor kepada Freeport dan Newmont adalah bukti kelemahan pemerintah yang tidak mampu membendung tekanan dari luar. Pemerintah semestinya tidak sekedar melarang ekspor, namun harus

mencabut izin operasi Freeport yang tertuang dalam Kontrak Karya.

"Seharusnya, izin pertambangan Freeport dicabut, begitu juga tambang-tambang raksasa lainnya yang saat ini dikelola oleh pihak swasta/asing dan pengelolaan semuanya harus diserahkan kepada BUMN. Dengan demikian, keuntungannya dapat dinikmati secara optimal oleh rakyat negeri ini," ucapnya.

Koordinator Koalisi Rakyat Pembela Trisakti dan Nawa Cita, Arief Poyuono, juga menyebut Jokowi-JK berdusta terhadap janji Nawa Cita dan Trisakti yang sangat sering disampaikan. Dia mengatakan bahwa Pasal 170 juncto Pasal 103 (1) Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) telah jelas melarang adanya ekspor barang tambang dalam bentuk konsentrat. Juga mewajibkan perusahaan melakukan pengolahan mineral mentah di dalam negeri.

"Pemerintah gagal melaksanakan kewajibannya menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku. UU Minerba ditabrak

dalam kebijakan ini," tegas Arif.

Kalangan DPR menduga ada kongkalokong dalam pengeluaran izin perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu yang harus dibongkar. Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir pun mengaku sudah bergerak melakukan aksi investigasi. "Kan tidak harus *gembur gembur* dulu. Sejak bulan lalu kita sudah investigasi ke Freeport. Bareng sama LSM pemerhati lingkungan," ujar Hafidz kepada aktual, April 2015.

Investigasi ini, lanjut Hafidz, dilakukan karena ada dugaan keanehan dalam pemberian izin ekspor konsentrat yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi aturan yang tertuang dalam UU Minerba sudah jelas bahwa perusahaan harus melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

"Pasal 170 juncto Pasal 103 (1) UU Minerba mewajibkan pemegang kontrak karya melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan batas akhirnya 12 Januari 2014. Aturan itu kan harus dijalankan konsisten," tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

(PKS), Iskan Qolba Lubis, juga menuding pemerintah secara sengaja melangkahi amanat pasal 170 UU 4/2009 tentang Minerba. "Klausul perpanjangan izin ekspor tanpa proses pemurnian kepada Freeport dan Newmont jelas pelanggaran UU. Ini tidak boleh," ujarnya.

Iskan mengingatkan bahwa pasal 33 ayat 3 UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. "Kalau sekarang, rakyat dapat apa?" tuntas Iskan. ■

Moh Sahlan

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
Jalan M.H. Roeslan Raya No.3 Jakarta 10110  
Telp. 022-23626000, 022-23626001, 022-23626002  
Fax. 022-23626010

Nomor : 03.PE-08.15.0002  
Sifat : Jakarta, 27 Januari 2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan

Yth. Direktur  
PT. Freeport Indonesia  
Gedung Plaza 89 Lt. 5 & 12,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6  
di - Jakarta Selatan DKI Jakarta

Sehubungan surat Direktur PT. Freeport Indonesia No. 10093/16.04/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Permohonan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan (Konsentrat Tembaga), dan berdasarkan:

- Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/1/2014 tanggal 11 Januari 2014.
- Rekomendasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 163/30/DJB/2015 tanggal 26 Januari 2015.

dengan ini dibentahukan sebagai berikut:

- Kepada PT. Freeport Indonesia, pemilik:  
ET-PPHPP : No. 65/DAGLU/ET-PPHPP/3/2014  
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 09.03.1.07.23573  
tanggal 7 Oktober 2013.  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : No. 01.069.536.9-091.000  
tanggal 26 Desember 1991.

dapat disetujui mengeksport Konsentrat Tembaga dengan Pos Tarif/HS, nama jenis barang, jumlah barang dan pelabuhannya sebagaimana terlampir.

- Pencapaian kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian PT. Freeport Indonesia dengan presentase 5,6% termasuk persiapan jaminan kesungguhan.
- Wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor produk pertambangan hasil pengolahan sebelum muat barang, dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- Sebelum pelaksanaan verifikasi, pemilik ET-PPHPP wajib menunjukkan lembaran asli surat persetujuan ekspor atau lembaran copy surat persetujuan ekspor yang telah dilegalisir oleh Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan kepada Surveyor.
- Eksport Konsentrat Tembaga tersebut dapat dilakukan sejak tanggal persetujuan ekspor ini ditandatangani sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 yang dibuktikan dengan diserahkannya pemberitahuan kepastian sesuai dengan ketentuan kepastian yang berlaku dan tidak dapat dilalihkan kepada Badan Usaha lain.
- Setiap pelaksanaan ekspor Saudara wajib menunjukkan lembaran asli surat persetujuan ekspor atau lembaran copy surat persetujuan ekspor yang telah dilegalisir oleh Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan kepada petugas Bea dan Cukai setempat guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Ekspor (terlampir).

125096736649



## Investor Jepang Kepincut Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Batubara

Para pengusaha dari Jepang mulai menunjukkan minat besar terhadap proyek infrastruktur sektor energi di Indonesia. Kali ini para investor itu menjajaki proyek pembangkit listrik

tenaga batubara yang disebut punya prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan di Indonesia.

“Investor Jepang selama ini lebih banyak di sektor otomotif dan

elektronik. Tapi saat ini banyak juga yang menyatakan keinginannya masuk ke sektor pembangkit listrik tenaga batubara,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam sebuah kesempatan di Jakarta, April 2015.

Bambang mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo dan responnya memang bagus. Bahkan dalam setiap pertemuan dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta selalu disampaikan bahwa peluang di bisnis infrastruktur sektor energi sangat menjanjikan.

“Saya sampaikan kepada Bapak Presiden mengenai keinginan investor yang sangat besar di bidang infrastruktur,” imbuhnya.

“Dulu pengusaha Jepang masuk ke Indonesia melalui investasi di bidang otomotif dan elektronik. Saat ini pengusaha Jepang ingin lebih banyak berkibrah di bidang infrastruktur,” tuntas Bambang. / Moh Sahlan

## Pertamina Bukukan Kerugian Hingga Rp 2,7 triliun

Kinerja bisnis PT Pertamina (Persero) di bawah pimpinan Dwi Soetjipto ternyata sangat *mlempem*. Hanya dalam tempo dua bulan (Januari-Februari 2015) Perusahaan Negara itu sudah mencatat kerugian hingga USD212,3 juta, setara dengan Rp 2,7 triliun (asumsi Rp13.000/USD).

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menyebut kerugian itu disebabkan anjloknya bisnis di sektor hilir yang mencapai USD368 juta. Sedangkan sektor hulu masih mencetak laba bersih USD130 juta, sektor energi baru terbarukan mencetak laba bersih USD40,9 juta, dan sektor lainnya masih untung USD2,5 juta.

“Kerugian Pertamina juga disebabkan adanya efek beban *inventory*. Adapun realisasi pendapatan Pertamina pada hingga

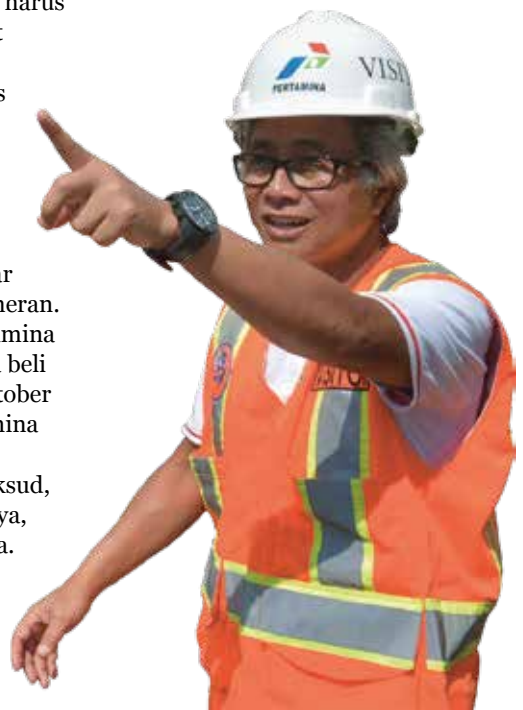
Februari 2015 mencapai USD6,864 miliar,” papar Dwi di Jakarta, April 2015

Pengamat politik dan hukum, Boyamin Saiman mengaku sulit mempercayai bahwa Pertamina rugi di bisnis hilir. Apalagi jika melihat sisi bisnis penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat dominan. Adapun pada sektor bisnis gas alam dan eksplorasi, Pertamina juga harus menuai keuntungan mengingat adanya *cost and recovery*.

“Seharusnya dari segi bisnis BBM itu tidak merugi. Kan dia (Pertamina) menjual dengan harga pasar. Sekali pun ada yang tidak dijual dengan harga pasar kan ditutupi dengan subsidi pemerintah seperti solar dan elpiji 3 kg,” ujar Boyamin heran.

Jika salah satu alasan Pertamina adalah faktor *inventory* karena beli minyak yang lebih tinggi di Oktober - Desember 2014, maka Pertamina seharusnya dapat menjelaskan berapa harga tinggi yang dimaksud, berapa dijualnya, berapa ruginya, dan berapa hitung-hitungannya.

“*Toh* asing saja yang di sini untung kok, tidak disubsidi, tidak disuntik modal oleh Pemerintah, mereka tetap beroperasi di sini tidak angkat kaki. Kalau mereka saja bisa untung kenapa Pertamina tidak bisa? Ini kan aneh. Sangat tidak masuk akal, kalau namanya pedagang harusnya sudah menghitung hal-hal resiko seperti itu,” tuntas Bonyamin. / Moh Sahlan





## Pendapatan Negara Dari Produksi Minyak Bakal Terkikis

Ibarat lilin yang makin lama makin terkikis, angka produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan angka produksi itu diperkirakan hanya mencapai 500.000 barel per hari (bph) pada tahun 2019.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mengatakan bahwa merosotnya angka produksi ini pada akhirnya bisa menambah berat beban anggaran Negara pada sektor pendapatan.

"Penurunan produksi minyak tersebut mengancam pendapatan negara baik dari sisi pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maupun bagi hasil ke pemerintah daerah," jelas Askolani.

*Lifting* minyak Indonesia tahun ini ditarget meningkat menjadi 825 ribu bph dibanding tahun 2014 sebesar 794 ribu bph. Namun peningkatan itu hanya sementara. "Pemerintah memprediksi produksi minyak akan terus mengalami penurunan. Sampai 2019 produksi minyak hanya akan mencapai 500 ribu bph," ucap Askolani. / Moh Sahlan

## Tarif Listrik Berpeluang Naik Bulan Mei

Pemerintah sangat mungkin menaikkan harga tarif listrik pada Mei, setelah sebelumnya membatalkan rencana kenaikan pada awal April 2015 lalu. Peluang menaikkan harga

Peluang menaikkan tarif listrik ini dimungkinkan karena mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 31 tahun 2014 yang menyatakan bahwa penentuan tarif listrik akan dilakukan penyesuaian terhadap 3 faktor: nilai tukar mata uang Dolar Amerika terhadap Rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan inflasi.

Sebelumnya pemerintah sudah membatalkan rencana kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga golongan 1300 vA dan 2.200 vA. Pembatalan ini disebabkan karena rumah tangga golongan 1300 vA dan 2.200 vA masih mendapatkan subsidi sebesar Rp 1,3 triliun.

"Dua golongan tersebut diberikan



subsidi sebesar Rp 1,3 triliun pada awal tahun 2015. Kalau 1.300 dan 2.200 itu dikasih subsidi Rp 1,3 triliun untuk ditunda kenaikannya. Kalau subsidi habis itu baru kita naikkan. Itu tergantung tiga hal itu," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman. / Moh Sahlan

## Menteri ESDM Wacanakan Bentuk BUMN Migas Sektor Hilir

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan bahwa pihaknya memiliki wacana untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang akan difokuskan mengurus sektor hilir Migas selain PT Pertamina (Persero). Nantinya, BUMN khusus ini akan ditugaskan mengelola blok migas lain yang kemudian dalam pengerjaannya akan bekerjasama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Sekali lagi ini kan baru dilontarkan, kita belum ada kesepakatan. Jalannya masih panjang tapi kita perlu menjaring masukan-masukan," ujar Sudirman saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Kamis (9/4).

Menurutnya, BUMN hilir ini juga nantinya harus dibuat efisien dan kompetitif. Sehingga, ke

depan, Pertamina tidak saja yang mendapatkan blok migas dari pemerintah.

Bahkan Sudirman berpendapat bahwa semakin banyaknya alternatif maka pengelolaan migas akan semakin kompetitif.

"Justru dengan itu Pertamina tidak akan jadi *pure monopolistic*, karena akan ada pengimbang," ujar dia.

Selain itu, seperti diberitakan sebelumnya, Sudirman juga mengatakan bahwa dalam rancangan Revisi Undang-Undang Migas, pihaknya berencana untuk mengubah sistem kelembagaan SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus.

"(SKK Migas) jadi badan usaha negara yang diatur dengan UU Migas. Kebayang aja seperti LPS atau OJK. Itu kan lembaga khusus, nah kurang lebih seperti itu," tukasnya. / Moh Sahlan



# Saudi Memicu Perang Baru di Yaman

Serangan militer Arab Saudi dan sekutu-sekutunya ke kubu Houthi di Yaman, telah membuka front perang baru di Timur Tengah. Namun, intervensi asing terhadap konflik dalam negeri di Yaman ini justru memperumit masalah dan tidak akan selesai dengan mudah.

**P**erang dan gejolak konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di antara sesama negara Arab yang mayoritas penduduknya Muslim, sebetulnya sudah cukup runyam. Namun, seolah-olah itu belum cukup, pada 26 Maret 2015 dan beberapa hari berikutnya, Arab Saudi mengerahkan 100 pesawat tempurnya untuk mengebom posisi milisi Houthi di Yaman, dan praktis telah membuka front perang baru.

Saudi tidak sendirian, tetapi didukung oleh sejumlah negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), ditambah Mesir, Jordania, Maroko,

Sudan, dan Pakistan. Dalam serangan udara pertama, aksi militer Saudi didukung oleh Kuwait (15 pesawat), Bahrain (15 pesawat), Uni Emirat Arab atau UEA (30 pesawat), Qatar (10 pesawat), Jordania (6 pesawat), dan Sudan (3 pesawat). Mesir juga melibatkan empat kapal perangnya, yang melewati Terusan Suez dan masuk ke Teluk Aden untuk mendukung intervensi militer itu.

Alasan resmi bagi aksi militer ini adalah pihak koalisi yang dipimpin Saudi ingin membela “pemerintahan yang sah” dan menghindarkan perang saudara. Alasan lain, jika pihak Houthi —yang dituding didukung oleh

Iran—dibiarkan berkuasa di Yaman, pengaruh Iran yang menganut Syiah akan semakin meluas di negara-negara Timur Tengah. Apalagi pengaruh Iran itu sudah terlihat nyata di Suriah, Irak, dan Lebanon melalui kelompok Hizbullah.

Kelompok Houthi yang sekarang berkuasa di Yaman adalah warga penganut Syiah Zaidiyah, yang jumlahnya mencapai sekitar 35-40 persen dari populasi Yaman. Pada 2014, populasi Yaman mencapai 25,1 juta jiwa. Houthi menginginkan otonomi yang lebih luas di kawasan Saada, Yaman Utara. Milisi Houthi merebut kekuasaan dari Presiden Abd-Rabbuh Mansour Al-Hadi yang dekat dengan Saudi pada penghujung 2014, karena Al-Hadi dianggap mengingkari kesepakatan pembagian kekuasaan sebelumnya.

Houthi yang minoritas biasanya hanya punya pengaruh terbatas pada daerah pegunungan di utara. Namun, dalam gerak maju ke wilayah tengah dan selatan tahun 2014, Houthi mendapat dukungan dari unit-unit militer yang setia pada mantan orang

**Foto kanan:** Pemberontak Muslim Syiah mengangkat senjata mereka saat menggelar aksi menentang serangan udara di Sanaa, Yaman, Kamis (26/3).

**Foto kiri:** Dua orang membawa tubuh seorang anak dari bawah reruntuhan rumah yang hancur akibat serangan udara Saudi di dekat Sana'a, Yaman, (3/26).

kuat Yaman, Ali Abdullah Saleh (73). Ali Abdullah Saleh semula adalah Presiden Yaman Utara/ Republik Arab Yaman (1978-1990), dan setelah berhasil mempersatukan Yaman Utara dengan Yaman Selatan/ Republik Demokrasi Rakyat Yaman, ia menjadi Presiden Republik Yaman (1990-2012).

Saleh sendiri adalah penganut Syiah Zaidi yang sekuler. Ia dipaksa mundur pada 2012, sesudah terjadi pergolakan politik "musim semi Arab" (Arab Spring) selama setahun, dan digantikan oleh wakilnya Abd-Rabbuh Mansour Al-Hadi. Ali Abdullah Saleh, mantan presiden yang makmur ini, tetap berpengaruh dan memiliki pendukung setia di kalangan militer, yang loyalitasnya telah ia pupuk selama lebih dari 30 tahun berkuasa.

### Dapat Bantuan dari Iran

Sampai derajat tertentu, kubu Houthi juga menerima bantuan dari Iran, sehingga ada yang memandang bahwa perang di Yaman kali ini merupakan perang *proxy* antara dua kekuatan regional yang sedang bersaing dan berebut pengaruh: Arab Saudi yang Sunni dan Iran yang Syiah. Namun, menurut Kenneth M. Pollack, Senior Fellow di Center for Middle East Policy, Amerika Serikat, peran Iran dalam kasus ini sebenarnya terlalu dibesar-besarkan, dalam apa yang awalnya dan sebagian besarnya adalah masalah domestik, yakni perang saudara di Yaman.

Langkah militer Saudi ini dapat memancing eskalasi konflik yang berbahaya dan tampaknya tidak akan mendorong perkembangan yang positif pada Yaman. Bahkan, perkembangan situasi di Yaman akan memberi risiko buruk pada stabilitas



Saudi sendiri untuk jangka menengah dan panjang.

Lebih jauh, Pollack menyatakan, bahkan dengan bantuan Amerika, GCC dan mitra-mitra koalisinya tidak punya cukup kapasitas untuk menghancurkan operasi darat pasukan Houthi. Dengan bantuan AS, mereka memang bisa menimbulkan kerugian pada pihak Houthi, namun mereka tampaknya tidak akan bisa menggeser keseimbangan kekuatan di Yaman.

Jika kekuatan udara gagal menaklukkan Houthi, sebagaimana sudah diperkirakan, ada bahaya nyata bahwa sejumlah negara akan memutuskan melakukan intervensi lewat pasukan darat. Saat artikel ini ditulis, Saudi sudah mengumpulkan sekitar 150 ribu pasukan daratnya di wilayah dekat perbatasan dengan Yaman. Jika intervensi darat terjadi, sebagian besar pasukan asing yang akan masuk ke Yaman itu tampaknya akan berasal dari Arab Saudi.

Pollack dan pakar perang saudara Barbara Walter mengungkapkan, sejumlah besar studi tentang perang saudara menunjukkan, intervensi asing ke suatu perang saudara --untuk membela pihak yang kalah-- jarang menghasilkan penyelesaian yang cepat lewat negosiasi. Sebaliknya, intervensi itu justru memperpanjang konflik, menghasilkan lebih banyak korban tewas, dan kehancuran, persis seperti

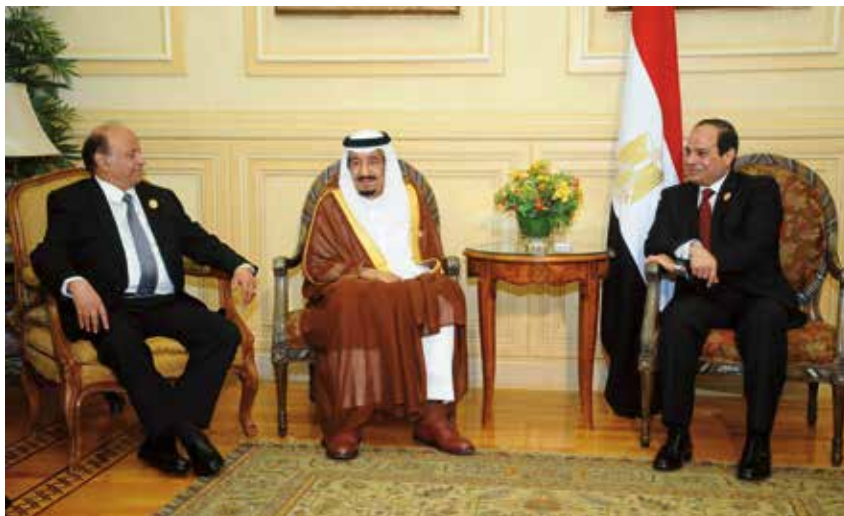
yang sekarang terjadi di Suriah. Dan yang terpenting, akan ada tekanan berlebihan terhadap negara yang melakukan intervensi, khususnya ketika negara itu memiliki kapabilitas terbatas dan berbagai problem dalam negerinya sendiri.

### Risiko Pengiriman Pasukan Darat

Arab Saudi saat ini tetap merupakan pemimpin dunia Arab, sekutu penting Amerika, dan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Namun Saudi juga negara dengan tantangan-tantangan dalam negeri yang signifikan, problem keuangan serius dengan merosotnya harga minyak, dan kini mengalami pergeseran dramatis dalam kekuasaan pemerintah akibat wafatnya Raja Abdullah dan naiknya Raja Salman ke tahta.

Kerajaan Arab Saudi memiliki kekurangan kapasitas untuk melakukan intervensi secara menentukan di Yaman. Jika Saudi nekad mengirim pasukan dalam jumlah besar dan masuk ke wilayah Yaman, hasil yang paling mungkin terjadi adalah ia akan terjebak di rawa kebuntuan yang melemahkan. Kebuntuan ini akan menyedot sumber daya militer Saudi, cadangan finansial, dan kehendak politiknya.

Mesir sudah menyatakan, pihaknya siap mengirim pasukan darat ke Yaman, jika serangan udara gagal mencapai misinya.



Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi (kanan) bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud (tengah) dan Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi (kiri) di Sharm el-Sheikh, Mesir, Sabtu (28/3).

Namun sejarah menunjukkan, Mesir pernah mengalami kegagalan pahit ketika terlibat pada perang saudara di Yaman 1961-1967. Kehadiran pasukan Mesir untuk mendukung pasukan Saudi tampaknya juga tidak akan meningkatkan peluang untuk sukses. Mesir sendiri kini dalam kondisi rapuh, dan tengah berjuang mengatasi problem-problem politik dan ekonomi yang sangat besar di dalam negeri. Mesir tidak butuh tambahan problem baru, yang justru akan semakin melemahkannya.

Yaman yang luasnya 527.968 km persegi, memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita 2.500 dollar AS pada tahun 2013. Negeri yang komoditas andalannya adalah gas alam dan minyak bumi ini, sebanyak 45 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Meski relatif miskin, secara geopolitik Yaman memiliki posisi strategis. Ia berbatasan dengan Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab, dan terletak antara Oman dan Saudi. Setiap hari sekitar 5 juta barrel minyak dibawa oleh kapal-kapal tanker, yang lalu lalang melalui Teluk Aden, sehingga pihak yang menguasai Yaman berpotensi memotong jalur laku lintas minyak yang strategis tersebut.

### Syiah Zaidi yang Moderat

Suku Houthi di Yaman adalah penganut Muslim Syiah dari sekte Zaidiyah. Aliran Zaidiyah sendiri

muncul dari pengikut Syiah di abad ke-8. Sebutan Zaidiyah berasal dari nama Zaid ibn Ali, cucu Hussein ibn Ali bin Abi Thalib. Pengikut Syiah Zaidi memiliki pendekatan yang unik terhadap pemikiran Islam Syiah. Hukum Islam yang dianut Syiah Zaidi mirip mazhab Hanafi di kalangan Muslim Sunni. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi yang beraliran Sunni, bahkan bersikap simpatik pada Syiah Zaidi dan pernah mendorong kalangan Muslim agar memberi sumbangan pada perjuangan mereka.

Berbeda dengan aliran Syiah lainnya, Syiah Zaidi tidak mempercayai doktrin bahwa seluruh-imam-imam sesudah Imam Hussein suci dari dosa. Pengikut Syiah Saidi juga tidak pernah mencerca Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, khalifah-khalifah pertama yang dihormati Muslim Sunni sebelum Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Dari seluruh aliran Syiah, Syiah Zaidi adalah yang paling moderat dan mirip dengan Sunni, baik dari segi doktrin ajaran maupun penafsiran hukum Islam.

Pecahnya perang dan penggulingan Presiden Abd-Rabbuh

Mansour Al-Hadi di Yaman bukanlah hasil dari kudeta atau pemberontakan Houthi. Sebaliknya, Al-Hadi digulingkan justru karena –dengan dukungan Arab Saudi dan AS—ia mencoba ingkar dari perjanjian pembagian kekuasaan yang telah ia buat, dan mencoba mengembalikan Yaman ke pemerintahan otoriter. Penggulingan Presiden Al-Hadi oleh Houthi dan sekutu-sekutu politiknya adalah reaksi yang tak terprediksi, terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh Al-Hadi, yang direncanakannya bersama Washington dan Riyadh.

Houthi dan sekutu-sekutunya mewakili lintas-bagian yang beragam dari masyarakat dan mayoritas orang Yaman. Aliansi gerakan domestik Houthi yang melawan Al-Hadi mencakup Muslim Syiah dan Muslim Sunni. Oleh karena itu, tidak bisa terlalu disederhanakan bahwa konflik di Yaman ini adalah semata-mata konflik Syiah melawan Sunni.

### Presiden Al-Hadi Ingkar Janji

Washington dan Riyadh tidak pernah menduga bahwa pihak Houthi akan bangkit dengan menggulingkan Al-Hadi dari kekuasaan. Namun reaksi Houthi ini sebetulnya tidaklah mendadak, tetapi melalui proses panjang selama satu dasawarsa. Bersama Riyadh, Al-Hadi telah terlibat dalam persekusi terhadap Houthi dan manipulasi politik kesukuan di Yaman, bahkan sebelum ia menjadi presiden.

Ketika ia menjadi Presiden, Al-Hadi justru menghambat implementasi berbagai kesepakatan yang telah diatur melalui konsensus dan negosiasi dalam Dialog Nasional Yaman. Dialog itu diselenggarakan sesudah Presiden Ali Abdullah Saleh dipaksa menyerahkan kekuasaannya.

Awalnya, ketika mengambil alih Sanaa pada September 2014, pihak Houthi menolak usulan Al-Hadi dan tawaran barunya bagi sebuah perjanjian pembagian kekuasaan formal. Houthi menganggap Al-Hadi sebagai tokoh yang tak layak dipercaya, sesudah ingkar dari janji-janji sebelumnya tentang pembagian

kekuasaan politik.

Pada saat itu, tindakan Al-Hadi yang mengandalkan dukungan Washington dan Riyadh membuatnya sangat tidak populer di Yaman dan di mata mayoritas penduduk. Dua bulan kemudian, 8 November 2014, partai Al-Hadi sendiri, Kongres Rakyat Umum Yaman atau YGPC juga akan memecat Al-Hadi sebagai pimpinan.

Houthi akhirnya menahan Presiden Al-Hadi, merebut istana kepresidenan serta gedung-gedung pemerintahan lainnya pada 20 Januari 2015. Dengan dukungan populer, Houthi secara resmi membentuk pemerintahan transisi Yaman pada 6 Februari 2015. Al-Hadi dipaksa mundur. Pada 6 Februari, Houthi mengumumkan, Al-Hadi, Amerika, dan Arab Saudi merencanakan penghancuran Yaman.

Mundurinya Al-Hadi merupakan kemunduran bagi kebijakan luar negeri AS. Badan intelijen Amerika, CIA dan Pentagon juga terpaksa menghentikan aktivitas kemiliteran dan operasionalnya, karena personel dan operator intelijen militer AS harus enyah dari Yaman. Ketika merebut Biro Keamanan Nasional Yaman, pihak Houthi dikabarkan mendapatkan banyak dokumen rahasia, karena biro itu sebelumnya bekerjasama erat dengan CIA untuk menjalankan operasi-operasi AS di Yaman.

### **Menolak Tunduk pada AS dan Saudi**

Al-Hadi berhasil lari meninggalkan Sanaa, ibukota Yaman, dan pindah ke kota pelabuhan Aden pada 21 Februari 2015. Ia mendeklarasikan Aden sebagai ibukota Yaman sementara pada 7 Maret 2015. AS, Perancis, Turki, dan sekutu-sekutunya dari Eropa Barat menutup kedutaan mereka di Sanaa. Tak lama kemudian, dalam langkah yang tampaknya dikoordinasikan dengan AS, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab juga memindahkan kedutaannya dari Sanaa ke Aden. Al-Hadi menarik kembali surat pengunduran

dirinya sebagai Presiden dan mengumumkan bahwa ia membentuk sebuah pemerintahan dalam pengasingan.

Houthi dan para sekutu politiknya menolak tunduk pada tuntutan-tuntutan AS dan Arab Saudi, yang dikemukakan lewat mulut Al-Hadi di Aden dan komentar-komentar Riyadh. Maka menteri luar negeri Al-Hadi, Riyadh Yaseen, pada 23 Maret 2015 meminta Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk yang kaya minyak untuk melakukan intervensi militer, untuk mencegah Houthi mengontrol ruang udara Yaman. Yaseen mengatakan, perlu dilakukan serangan udara dan bahwa zona larangan terbang harus diberlakukan di Yaman.

Sadar bahwa pertarungan militer akan segera terjadi, pihak Houthi dan sekutu-sekutunya di militer Yaman bergegas untuk mengontrol sebanyak mungkin lapangan terbang dan pangkalan udara militer Yaman, dalam waktu sesegera mungkin. Mereka bergegas untuk menetralisasi Al-Hadi. Milisi Houthi memasuki Aden pada 25 Maret 2015, namun saat itu Al-Hadi sudah meninggalkan kota pelabuhan tersebut.

Al-Hadi muncul lagi di Riyadh sesudah Arab Saudi mulai menyerang Yaman dengan pesawat-pesawat tempurnya pada 26 Maret 2015. Dari sana, Al-Hadi terbang ke Sharm El-Sheikh, kota pinggir pantai Mesir, untuk menghadiri pertemuan Liga Arab yang melegitimasi aksi militer ke Yaman. Dalam pertemuan itu, Al-Hadi menuduh “Iran berada di balik pemberontakan Houthi.” Tuduhan ini telah dibantah tegas oleh Iran.

Malah pertemuan Liga Arab ini telah menghidupkan lagi gagasan lama bagi pembentukan pasukan gabungan Liga Arab, untuk menghadapi ancaman keamanan dari Yaman sampai Libya. Usulan pembentukan pasukan Arab gabungan itu dilontarkan pertama kali oleh Mesir, awal Desember 2014, untuk menghadapi ancaman teroris, terutama dari kelompok ekstrem ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah).

### **Kelompok-kelompok Militer Lain**

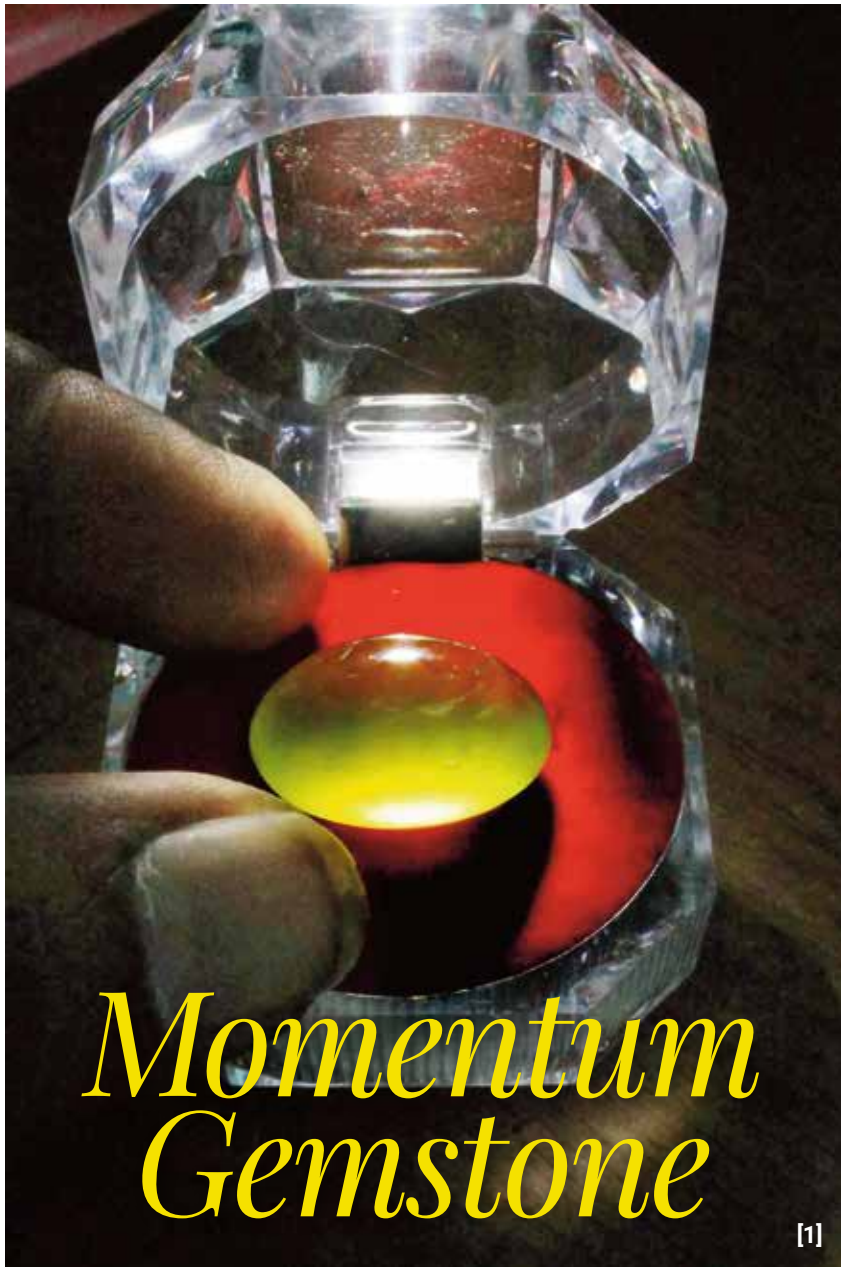
Pejabat militer Mesir mengatakan, pasukan gabungan yang diusulkan itu akan terdiri dari 40.000 pasukan elite, dan mungkin bermarkas besar di Kairo atau Riyadh. Pasukan itu akan dilengkapi dengan pesawat tempur, kapal perang, dan kendaraan lapis baja ringan. Namun, dari 22 negara anggota Liga Arab, tampaknya tidak semua akan terlibat, karena adanya faksi-faksi di kawasan itu. Suriah dan Irak, yang punya hubungan dekat dengan Iran, tampaknya tak akan terlibat.

Hal lain yang bisa menambah komplikasi situasi di Yaman adalah kehadiran kelompok-kelompok Muslim militan Sunni, seperti Al-Qaeda Yaman, sejak 2011. Bulan Maret 2015, ada serangan bom terhadap masjid Houthi yang menewaskan puluhan jamaah. Keberadaan kelompok-kelompok “jihad” ini menguat ketika Yaman dirundung perang saudara.

Krisis Yaman mau tak mau berdampak langsung pada Indonesia, karena krisis militer akan meningkatkan harga minyak dunia. Selain itu, tercatat ada 4.159 warga Indonesia yang tinggal di Yaman, terdiri dari 2.686 mahasiswa dan 1.488 buruh migran sektor migas. Situasi politik yang tak stabil dan konflik militer mengancam keselamatan mereka, sehingga pemerintah mengirim tim dari kementerian luar negeri, polisi, dan TNI Angkatan Udara untuk mengevakuasi mereka.

Konsentrasi sebagian besar WNI itu adalah di wilayah Yaman selatan. Sampai 31 Maret 2015, tercatat sudah 148 WNI yang dievakuasi. Pihak kedutaan besar Indonesia sejak jauh hari telah menyiapkan sejumlah rumah aman untuk keperluan proses evakuasi. Rumah-rumah itu antara lain terletak di selatan kota Aden, yang saat artikel ini ditulis sedang digempur oleh milisi Houthi. Lokasi lain adalah di Tarim, 640 km sebelah timur ibukota Sanaa. Semoga saja krisis di Yaman ini tidak berlarut-larut. ■

Satrio Arismunandar (dialah dari berbagai sumber)



# Momentum Gemstone

[1]

**R**ombongan Presiden Joko Widodo berhenti di sebuah stan pameran kerajinan dan *craft* di Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/3). Mata Jokowi tertuju pada jajaran batu akik jenis Bacan yang dijual dalam pameran tersebut. Ia mencoba beberapa batu sambil menanyakan jenis dan harganya. Salah satu batu yang memikat Jokowi disebut oleh penjualnya seharga Rp25 juta. Lantaran harganya yang dinilai

terlalu mahal Jokowi mengurungkan niatnya untuk membeli.

Itulah salah satu peristiwa yang mengiringi popularitas batu akik. Momentum demi momentum yang didapatkan batu mulia membuat popularitasnya terus melejit. Batu permata yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Gemstone ini jamak di kalangan masyarakat dikatakan sebagai batu akik.

Momentum paling gres batu akik ada pada perhelatan akbar di



[3]

Bandung dan Jakarta, 19-24 April 2015 besok. Ya, pada perhelatan peringatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KTT) Asia Afrika ke-60 yang diikuti perwakilan 106 negara dan 19 perwakilan organisasi internasional.

Topik pembicaraannya tidak pernah lepas dari pemberitaan di sela persiapan pertemuan petinggi-petinggi antar negara tersebut. Itu setelah Walikota Bandung Ridwan Kamil menyatakan akan memberikan kenang-kenangan atau suvenir berupa batu akik bagi peserta KTT.

Meski bukan bagian dari fasilitas utama guna mendukung suksesnya pertemuan, tetapi buah tangan ini





[1] Pedagang memperlihatkan permata Giok Aceh jenis Solar Neon tiga dimensi disalah satu pusat penjualan giok di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selasa (7/4).

[2] Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mendag Rahmat Gobel (kedua kiri) mencoba batu cincin asli Indonesia ketika membuka International & Craft Indonesia 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Sabtu (14/3).

[3] Pengunjung melihat bahan batu akik saat Pameran dan Kontes Batu Akik skala nasional dan internasional di Makorem 032/Wirabraja, Padang, Sumatera Barat, Kamis (19/3).

benar-benar menjadi buah bibir masyarakat. Bahkan pemberitaannya bisa dikatakan melebihi persiapan peringatan KTT Asia Afrika itu sendiri.

Munculnya tanggapan beragam dari masyarakat, khususnya perajin batu, menambah hangat saja. Apalagi tanggapan disertai pula dengan bumbu 'perseteruan' antara pengrajin batu akik Garut dan Sumatera Selatan. Antara akik Pancawarna dan akik Batu Raja. Dua daerah yang sama-sama menghasilkan batu akik terbaik. Mereka berebut tempat di hati Ridwan Kamil agar dijadikan suvenir.

Mencuatnya batu akik ditengah persiapan peringatan KTT Asia Afrika

ke-60 tentu bukan untuk mengadu kualitas batu akik terbaik dari dua daerah dimaksud ataupun daerah lainnya. Tidak pula dimaksudkan untuk menciptakan 'perseteruan' baru antara dua penghasil batu terbaik.

Sebab berkaca pada sejarah digelarnya KTT Asia Afrika di Bandung, 18 April 1955 silam, semangatnya adalah menciptakan perdamaian dari dua blok besar. Blok Amerika Serikat/sekutu dan Uni Soviet. KTT mendamaikan dan menekankan bahwa Blok Barat dan Blok Timur harus bersatu.

Selayaknya pula tidak ada tempat bagi 'perseteruan' sebab konflik hanya melahirkan penderitaan masing-masing pihak. Perajin Batu Panca Warna dari Garut Jawa Barat maupun Batu Raja dari Baturaja Sumatera Selatan. Semuanya harus bersatu, saling menghormati.

### Digemari Pejabat Negara

Sebelum Ridwan Kamil menyatakan akan memberikan suvenir batu akik bagi peserta KTT Asia Afrika, diketahui bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke-6 juga menggemari batu akik. Bahkan menengok lebih ke belakang, diketahui pula ternyata Presiden Soekarno menggemari hal serupa.

Mari kita lihat satu-persatu jenis batu akik kepala negara Republik Indonesia dari Soekarno hingga Joko Widodo.

**Presiden Soekarno.** Diolah dari berbagai sumber, Presiden RI pertama Soekarno disebut memiliki sejumlah koleksi batu akik. Perhiasannya disimpan di Blitar. Batu Ruby atau Merah Delima merupakan jenis batu yang disukainya. Batu ini masih satu keluarga dengan batu safir.

Jenis batu ini berasal dari Myanmar. Keberadaannya sejajar dengan empat batu berharga di dunia dengan tingkat kekerasan mencapai 9.0 skala Mosch atau setingkat dibawah intan dengan tingkat kekerasan 10.0 skala Mochs.

**Presiden Soeharto.** Presiden

yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun ini menyukai batu jenis Mustika Ruby atau Mustika Batu Merah Delima. Batu berasal dari myanmar hanya dimiliki segelintir orang. Prabu Airlangga, Patih Gajahmada dan Joko Tingkir disebut pernah mengenakan batu Merah Delima.

Batu dengan warna sangat menarik tersebut memiliki tingkat kekerasan Batu Merah Delima diberitakan mencapai 9.0 skala Mochs.

**Presiden B.J. Habibie.** Presiden pertama era reformasi disebut menggemari batu jenis berlian atau intan (*diamond*). Jenis batu yang sangat terkenal tersebut merupakan benda dengan material carbon murni.

Berlian berasal dari Afrika Selatan. Daya tahan batu berlian tertinggi di muka bumi dengan tingkat kekerasan mencapai 10 skala Mochs.

**Presiden Abdurrahman Wahid.**

Gus Dur, sapaannya, dikabarkan menggemari batu jenis Zamrud atau emerald. Jenis batu ini merupakan bagian dari batu beryl yang memiliki warna khas hijau.

Batu yang bisa ditemukan di Kalimantan ini mempunyai tingkat kekerasan mencapai 7.5 hingga 8.0 skala Mochs.

**Presiden Megawati Soekarno**

**Putri.** Putri Bung Karno sekaligus Presiden wanita pertama Indonesia menyukai batu jenis Black Sapphire. Batu jenis ini bisa ditemukan di Thailand, Australia, Srilanka, Tiongkok, Madagaskar, Rusia, Afrika dan lainnya.

Di Indonesia, batu jenis ini bisa ditemukan di Pacitan Jawa Timur dan Kalimantan. Black Sapphire mempunyai tingkat kekerasan mencapai 9.0 skala Mochs.

**Presiden Susilo Bambang**

**Yudhoyono.** Presiden SBY menyukai Batu Biduri Mata kucing atau Cats Eye. Batu yang memiliki tingkat kekerasan 8.5 skala Mochs ini bisa ditemukan di Kalimantan. Selain itu juga di Srilanka, India, Brazil dan negara lainnya. ■

Soemitro

# Cita-cita Perdamaian yang Lahir di Tengah Benturan Peradaban

**A**da yang lain kali ini dari Jackie Chan. Tipikal konyol dalam gerakan kungfunya berubah 360 derajat di film barunya: *Dragon Blade*.

Seturut dengan bertambahnya usia, Jackie rupanya mulai mencapai kematangannya. Dua film sebelumnya, seperti *The Myth* (2005) dan *The Mummy-Tomb of the Dragon Emperor* (2008), sebenarnya Jackie sudah memulai “babak baru”-nya dalam menggarap film-filmnya.

Namun, ada yang sangat menarik di film *Dragon Blade* kali ini. Jackie sudah mulai masuk ke tema antarperadaban dan filosofi China yang sempat unggul jauh sebelum Yesus Kristus lahir.

Dengan tema besar Jalur Sutera (*Silk Road*), Jackie mencoba mengkritisi isu pertarungan geopolitik global besar di isu Jalur Sutera saat ini yang penuh dengan darah, mesiu, dan kepiluan dengan membawa

kembali ke Jalur Sutera yang lekat dengan pesan universalisme, kemanusiaan dan perdamaian.

Istilah Jalur Sutera pertama ditulis oleh geografer asal Jerman Von Richthofen pada abad ke-19 untuk memperkenalkan jalur perdagangan yang sudah ada sejak 3 SM lalu. Jalur Sutera terbentang dari China, Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah hingga menyentuh bagian terluar Eropa. Jalur ini adalah jalur penting perdagangan antarsuku (internasional).

Sesuai namanya, komoditas yang paling populer dijalar perdagangan ini adalah sutera. Meski banyak

komoditas lain seperti emas, gading, keramik dan lainnya. Bentang alam dan jalur yang amat jauh ini menyebabkan jalur sutera dipenuhi para penyamun, pengganggu dan termasuk alam yang ganas.

Dalam film ini diceritakan bahwa sudah ada “benteng kekuasaan” yang mengatur 36 suku yang daerahnya dilintasi Jalur Sutera yakni benteng Perdamaian.

Adalah Jendral Huo an, diperankan oleh Jackie Chan. Jendral yang sangat disegani ini menjadi penjaga perdamaian di Jalur Sutera yang ribuan kilometer panjangnya. Jendral Huo an yang sangat rendah hati ini menjadi katalisator dari 36 etnis agar tidak terjadi perang. Jendral Huo an juga lah yang menjaga agar Jalur Sutera ini menjadi tempat paling strategis agar terjadi dialog antarperadaban. Kuncinya, Jenderal Huo an harus mampu menjaga agar Jalur Sutera ini adalah jalur yang damai.

Suatu ketika, Jenderal yang berasal dari suku Hun (salah satu suku di





Tiongkok) ini difitnah melakukan transaksi emas ilegal. Jenderal Huo an akhirnya diasingkan ke Benteng Angsa, sebuah penjara tempat berbagai suku yang terhubung dijalar sutra menjalani kerja paksa karena melakukan kesalahan.

Tak beberapa lama di penjara, pada suatu saat muncul ratusan pasukan Roma yang dipimpin oleh Jenderal Julius (diperankan John Cusack). Ternyata, Julius dan pasukannya adalah pasukan pelarian elite Kerajaan Roma yang saat itu sedang melindungi seorang pangeran yang usianya masih muda. Mereka terpaksa singgah ke Benteng Angsa karena kehabisan logistik.

Dengan semangat perdamaian, tanpa melihat asal, warna kulit atau suku, Jendral Huo an mempersilakan untuk tinggal sementara di Benteng Angsa.

Disinilah frasa demi frasa dalam film ini sebenarnya bermula, ketika terjadi dialog nyata antarperadaban. Benteng Angsa saat itu sedang terancam *deadline* renovasi sebagian tembok pertahanannya. Dengan teknologi membangun benteng dalam waktu singkat yang dimiliki pasukan Roma ternyata menjadi jawaban penting. Peninggi, penghuni dan tahanan di Benteng Angsa sangat berterimakasih atas bantuan pasukan Roma.

Tak lama kemudian, muncul sebuah konspirasi untuk

melenyapkan pengaruh Jenderal Huo an untuk menguasai Jalur Sutra dan sekaligus membunuh pangeran muda Roma.

Momen ini mempertemukan Jendral Huo dan Jendral Julius untuk bersatu dan membentuk sebuah koalisi melawan ribuan pasukan Roma yang mulai mengepung Benteng Angsa.

Meskipun dalam narasi tersebut diceritakan sang Jenderal Julius dan Pangeran Muda mati. Lalu Jendral Huo akhirnya menjadi penguasa wilayah tersebut. Namun, film itu mampu menggiring pesan penting film ini bahwa perdamaian lah yang mampu membawa berbagai kepentingan dari berbagai suku/ kerajaan ke dalam harmoni antarbangsa.

Film ini juga membawa pesan penting lain, sebuah benturan peradaban justru mampu menggagas sebuah model perdamaian baru. Bukan peperangan. Di beberapa adegan dalam film ini juga memperlihatkan ternyata Jendral Huo punya sekolah lintas peradaban. Muridnya adalah anak-anak dari berbagai suku dan ras.

Hal besar yang dilakukan Jackie Chan lewat *Dragon Blade* kali ini adalah Jalur Sutra adalah jalur paling penting yang mempertemukan beberapa peradaban dalam sebuah kesepakatan bersama: perdamaian. Meski tak mudah untuk mewujudkan

hal itu tak mudah, *toh* ternyata perdamaian itu bisa terjadi.

Dalam sebuah sekuel di film itu, Jendral Huo an berkata: “Jangan remehkan manusia”.

Jendral itu yakin di tengah keserakahan, peperangan dan nafsu angkara ternyata masih ada manusia-manusia yang percaya pada kekuatan kemanusiaan untuk menaklukkannya.

Bahwa perdamaian dan kemanusiaan adalah satu. Dan keduanya adalah mungkin diwujudkan! 🗡️

Ditulis: Iman Zanatul Haeni  
Pustakawan di Perpustakaan Kandang Buku



#### **DRAGON BLADE**

**Produser:** Jackie Chan, Susanna Tsang  
**Sutradara:** Daniel Lee  
**Penulis Naskah:** Daniel Lee  
**Produksi:** Shanghai Film Group

## 42 WNI Berhasil Dievakuasi dari Yaman



Puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Yaman, Timur Tengah, tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Mereka berhasil dievakuasi dari Yaman dengan menggunakan maskapai penerbangan Qatar Airways.

"Ya, hari ini sebanyak 42 WNI dari Yaman tiba di Bandara Ngurah Rai," kata Co GM Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ngurah Ardita, Senin (6/4) pekan lalu.

Setelah tiba di tanah air, ke-42 WNI akan segera diantar ke keluarganya di berbagai daerah seperti Surabaya dan Makasar.

Mereka berhasil dievakuasi secara bertahap oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah setempat. Evakuasi dilakukan menyusul keamanan di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan keprihatinannya atas adanya warga negara Indonesia (WNI) berjumlah sekitar 89 orang yang masih tertahan di wilayah Aden dan belum bisa dievakuasi.

Dalam konferensi persnya di Jakarta, Retno mengungkapkan Tim Evakuasi WNI yang dibentuk pemerintah telah menyiapkan kapal laut untuk langkah evakuasi. Akan tetapi, pada saat kapal untuk evakuasi itu merapat ke pelabuhan, ada perubahan situasi keamanan yang membuat para WNI di Aden tidak bisa keluar untuk menuju ke pelabuhan.

Pihaknya kemudian melakukan koordinasi dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan

Menteri Pertahanan Arab Saudi, untuk bisa membantu proses evakuasi WNI di Yaman.

Selain itu juga koordinasi dengan Wakil Tetap RI di PBB untuk mengikuti pembahasan di Dewan Keamanan PBB guna mendorong langkah konkret

terwujudnya 'humanitarian pause' (jeda kemanusiaan) di Yaman.

"Jadi, apabila jeda kemanusiaan itu terjadi, kita bisa secara cepat melakukan evakuasi terutama di wilayah Aden, dimana 89 WNI masih berada di sana," ujar dia.

"Sejauh ini kita perlu bersyukur bahwa tim evakuasi kita kompak dan kuat. Saya mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar tim evakuasi yang berada di lapangan diberi kemudahan untuk menyelamatkan saudara kita di sana," lanjut Retno.

Keadaan keamanan di Yaman, khususnya di bagian barat Yaman di sekitar kota Aden dan Sana'a belakangan semakin memprihatinkan. Kontak senjata antara pihak yang bertikai semakin meluas.

Keadaan itu mempersulit upaya evakuasi yang dilakukan dan mengharuskan Tim Evakuasi WNI untuk terus menyesuaikan skenario, langkah dan proses evakuasi. Bagaimanapun, tim evakuasi tetap berpegang pada prinsip melakukan evakuasi secara cepat, aman dan efisien.

Terkait kondisi keamanan yang tidak kondusif di Yaman, Pemerintah Indonesia kembali menyesalkan jatuhnya korban sipil dalam pertikaian di Yaman.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus menyerukan semua pihak yang bertikai agar dapat lebih menahan diri dan memperhatikan keselamatan warga sipil, baik itu warga Yaman maupun warga asing.

/ Bobby Ardalan

## Tidak Kunjung Diberangkatkan Umroh, KBIH Dipolisikan

Perusahaan penyalur penyelenggara umroh, PT Hikmah Sakti Perdana, yang bekerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhamadiyah Surabaya dilaporkan oleh sejumlah warga ke Polda Jatim.

PT Hikmah Sakti Perdana dilaporkan lantaran tidak kunjung memberangkatkan 48 calon umroh yang sudah mendaftar. Padahal, mereka semua sudah membayar sekitar Rp 17 juta per jamaah. Jika sesuai jadwal, mereka seharusnya sudah berangkat pada tahun 2014 kemarin.

Salah satu korban adalah Buchori, warga Sukolilo, Surabaya, didampingi kuasa hukumnya, Abdul Malik, menyerahkan bukti-bukti dugaan aksi penipuan dan penggelapan kepada Polda Jatim.

"Saya sudah bertanya ke travelnya di KBIH Muhamadiyah, tapi cuma dijanjikan terus. Akhirnya saya minta uang dikembalikan, ternyata juga hanya dijanjikan belaka," ujar Buchori di Polda Jatim, (5/4).

Banyak alasan yang dikemukakan pihak travel, mulai dari pesawat rusak sampai petugas travel yang sakit.

Kuasa hukum Buchori menjelaskan, pada pertemuan terakhir dengan jamaah, salah satu orang travel yang bernama Vidia justru mengancam korban agar tidak melapor ke polisi.

Dengan melaporkannya Buchori ke Polda Jatim, berarti sudah 8 orang korban yang sudah melapor. Sebelumnya sudah ada dua orang, dan Buchori melapor bersama 5 anggota keluarganya yang sama-sama gagal berangkat. / Soemitro



# Penutupan Situs Islam Bungkam Perkembangan Khazanah Islam

Penutupan situs Islam oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nasional (BNPT) melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, menuai kritik dari masyarakat.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai Kemenkominfo dan BNPT tak sepatutnya melakukan penutupan situs tersebut tanpa kajian mendalam. Termasuk kajian mengenai kebebasan berpendapat, sebab penutupan situs Islam merupakan bentuk pembungkaman terhadap perkembangan khazanah ilmu ke-Islaman.

"Walau bagaimanapun, menutup situs-situs Islam yang dianggap berbau fundamental itu mempersempit ilmu pengetahuan. Muatan materi di situs tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan wacana dan untuk memperluas

khazanah ke-Islaman," ucap Ketua Badko Kohati HMI Jateng-DIY, Siti Nur Malikha di Semarang, Kamis (2/4) pekan lalu.

Ia mengatakan upaya pencegahan terorisme tidak perlu menutup situs Islam, melainkan dapat melalui pendidikan. Tataran lembaga pendidikan salah satunya dengan cara memperkuat peranan lembaga pendidikan dan menanamkan paham kebangsaan agar masyarakat terdidik untuk hidup rukun, saling menghormati antar sesama dan tidak membedakan antar golongan tertentu.

Ditekankan dia, tindak terorisme di Indonesia dan negara lainnya, secara umum tidak semata didasari faktor agama. Melainkan



faktor-faktor lainnya yang justru lebih penting bagi kehidupan masyarakatnya.

Diantaranya faktor sosial ekonomi, politik, faktor budaya, wilayah kekuasaan, strata sosial dan lainnya. Keadilan sosial ini bisa memicu munculnya tindakan nekad setiap warga negara melakukan teror.

Tindak teror ditambahkan Siti juga bisa sengaja diciptakan oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu. /Muhammad Dasuki

## Ganjar Ajak Tobat Korupsi APBD Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku proses pembahasan anggaran di legislatif dan eksekutif

Jawa Tengah tidak ada aroma kongkalikong atau munculnya dana siluman sebagaimana terjadi di Pemprov DKI Jakarta.

"Jateng tidak ada lagi sebutan budaya *fee*, baik untuk Pemprov Jateng maupun DPRD Jateng," kata Ganjar di Semarang, Kamis (2/4) pekan lalu.

Untuk

antisipasi langkah masuknya dana siluman, pihaknya mengefektifkan *roadshow* Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di 35 kabupaten/kota. Dimana 35 daerah itu dikoordinasikan dalam beberapa pertemuan.

Yakni pada pertemuan di eks Karesidenan Pati, eks Karesidenan Semarang, Eks Karesidenan Kedu, Eks Karesidenan Surakarta dan Karesidenan Banyumas dan Karesidenan Pekalongan.

Dalam Musrenbangwil yang bertajuk "Ayo Dirembug! Musyawarah Mbangun Jawa Tengah" yang melibatkan unsur pimpinan DPRD Jateng, Bupati/Walikota se Jateng, Ormas dan Parpol Ganjar menghimbau, "Bantuan-bantuan saya minta tidak ada potongan. Tolong, cerita komisi hentikan. Tobat-tobat. Saya ngomong agak *njiwit sitik*. Tolong Tobat-tobat. Duit kita berikan kepada rakyat sangat sedikit sekali," tegas Ganjar.

Ia menyoal peran partai politik yang tidak maksimal dalam Musrenbangwil. Padahal masukan dan saran mereka sangat diperlukan guna mendorong pembangunan di masing-masing daerah. Mereka diharapkan bisa mengawal langsung evaluasi proses pembangunan di daerah.

Ganjar berharap dengan porsi anggaran RAPBD 2016 mdatang yang disusun melalui Musrenbangwil bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat Pemkab/Pemkot Se Jateng. Baik melalui aspirasi eksekutif, legislatif, *top-down* dan *bottom up*, termasuk melalui sosial media yang sering diterima Ganjar secara langsung bisa membangun Jateng lebih baik.

"Sekarang kita wujudkan bagaimana Jateng bisa cepat maju. Bagaimana Jateng bisa lebih sejahtera. Temen-temen DPRD juga bisa ikut dan langsung mengontrol atau menyalurkan aspirasi setelah melalui masa reses," pungkasknya. /Muhammad Dasuki



# Takdir Mega, Tegar dan Getir

Dhia Prekasha Yoedha

**T**egar dalam getir, mungkin itu takdir presiden kelima Indonesia, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri. Megawati tercatat sebagai perempuan pertama yang menjadi presiden di Indonesia.

Langkah memimpin partai yang menentang penindasan rakyat itu ditapaki Mega dengan menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI), menentang pemerintahan otoriter Orde Baru. Kendati berulang kali coba digulingkan oleh para pengikut Jenderal Soeharto yang cemas oleh kebangkitan Soekarnoisme, Mega tetap tegar memimpin partai yang disebut sebagai PDI ProMega oleh para pendukungnya.

Kegigihan 'Perjuangan Megawati' meski terus ditindas seperti melalui rekayasa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) ini kemudian memuncak jadi gerakan reformasi Mei 1998. Seiring tumbangannya rezim Orde Baru, PDI pimpinan Megawati pun beralih nama menjadi PDI Perjuangan.

## Tegar Dalam Getir

Semirip nasib ayahnya yang sering didera derita. Begitu pula nestapa jalan hidup Megawati, Ibu Rakyat Indonesia ini. Meski lahir di lingkungan istana, anak kedua dari pernikahan ketiga Soekarno dengan Fatmawati ini ternyata lebih diakrabi oleh getir kepahitan hidup.

Mega lahir 23 Januari 1947 di kampung Ledok Ratmakan, tepi barat Kali Code, dalam suasana kedaruratan ibukota perjuangan Yogyakarta, berhubung Jakarta dinilai tidak aman lagi bagi kelangsungan pusat pemerintahan negara baru merdeka ini, terpaksa ditinggalkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta yang diungsikan oleh para pejuang republiken.

Ia lahir semasa Yogyakarta digempur bertubi oleh agresi militer Belanda. Bahkan Goentoer, Mega dan Fatmawati pun terpaksa harus diungsikan, sewaktu Soekarno, Hatta, perdana menteri Sutan Sjahrir ditawan dan diasingkan Belanda ke pulau Bangka.

Saat bersekolah di Perguruan Cikini, Jakarta Pusat, pada 30 November 1957 pukul 20.45, Mega juga nyaris tewas akibat teror yang ingin membunuh ayahnya. Enam granat dilemparkan dua teroris dari kelompok Pemerintah Republik Islam Indonesia ke arah Presiden Soekarno yang berjalan meninggalkan gedung sekolah usai menghadiri bazaar.

Saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas

Padjajaran pada 1965-1966 dia sering di-bully oleh sekelompok mahasiswa yang menyebut diri komponen Orde Baru. Mirip dengan nasib Guntur, kakaknya, sehingga putus kuliah dari Institut Teknologi Bandung.

Yang lebih menyakitkan, Mega pernah menuturkan, dia pernah dipaksa ayahnya memasak nasi goreng bagi para mahasiswa demonstran yang diterima Bung Karno berdialog di istana. Padahal mereka selalu menghujat dan memecam Bung Karno dan keluarganya. Sehingga, tanpa terasa, air mata Mega terjatuh ke wajan membumbui nasi goreng yang disantap para tokoh mahasiswa pejuang angkatan 66 yang kelaparan itu.

Itu belum cerita-cerita getir lain. Semisal soal kehidupan rumah tangganya yang sempat membuat air matanya menetes lagi.

Namun, Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya 1993 mengubah kehidupannya. Dia terpilih sebagai Ketua Umum *de facto* PDI. Pada Pemilu 1998, PDIP memenangkan pemilu dengan meraih tiga puluh persen lebih suara. Meski akhirnya Gus Dur terpilih sebagai Presiden. Pada Senin 23 Juli 2001, Mega diangkat menjadi Presiden, mengganti Abdurrahman Wahid yang dicabut mandatnya akibat membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar secara sepihak.

## Warisan Mega

Sesingkat apapun masa pemerintahannya, Mega dipuji sukses memperkuat konsolidasi demokrasi. Mulai dari kepastian hukum pemisahan fungsi pertahanan oleh TNI dan fungsi keamanan oleh Polri. Demikian pula dengan sukses pemilihan umum presiden secara langsung secara demokratis, sebagai indikator kematangan proses demokratisasi di Indonesia.

Meski selaku *incumbent* pada 20 September 2004, Mega yang meraih 40% suara kalah dari mantan Menteri Koordinator Susilo Bambang Yudhoyono peraih 60% pemilih, namun Mega dikenang sebagai Ibu Rakyat Indonesia yang terbukti mampu menjamin peralihan kepemimpinan nasional secara demokratis dan damai.

Dalam Pilpres 2014, Megawati menugasi Joko Widodo selaku kader maju sebagai Capres yang diusung PDI Perjuangan. Akhirnya melalui proses pemilu cukup panjang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 - 2019. ■

Dhia Prekasha Yoedha

Yuk Pasang Iklan Paket Hemat

# PAKET PROMO IKLAN!



Aktual Magz

[aktual.co](http://aktual.co)



**INFO DAN PEMASARAN :**

**Ajeng - 0812 1882 9528 / [marketing@aktual.co](mailto:marketing@aktual.co)**

PT. CAPROF MEDIA NEGERI  
Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101  
Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22. Cawang Jakarta Timur

# AKTUAL

Berani  
Beda  
Karena  
Benar

## Info Dan Pemasaran :

☎ 0812 1882 9528 (Marketing)

✉ iklan@aktual.co

marketing@aktual.co

www.aktual.co

